Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

PERANAN MASYARAKAT DESA DI JAWA TENGAH DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN TAHUN 1945 -- 1949

DAERAH KENDAL DAN SALATIGA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

PERANAN MASYARAKAT DESA DI JAWA TENGAH DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN TAHUN 1945--1949

DAERAH KENDAL DAN SALATIGA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

PERANAN MASYARAKAT DESA DI JAWA TENGAH DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN TAHUN 1945--1949 : Daerah Kendal dan Salatiga

Penulis : Chusnul Hajati, MS.
Supriyo Prianto
Sutejo K. Widodo, MSi
Sutarno

Penyunting : Susanto Zuhdi

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1996

Edisi 1997

Dicetak oleh : CV. PUTRA SEJATI RAYA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Peranan Masyarakat Desa Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945--1949 : Daerah Kendal dan Salatiga, ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/ penulisan yang diselenggarakan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995/1996.

Buku ini menguraikan tentang partisipasi dan peran serta masyarakat desa di daerah Jawa Tengah dan keterlibatan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mereka itu adalah tokoh masyarakat, para Ulama, Santri bahkan petani yang tindakannya dinilai mengorbankan semangat para pejuang pada masa mempertahankan proklamasi tersebut.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat dalam periode perjuangan kemerdekaan dan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka

yang berminat pada kajian pedesaan. Disamping itu diharapkan dapat menjadi bahan peningatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, Oktober 1997

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

G.A. Ohorella

NIP. 130370094

KATA PENGANTAR

Penelitian mengenai peranan masyarakat desa di pedesaan Jawa Tengah pada tahun 1945--1949 merupakan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994/1995.

Pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara instansional maupun perorangan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional yang telah memberikan ijin dan dana kepada Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Pernyataan terima kasih kami sampaikan pula kepada Staf Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Wilayah Daerah Istimeawa Yogyakarta, Perpustakaan Islam Yogyakarta yang telah memberikan pinjaman koleksi kepustakaannya kepada kami.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Salatiga dan Kabupaten Kendal, Kantor Veteran Kabupaten Salatiga dan Kabupaten Kendal, para informan, dan berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya teriring harapan, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai peranan

masyarakat desa pada masa revolusi. Apabila terdapat kekurangan semoga dapat disempurnakan oleh penelitian berikutnya.

Semarang, Oktober 1995

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan v

Pengantar vii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Ruang Lingkup 5
1.3 Batasan Pengertian 8
1.4 Tujuan Penelitian 10
1.5 Metoda Penelitian 10

Bab II Jawa Tengah pada Masa Perjuangan Kemerdekaan

2.1 Keadaan Umum Daerah Jawa Tengah 15
2.1.1 Lingkungan Geografis 15
2.1.2 Kehidupan Sosial Politik 17
2.1.2.1 Struktur Pemerintah 17
2.1.2.2 Badan Perjuangan dan Organisasi Pemuda 22
2.1.3 Kehidupan Sosial Budaya 28
2.2 Peranan Masyarakat Desa di Jawa pada Masa Perjuangan Kemerdekaan 31
2.2.1 Menghadapi Jepang 32

2.2.2	Menghadapi Sekutu	38
2.2.3	Menghadapi Belanda	42
Bab III	**Peranan Masyarakat Desa di Kendal dalam Perjuangan kemerdekaan**	
3.1	Keadaan Umum Kabupaten Kendal	57
3.1.1	Lingkungan Geografis	57
3.1.2	Kehidupan Sosial Ekonomi	59
3.1.3	Kehidupan Sosial Budaya	61
3.1.4	Kehidupan Sosial Politik	62
3.2	Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Masa Perjuangan kemerdekaan	64
3.2.1	Gerakan Daulat Rakyat	69
3.2.2	Daerah Kendal sebagai Markas Medan Barat	74
3.3	Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Pelaksanaan Persetujuan Renville	83
3.4	Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Perang Kemerdekaan II	86
Bab IV	**Peranan Masyarakat Desa di Salatiga dan Sekitarnya dalam Perjuangan kemerdekaan**	
4.1	Keadaan Umum Daerah Perjuangan	97
4.1.1	Lingkungan Geografis	97
4.1.2	Kehidupan Sosial Politik	99
4.1.2.1	Pemerintahan Sipil	99
4.1.2.2	Terbentuknya Organisasi Militer di daerah Salatiga	101
4.1.2.3	Pembentukan Partai Politik dan Badan Kelaskaran di Daerah Salatiga	103
4.1.3	Kehidupan Sosial Ekonomi	106
4.1.4	Kehidupan Sosial Budaya	112
4.2	Peranan Masyarakat Desa di Salatiga pada Awal Kemerdekaan	115
4.2.1	Rakyat Salatiga Menyambut Proklamasi	115
4.2.2	Peranan Ulama dan Tokoh Masyarakat	116
4.2.3	Ekses-ekses Revolusi di Salatiga	118

4.3 Peranan Masyarakat Desa di Salatiga dan pada Perang Kemerdekaan I 120
4.3.1 Belanda Menyerbu Salatiga dan Pengungsian Orang-orang Cina 120
4.3.2 Jatuhnya Salatiga hingga Terbentuknya Garis Demakrasi 123
4.3.3 Situasi di Daerah Pendudukan Belanda 126
4.3.4 Situasi di Daerah Republik 130
4.3.4.1 Pembentukan Pasukan Gerilya 130
4.3.4.2 Kegiatan Mata-mata 132
4.3.4.3 Peranan Pamong Desa 133
4.3.4.4 Dukungan Logistik 134
4.3.4.5 Jaringan Komunikasi 136
4.4 Situasi Salatiga pada Masa Perjanjian Renville 136
4.5 Peranan Masyarakat Salatiga Pada Perang Kemerdekaan II 139
4.5.1 Jalannya Pertempuran 139
4.5.2 Situasi di Daerah Penduduk Belanda 141
4.5.3 Situasi di Daerah Republik 143
4.5.3.1 Pembentukan Sistem Pemerintahan Militer 144
4.5.3.2 Perlawanan Gerilya 145
4.5.3.3 Peranan Ulama dan Tokoh Masyarakat 147
4.5.3.4 Dukungan Logistik 148
4.5.4 Akhir Pertemuan 149

Bab V Kesimpulan 161

Daftar Pustaka 165

Daftar Informan 171

Lampiran 173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1945--1949 merupakan kelanjutan dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia melibatkan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Revolusi sebagai proses politik timbul dalam situasi kritis pada waktu golongan-golongan masyarakat terlibat dalam konflik untuk mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal.[1] Meskipun revolusi Indonesia merupakan revolusi politik untuk menghapuskan penjajahan, namun dinamika perubahan yang menyertainya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Revolusi mengandung pengertian sebagai perubahan masyarakat yang berjalan relatif cepat. Perubahan itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibanding dengan masa sebelumnya.

Pembicaraan mengenai masalah revolusi mengingatkan kita pada situasi masyarakat yang penuh pergolakan dan kekerasan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada periode tahun 1945--1949 membuktikan hal itu. Persaingan untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan, pengkhianatan, pemerasan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai tindak kekejaman lainnya

sangat mewarnai revolusi. Wajah revolusi tidak seluruhnya menggambarkan kepahlawanan, pengorbanan, semangat cinta tanah air, dan keberanian mempertahankan kemerdekaan negara. Revolusi yang melibatkan peranan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, tidak saja menampilkan sifat heroik tetapi juga penuh dengan pertentangan. kecurigaan, pengkhianatan, main hakim sendiri, dan berbagai tindakan radikal lain untuk berebut kekuasaan di antara pihak-pihak yang bertentangan.[2] Seluruh proses itu membawa perubahan sosial ke arah suatu tatanan masyarakat baru, serta penolakan terhadap situasi dan Struktur masyarakat lama yang tidak mereka sukai.

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, karena adanya ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial. Ancaman ini menimbulkan kegelisahan yang sangat eksplosif sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata yang meluas. Krisis yang berlangsung lama mengakibatkan akhirnya organisasi-organisasi perjuangan. Organisasi-organisasi perjuangan ini ada yang berafiliasi di bawah suatu partai politik dan ada pula yang tidak, Misalnya Hisbullah berada di bawah paham politik Nahdatul Ulama, sedang Pesindo di bawah PKI. Sementara itu, Laskar Rakyat, Tentara Pelajar, Ikatan Pelajar Indonesia, dan berbagai badan perjuangan lain tidak berafiliasi di bawah partai politik apapun. Karena tekanan-tekanan emosional, rakyat siap menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok kesatuan bersenjata atau badan perjuangan itu. Situasi krisis berubah menjadi situasi konflik karena dieksplotasi oleh golongan-golongan yang bertentangan dalam proses perebutan kekuasaan.[3]

Pertempuran-pertempuran melawan tentara asing-berlangsung secara terus-menerus dari tahun 1945--1949. Ancaman akan kembalinya kekuasaan Belanda tampak dengan terjadinya perubahan-perubahan politik di Indonesia, segera setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran melawan Jepang berlangsung dengan hebat sepanjang bulan Oktober hingga September 1945 di beberapa daerah di Indonesia. Perlucutan senjata Jepang yang dilakukan pejuang-pejuang Indonesia menyebabkan terjadinya

pertempuran demi pertempuran. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 19 September 1945 pasukan Inagris mendarat di Jakarta. Pasukan Inggris ini mewakili pihak Sekutu untuk menerima penyerahan dari Jepang dan melucuti senjata Jepang. Di samping itu, juga membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat, serta menjaga perdamaian. Namun ternyata pasukan Inggris ini membawa tokoh-tokoh NICA yang hendak menegakkan kembali Hindia Belanda.[4] Dua minggu pertama dalam bulan Oktober terjadi pertempuran sengit antara bangsa Indonesia dengan tentara Jepang untuk menguasai Bandung, Garut, Surkarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

Tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaam, pada tanggal 14 Oktober 1945 timbul peperangan melawan jepang yang hendak menduduki kota Semarang. Pertempuran itu berlangsung hingga tanggal 19 Oktober 1945, ketika mendarat tentara Sekutu yang segera disusul oleh tentera NICA. Pada tanggal 16 November 1945 pecah lagi pertempuran melawan tentara pendudukan Inggris, NICA. dan Jepang.[6] Pertempuran melawan sekutu dan NICA terus berlangsung hingga tahun 1949 tidak hanya di kota Semarang saja, tetapi di seluruh pelosok Jawa Tengah.

Periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945--1949 merupakan periode perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita agar dapat hidup secara layak sebagai bangsa yang merdeka. Dalam periode itu, rakyat berkorban habis-habisan dan mengalami penderitaan yang berat untuk mempertahankan kermerdekaan dan mencapai persatuan nasional.[7] Selama itu peranan masyarakat desa, terutama para pemuda dan elite desa mewarnai lembarain sejarah perjuangan bangsa. Masyarakat desa memegang peranan penting, karena desa merupakan basis perang gerilya. Hal ini disebabkan desa mempunyai sumber daya yang potensial bila ditinjau secara geografis, sosiologis, ekonomis, dan kultural.

Terdapat beberapa hal yang menarik untuk diamati selama berlangsungnya perjuangan kemerdekaan di daerah pedesaan. Peranan sosial masyarakat desa selama masa revolusi dalam berbagai hal dilakukan dengan penuh pengabdian. Dorongan-dorongan emosional

yang dimotivasi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan menyebabkan masyarakat pedesaan bersedia memberikan apa saja yang dimilikinya untuk kepentingan perjuangan. Setiap peristiwa yang dilakukan oleh pelaku sejarah bergerak dalam situasi tertentu. Seseorang atau sekelampok masyarakat melakukan suatu respon terhadap suatu situasi tertentu karena didorong oleh keadaan-keadaan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian perilaku seseorang atau masyarakat yang merupakan interpretasi atas suatu situasi dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, ekonomi, politik, cita-cita, resiko yang tidak dikehendaki, pengalaman, dan latar belakang kehidupan lainnya.[8]

Selama masa perjuangan kemerdekaan, muncul pemimpin-pemimpin perjuangan yang mampu memobilisasi kekuatan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Pemimpin-pemimpin ini ada yang berasal dari daerah setempat atau pemimpin lokal, namun ada juga yang berasal dari luar daerah. Pemimpin lokal misalnya elit desa baik yang formal maupun yang non formal seperti kepala desa dan para perangkat desa lainnya, serta ulama dan para kyai megang peranan penting. Mereka adalah sekelompok manusia yang menduduki jenjang kepemimpinan dalam piramida sosial atas dari suatu masyarakat, kelompok ini dipilih oleh masyarakatnya dan tampil ke depan sebagai elit desa. Kelompok elit non formal desa mendapat dukungan yang bersifat total dari masyarakat. Namun kelompok elit formal sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang melatar-belakanginya. Oleh karena itu, elit formal yang mengecewakan masyarakat dan dianggap melakukan pengkhianatan didaulat oleh rakyat.

Bertolak dari latar belakang peristiwa dan perkembangan tersebut, maka terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana kondisi masyarakat dan peranan berbagai kelompok masyarakat selama masa revolusi? Hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat, lapisan masyarakat, golongan-golongan masyarakat, menarik untuk diamati. Keterlibatan antara berbagai pihak dalam masyarakat itu. membentuk jaringan sosial yang besar peranannya, dalam perjuangan kemerdekaan. Akan ditelaah pula mengenai kepemimpinan masyarakat desa.

Kedua, bagaimanakah peranan masyarakat dalam badan-badan perjuangan di daerah pedesaan? Badan-badan perjuangan itu ada yang bersifat lokal dan ada pula yana tidak. Peranan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat dalam badan perjuangan, cara memobilisasi dan mengkordinasi anggota, hubungan dan koordinasi dengan badan perjuangan lain menarik untuk diamati.

Ketiga, bagaimana peranan masyarakat desa dalam bidang logistik? Bahan makanan, obat-obatan, peralatan persenjataan, dan barang-barang lain sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu perlu ditelaah bagaimanakah mekanisme untuk memperoleh bahan-bahan tersebut, serta sarana dan prasarana apakah yang digunakan? Bagaimanakah peranan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat dalam hal ini, menarik untuk dikaji secara mendalam.

Keempat, bagaimanakah situasi dan aktivitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan, maupun dalam kehidupan sosial lain penting untuk diketahui. Aktivitas kehidupan sosial, interaksi sosial antara. berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, aktivitas pendidikan dan ke agamaan perlu dipahami. Di samping itu juga aktivitas dan situasi ekonomi, masalah keuangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya akan dibahas pula. Demikian pula masalah-masalah politik dan pemerintahan yang melibatkan peranan masyarakat desa perliu diteliti.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan sejarah dikenal dua batasan, yaitu batasan temporal atau waktu dan batasan spasial atau ruang geografis. Keduanya harus ada dalam setiap penulisan sejarah, agar dapat memperjelas pembahasan dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. Pembahasan penelitian ini menekankan analisis tentang peranan masyarakat desa di Jawa Tengah dalam perjuangan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Dengan demikian lingkup temporal penelitian ini meliputi sepanjang masa revolusi, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949. Adapun lingkup spasialnya adalah masyarakat desa Jawa Tengah.

Karena peristiwa itu merupakan rangkaian historis, maka kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya suatu peristiwa perlu dianalisis. Oleh karena itu, meskipun analisisnya lebih menekankan pada peristiwa dan permasalahan yang terjadi pada tahun 1945--1949. namun peristiwa-peristiwa dan perkembangan sejarah yang terjadi sebelumnya juga akan dibahas.

Perlu ditekankan, bahwa pembahasan mengenai peranan masyarakat desa di Jawa Tengah dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak mungkin menampilkam desa-desa di seluruh Jawa Tengah. Luasnya wilayah Jawa Tengah yang meliputi ratusan desa pada masa revolusi tidak memungkinkan hal itu dikerjakan. Kecuali itu, keterbatasan sumber-sumber sejarah tertulis sebagai sumber primer yang memberikan informasi historis mengenai peranan masyarakat desa dalam perjuangan kemerdekaan mempersulit upaya penulisan sejarah.

Atas dasar keadaan tersebut, maka penelitian ini memilih dua kabupaten yang terdekat dengan Semarang, ibu kota Propinsi Jawa Tengah. Pertama adalah Kabupaten Kendal yang berada di sebelah barat kota Semarang. Kedua, Kabupaten Salatiga. yang terletak di tenggara kota Semarang.

Pemilihan dua kabupaten sebagai gambaran mengenai peranan masyarakat desa Jawa Tengah dalam perjuangan kemerdekaan tahun 1945--1949 atas dasar beberapa pertimbangan.

Pertama, kedua kabupaten itu memiliki ciri-ciri geografis yang berlainan. Kabupaten Kendal terletak di tepi pantai Laut Jawa. Sesuai dengan keadaan wilayahnya, Kabupaten Kendal terbagi dalam dua wilayah geografis yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian utara terdapat dataran rendah yang merupakan daerah persawahan yang cukup subur, karena sudah ada irigasi sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda. Di daerah ini terdapat pantai yang tanahnya terdiri dari pasir dan kerikil. Karena lautnya sedikit dalam dan gelombangnya tenang maka daerah ini dapat digunakan untuk pendaratan pasukan. Adapun di bagian selatan adalah dataran tinggi yang dekat dengan lereng G. Ungaran. Sementara itu, Salatiga merupakan daerah dataran tinggi di dekat lereng G. Merbabu. Daerahnya relatif subur, karena

irigasi di sini juga sudah ada sejak jaman Belanda. Di daerah ini terdapat banyak perkebunan seperti coklat, kopi, tembakau, dan tebu. Kedua daerah ini sama-sama memiliki patensi geografis yang subur. sehingga secara ekonomis sangat potensial dalam mendukung kebutuhan logistik selama berkecamuknya. perlawanan terhadap Belanda. Namun di Salatiga terdapat daerah yang kurang subur, sehingga memberikan gambaran yang berlainan dengan daerah lainnya. Kondisi geografis yang berbukit-bukit menjadikan daerah Salatiga cukup strategis sebagai basis perang gerilya.

Kedua, Kabupaten Kendal dan Salatiga memiliki kondisi sosiologis dan demografis yang berbeda. Kabupaten Kendal merupakan daerah Islam yang cukup kuat. sehingga banyak terdapat pondok pasantren. Di sini kyai memegang peran penting. Sementara itu, meskipun masyarakat daerah Salatiga beragama Islam cukup kuat namun pondok pesantren tidak sebanyak di Kendal. Ciri keislaman lebih menonjol di Kendal. Di kedua Kabupaten itu, Hisbullah peranannya cukup dominan. Kota Salatiga mempunyai ciri yang, lebih bervariasi dari pada kota Kendal. Salatiga dikenal sebagai kota yang dihuni oleh para pensiunan. Di sini banyak penduduk Belanda, para pegawai pemerintah, pegawai swasta, serta pemilik dan pegawai perkebunan. Beberapa perkebunan yang terdapat di Salatiga antara lain coklat, kopi, tembakau, dan tebu. Etnis Tionahoa juga banyak yang bermukim di kota ini. Karena penduduknya yang heterogen ini, maka perkembangan dan permasalahan yang terjadi di Salatiga. selama masa revolusi lebih problematic dari pada kota Kendal yang relatif bersifat homogen.

Ketiga secara politis Kendal dan Salatiga, memiliki perkembangan yang berbeda. Ketika Semarang diduduki oleh Belanda pusat Pemerintahan Keresidenan Semarang dengan segenap bagian-bagiannya ditempatkan di Salatiga. Pesindo memegang peranan penting di Salatiga, sehingga mempengaruhi situasi pemerintahan. Sementara itu, di Kendal pamong praja tidak segera menangkap makna revolusi sehingga anggotanya diganti oleh rakyat. Keadaan ini memberikan gambaran perkembangan politik yang berlainan.

Keempat, pada masa pendudukan Belanda kedua daerah ini memiliki status yang berlainan. Sebelum Perang Kemerdekaan II tahun

1948, Kabupaten Kendal merupakan daerah dalam pengawasan Belanda atau sebagai daerah pendudukan Belanda. Adapun Salatiga berada di dalam, wilayah Republik Indonesia. Status dan pengaruh yang berlainan ini memberikan corak perkembangan historis yang berbeda pula.

1.3 Batasan Pengertian

Penelitian mengenai peranan masyarakat desa dalam perjuangan kemerdekaan lebih dapat dipahami dengan jelas apabila nenggunakan konsep-konsep sosilogis. Penggunaan konsep-konsep sosiologis diharapkam dapat membantu menjelaskan fenomena historis yang bersifat konpleks secara lebih memuaskan. Di bawah ini akan dijelaskan batasan pengertian tentang beberapa konsep yang dipakai sebagai kerangka pemikiran dalan penelitian ini.

Peranan sosial dimainkan oleh orang-orang yang menduduki suatu status dalam masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang harus bertindak sebagi bagian integral dari kehidupan sosial. Partisipasi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat sangat menpengaruhi perkembangan suatu masyarakat. Peranan sosial sebenarnya merupakan unsur terkecil dari suatu organisasi sosial. Di dalam memainkan peran, seseorang terlibat dalam orde sosial tetapi mereka belum tentu merupakan unsur dari organisasi. Seseorang sering menjadi anggota dalam beberapa organisasi sosial, tetapi tidak bisa menjadi unsur struktural dalam semua organisasi. Untuk memainkan peranan, seseorang memerupakan keterlibatan dalam kehidupan sosial.[9]

Peranan sosial biasanya terkait dengan status sosial seseorang dalam masyarakat. Di setiap status sosial terdapat kumpulan peran-peran yang saling berhubungan. Adakalanya seseorang memegang lebih dari satu peran. Misalnya dalam kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan, seseorang mungkin memegang peranan sebagai kepala rumah tangga, sekaligus juga sebagai pemimpin formal tokoh partai politik, dan anggota suatu badan perjuangan.

Sementara itu masyarakat desa mengandung pengertian sebagai kehidupan kelompok-kelompok sosial yang bertempat tinggal di

daerah pedesaan. Adapun desa adalah suatu ketuan hukum ynag dihuni oleh suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, atau dari kesatuan-kesatuan tempat tinggal seperti, Desa terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, atau dari kesatuan-kesatuan tempat tinggal seperti pedukuhan, kampung, beserta tanah pertanian, tanah perikanan pedukuhan, kampung, beserta tanah pertanian, tanah perikanan, dan sebagainya.[10]

Asal mula terbentuknya desa ada dua macam, yaitu :

1). Cara berkumpulnya masyarakat yang dibentuk atas dasar tempat tinggal bersama. Pada umumnya desa seperti ini terdapat di P. Jawa.

2). Cara berkumpulnya masyarakat yang dibentuk atas dasar keturunan.[11] Kondisi pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa sebenarnya mempunyai persamaan. Perbedaannya terletak pada sistem kekerabatan. Terbentuknya desa di Jawa bukan sekedar hanya berdasar keturunan, tetapi juga berdasarkan persamaan kepentingan.

Sementara itu, perjuangan kemerdekaan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena sesudah proklamasi kemerdekaan terdapat serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Belanda untuk dapat menguasai Indonesia kembali, maka bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk menghancurkan keinginan tersebut. Perjuangan ini akhirnya berhasil, setelah Belanda melakukan penyerahan kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan meliputi serangkaian peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan musuh untuk mempertahankan kemerdekaan negara yang meliputi periode waktu dari tahun 1945--1949.

1.4 Tujuan Penelitian

Peranan masyarakat desa di Jawa Tengah dalam perjuangan kemerdekaan tahun 1945--1949 merupakan peristiwa yang terjadi di tingkat lokal. Peristiwa itu cukup menarik dan penting untuk dikaji. Pertama, penelitian mengenai perjuang masyarakat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan negara dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pemahaman terhadep peristiwa sejarah yang dipelajari masyarakat dapat neneladani peranan dan pengorbanan masyarakat desa dalam mempertahanan kemerdekaan negara. Di semping itu juga dapat membangkitkan kebanggan nasional terhadap dedikasi, kepahlawanan, semangat, dalam jiwa besar bangsanya. Penelitian ini diharapkan juga dapat pelestarikan juga serta semangat nasionalisme dan patriotisme.

Kedua, dengan mengungkap peristiwa lokal pada masa lampau dapat dipergunakan untuk memperluas pespektif historis dari perkembangan sejarah mikro itu sendiri. Di samping itu dapat juga dipergunakan untuk mempertajam analisis dalam memahami hubungannya dengan peristiwa yang lebih besar atau pada tingkat yang lebih luas. Pengungkapan secara khusus dalam bentuk mikro akan lebih mampu menunjukkan motif-motif yang tersembunyi. Dengan demikian, peranan masyarakat desa di Jawa Tengah dalam perjuangan kemerdekaan mempunyai arti penting untuk memperkaya pangetahuan sejarah Indonesia.

Ketiga, dengan menelaah tindakan-tindakan besar dari rakyat kecil yang hidup di pedesaen, maka dapat dipahami adanya arus dasar yang berkecamuk dalam sejarah. Pergolakan, kekerasan, krisis, dan revolusi sosial yang timbul merupakan indicator dari perubahan sosial yang sedang terjadi melalui studi mengenai peranan masyarakat desa dapat dipahami adanya usaha untuk melanjutkan penjajahan dari kolonialisme Belanda yang berhadapan dengan perlawanan rakyat.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mengungkap berbagai aspek mengenai peranan masyarakat desa di Jawa Tengah pada masa perjuangan kemerdekaan, penelitian

ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis akan lebih mampu mengungkap korelasi, kecenderungan, serta pola perkembangan suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan historis penting karena dapat dipergunakan untuk menjelaskan eksplanasi historis dari segi-segi prosesual dari peristiwa sejarah.

Untuk melakukan penelitian ini, dipergunakan metode kepustakaan dan metode penelitian sejarah lisan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber tertulis sebagai sumber primer. Dalam studi sejarah, penggunaan sumber primer yang memuat informasi mengenai peristiwa masa lampau bersifat mutlak. Sumber dokumenter yang dipergunakan sebagai bahan sumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis.[12] Pertama, sumber primer yang berupa arsip terdiri dari laporan-laporan resmi dan surat keputusan pemerintah. Kedua, bahan dokumenter sejaman yang berupa surat kabar yang tidak hanya memuat fakta, tetapi juga pendapat dan pikiran-pikiran spekulalif yang berkaitan erat dengan peristiwa yang diteliti. Ketiga, adalah sumber-sumber sekunder berupa hasil penelitian atau karya ilmiah para sarjana dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. sumber pustaka ini sangat penting artinya bagi penulisan penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan matode sejarah lisan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah lisan sebagai pelengkap dari bahan dekumenter. Metode penelitian sejarah lisan sangat dipergunakan untuk mengumpulkan kesaksian mata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berupa data lisan. banyak sekali peristiwa sejarah yang tidak terungkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa penting nenurut kepentingan pembuatan dokumen dan jamannya, sehingga tidak melestarikan kejadian-kejadian individual atau yang menyangkut suatu golongan.[13] Karena informasi mengenai peranan masyarakat desa tidak termuat di dalam sumber dokumen tetapi tersimpan di dalam ingatan para pelakunya, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah lisan.

Catatan

1. Sartono Kartodirdjo, 1982, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif.* Jakarta PT Gramedia, h. 80.
2. Guy Rocher, 1972, *A General Introduction to Sociology, A Theorithical Perspective,* Toronto : Macmillan Company of Canada, h. 528, 539.
3. Sartono Kartodirdio, *op. cit.*. h. 18
4. Sartono Kartodirdjo (ed.), 1977, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.* Jakarta : Balai Pustaka. h. 31--31
5. Georae Mc. Turnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* terjemahan, Kuaa Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, h. 176.
6. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa. Tengah, 1952. *Propinsi Jawa Tengah*, h. 22.
7. A.H. Nasution, 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Bandung : Penerbit Angkasa, h. 20.
8. Robert F. Berkhofer, Jr, 1971, *A Behavioral Aoproach to Historical Analysis.* London Collier-.Macmillan Limited, h.7--35.
9. Marvin E. Olsen, 1968, *The Process of Social Organization* h. New Delhi : Oxford & IBH Publising Co, h. 104--105.

10. Soetardjo Kertahadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta : PN Balai Pustaka. h. 16.

11. *Ibid.*. h. 21

12. Sartono Kartodirdjo, 1982, *op. cit.*, h. 101.

13. Kuntowiioyo

Bab II

JAWA TENGAH PADA MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN

2.1 Keadaan Umum Daerah Jawa Tengah

2.1.1 Lingkungan geografis

Propinsi Jawa Tengah terletak pada 108° BT -- 111° dan 6°,20 LS -- 8°,15 LS. Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah terletak pada 110°,25 BT dan 6°,55 LS. Luas Jawa Tengah 34.206 KM^2 dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan Samodera Indonesia, dan sebelah barat Propinsi Jawa Barat. Pantai Laut Jawa pada umumnya rendah mulai perbatasan barat sampai timur. Hanya beberapa tempat di, Kabupaten Jepara/Pati dan di bagian timur laut Kabupaten Rembang pantainya sedikit curam pantai rendah merupakan daerah pasir.

Daerah di sekitar muara Kali Pemali, Kali Tuntang, Kali Serang, dan Kali Juana berawa dan berlumpur. Daerah tambak terdapat di pantai-pantai Kendal, Jepara, dan Rembang. Dalamnya laut sampai batas teritorial 12 mil tidak lebih dari 50 M. Keadaan lautnya tenang dengan gelombang besar pada musim barat, tetapi hanya sedikit. Di banyak tempat pantai Laut Jawa dapat digunakan untuk pendaratan pasukan, terutama yang lautnya sedikit dalam dan tenang, serta pantainya merupakan daerah pasir dan rendah. Daerah ini antara lain

pantai-pantai Tegal, Pekalongan, Kendal, Jepara, dan Rembang, tepatnya di kecamatan Kragan dan Sarang. Kedua tempat itu digunakan oleh Jepang untuk menghancurkan Tentara Kolonial Belanda yang mempertahankan P. Jawa. Namun pada Perang Kemerdekaan II tahun 1949 Angkatan Perang Belanda gagal untuk menjadakan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pantai Laut Samodera Indonesia pada umumnya curam. Lautnya lebih dalam dan gelombangnya lebih besar dari pada Laut Jawa. Khusus di daerah pantai Cilacap, terdapat tempat yang dipergunakan untuk latihan-latihan pendaratan pantai.

Belakang pantai Laut Jawa merupakan dataran rendah yang amat subur untuk pertanian. Dataran yang terletak antara daerah Batang dan Kendal terpotong oleh hutan. Dataran tinggi terdapat di daerah Magelang, Parakan, Temanggung, dan Wonosobo. Disekitar daerah laut terdapat G. Sumbing, G. Sindoro, G. Perahu. G. Merapi, G. Merbabu, dan G. Ungaran. Tanahnya terdiri dari tanah vulkanis yang subur untuk pertanian. Dari barat ke timur melalui perbatasan antara bekas Karesidenan Pekalongan den Karesidenan Semarang, serta bekas Karesidenan Banyumas den Karesidenan Kedu membujur pegunungan Pembarisan, Pegunungan Slamet dengan puncaknya G. Slamet, Pegunungan Rogojembangan, dan berakhir di Dataran Tinggi Dieng. Di sebelah selatan Dataran Tinggi Dieng terdapat Pegunungan Serayu yang membujur dari utara ke selatan. Dari G. Merbabu ke timur membujur pegunungan kapur sampai Ngawi dan membelok ke utara sampai selatan Lasem. Di daerah itu terdapat hutan jati. Di bagian utara Purwodadi, terdapat pegunungan kapur sampai batas Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur. Di daerah itu juga terdapat hutan jati. Di bagian utara Kabupaten Kudus dan Pati terdapat G. Muria, yang lereng-lerengnya berhutan jati. Di situ terdapat perkebunan karet den kapok. Dari G. Sumbing ke arah selatan terdapat Pegunungan Menoreh. Pegunungan Sewu dengan ketinggian antara 500-1000 M terdapat di selatan Kabupaten Wonogiri. Daerah ini merupakan tanah kapur yang tandus den terdapat gua-gua. Dari segi teknis daerah-daerah hutan jati dan sekitar lereng G. Lawu, G. Muria, G. Merbabu, G. Merapi, G. Rogojembangan, G. Slamet, merupakan basis gerilya yang baik, karena di sekitar daerah-daerah itu banyak daerah yang subur untuk pertanian.[2]

Di daerah Jawa Tengah terdapat dua musim, yaitu musim penghujan yang jatuh pada bulan November-Maret, serta musim kemarau yang jatuh pada bulan April-Oktober. Dari musim kemarau ke musim hujan disebut *labuhan* yang jatuh pada bulan September-November. Dari musim penghujan ke musim kemarau disebut *mareng* yang jatuh pada bulan Pebruari-Maret.

Keadaan medan dapat dibagi meniadi medan terbuka, medan berombak, dari medan tertutup. Medan terbuka terdapat di dataran rendah bagian utara Jawa Tengah yang membentang mulai perbatasan bagian barat sampai perbatasan bagian timur di belakang pantai sejauh 20--30 KM yang hanya terpotong oleh sungai-sungai, perkampungan, dan hutan Roban. Medan terbuka juga terdapat di pantai selatan yang rendah. Medan berombak terdapat di daerah-daerah pegunungan yang kebanyakan tidak berhutan, serta antara daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Medan tertutup terdapat di daerah-daerah yang berhutan, baik di pegunungan maupun dataran rendah dan dataran tinggi, antara lain di daerah yang merupakan tanah kapur.[3]

2.1.2 Kehidupan Sosial Politik

2.1.2.1 Struktur Pemerintahan

Propinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Pembagian wilayah administrasi Jawa Tengah pada tahun 1937 meliputi Karesidenan Pekalongan, Banyumas, Kedu, Semarang, dan Jepara-Rembang. Karesidenan Pekalongan terdiri dari Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Adapun Karesidenan Banyumas meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbolinggo, dan Banjarnegara. Karesidenan Kedu terdiri dari Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purwarejo dan Magelang. Adapun Karesidenan Semarang dibagi atas Kabupaten Kendal, Salatiga, Demak, dan Grobogan. Karesidenan Jepara-Rembang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.[4]

Sementara itu, Surakarta menduduki suatu wilayah di Jawa Tengah yang disebut *Vorstenlanden* yang secara harafiah berarti

tanah raja-raja, tetapi lebih pantes diterjemahkan Daerah Kerajaan Jawa.[5] *Vorstenlanden* merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua karesidenan. Dua karesidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kasunanan Surakarta milik Susuhunan Pakubuwana dan Mangkunegaran milik Pangeran Mangkunegaro. Karesidenan Surakarta ini terdiri dari Kabupaten Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Pada penjajahan Jepang (1942-1945) pembagian wilayah administrasi itu tidak mengalami perubahan.[6] Dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, penguasa militer berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu (1). mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum (2). memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada; dan (3). meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjadikannya pusat persediaan makanan bagi wilayah selatan. Dengan demikian organisasi pemerintahan sedapat mungkin mengikuti sistem lama, dengan mengadakan beberapa perubahan.

Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang meningkat dengan dikeluarkannya Undang- Undang No 27 dan No 28 yang menunjukkan berakhirnya pemerintahan sementara. Kedua undang-undang itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di P.Jawa. Mereka mulai dipekerjakan pada badan-badan pemerintah guna melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan P. Jawa sebagai sumber kekayaan perangnya di Asia Tenggara. Untuk itu seluruh P. Jawa dan Madura, kecuali kedua *koci* Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas *syu, syi, gun. son,* dan *ku.*[7] Tiga propinsi di Jawa dihapus dan pulau ini dibagi dalam 17 karesidenan *(syu)* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *syucokan* yang setingkat dengan residen. Tugas memulihkan ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan yang sementara kosong diserahkan kepada pemerintahan militer yang disebut *Gunseibu.* Penerintahan militer ini meliputi Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, Jawa Tengah di

Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya. Di samping itu dibentuk dua daerah istimewa (*koci*) Surakarta dan Yogyakarta. Di sini pemerintahan tetap dipegang oleh pemerintah tradisional yang masing-masing didampingi oleh seorang gubernur. Jabatan kepala bagian pada tingkat pusat, residen. dan gubernur diduduki oleh orang Jepang. Jabatan-jabatan bupati dan di bawahnya dipegang oleh pribumi. *Gunseikan* selaku kepala badan pemerintahan pusat mengawasi kebijaksanaan para residen, sedangkan residen membawahi pemerintahan setempat yang dijalankan oleh para bupati, walikota, dan kepala kepolisian setempat.[8]

Di Jawa Tengah jabatan seorang gubernur dipegang orang Jepang yang bernama Letnan Kolonel Taga. Di dalam tugasnya, ia didampingi oleh pegawai tinggi bangsa Indonesia, seperti R. Mohamad Cholil yang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah dan Salaman sebagai residen.[9] Kantor gubernur/*Fjokan* bertempat di Semarang. Adapun kantor residen/*Sjucokan* terdapat di Pati, Semarang, Pekalongan, Cilacap, Magelang, dan Surakarta.[10]

Pada awal proklamasi kemerdekaan, dilakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia dengan meneruskan pembagian wilayah pemerintahan yang lama. Wilayah Jawa Tengah meliputi Karesidenan Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Banyumas, Kedu, Surakarta, dan Yogyakarta.[11] Daerah Surakarta dan Yogyakarta memiliki kisah yang berbeda, sehingga membedakan status masing-masing pada masa-masa sesudahnya. Meskipun keduanya berada di Jawa Tengah, namun Yogyakarta berhasil mempertahankan otonominya dan menjadi daerah istimewa setingkat dengan propinsi. Sementara itu, Surakarta dinyatakan menjadi daerah Republik Indonesia yang berbentuk karesidenan.

Kisah perkembangan Surakarta sangat berlainan dengan Yogyakarta. Pada awal Juni di Solo terjadi pergolakan. Di sini penguasa tradisional, Sunan Pakubuwanan XII dan Sri Mangkunegoro VII tidak bersimpati dengan revolusi dan tidak mengambil tindakan yang progresif. Rakyat menuntut dilengkapkannya pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran. Kedua Penguasa tradisional itu kehilangan kesetiaan dari rakyatnya. Pada awal revolusi, meskipun bertentangan dengan kehendak semula dari pemerintah pusat yang

mau membentuk sebuah daerah istimewa, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran dilucuti dari otonomi pemerintahannya dan sesudah kemerdekaan tercapai diserap dalam propinsi Jawa Tengah.[12]

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan-sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang itu menghasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi Indonesia merdeka. Keputusan itu adalah : (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, (2) memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta, (3) presiden untuk sementara akan dibantu oleh Komite Nasional.[13] Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI bersidang lagi dan mencapai persetujuan mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan propinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap gubernur harus dibantu oleh Komite Nasional setempat.[14] Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 Presiden Sukarno mengumumkan keputusan PPKI yang kini bernama Komite Nasional Indonesia (KNI), serta berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Ketiga badan baru itu didirikan sampai tingkat lokal. Apabila KNI merupakan satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, maka BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah.[15]

Segara setelah di Jakarta dibentuk KNI, maka di tiap karesidenan, kabupaten, kawedanan, dan kecamatan juga dibentuk KNI sebagai pusat pemerintahan. KNI bertugas menyelenggarakan pemindahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang ke tangan Republik Indonesia. KNI menghimpun berbagai kekuatan kelompok sosial untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja diproklamasikan.

Dengan cepat Pula KNI-KNI daerah berusaha agar pamong praja beserta aparat pemerintah lainnya. melepaskan diri dari ikatan dengan Jepang dan mengambil alih kekuasaan di bawah Republik Indonesia. Dengan adanya KNI maka pergolakan rakyat dalam melaksanakan kemerdekaan dipimpin oleh KNI, di sampan pimpinan-pimpinan

yang diberikan oleh badan-badan perjuangan. Sesudah pemerintahan di daerah di bawah kekuasaan republik, kemudian KNI merupakan badan pembantu dan penasehat pemerintrh daerah. Peranan KNI ini sangat diperlukan, karena hubungan vertikal dengan pemerintahan di atasnya dan pemerintah-pusat belum lancar. KNI juga diperlukan untuk menyalurkan gelora rakyat yang pada umumnya membenci pamong praja sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada jaman penjejahan Belanda dan Jepang.

Di Jawa Tengah, susunan kepemimpinan KNI adalah sebagai berikut : KNI Semarang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, Purwokerto diketuai Mr. Iskak Tjokroadisurjo. Sementara itu KNI Surakarta memilih Mr. Soemodiningrat sebagai ketua, sedang KNI Magelang diketuai oleh dr. Mardjaban. Adapun KNI Pekalongan/Tegal diketuai oleh Tjitrosatmoko.[16]

Pembentukan KNI di Jawa Tengah, tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Misalnya di Banyumas pembentukan KNI diperluas sampai kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Di Banyumas perjuangan bersenjata diawali dengen pembentukan KNI pada tanagal 28 Agustus 1945 Sementara itu di Magelang dibentuk sesudah pertempuran melawan Jepang yang berhasil diselesaikan pada tanggal 13 Oktober 1945. Dengan dibentuknya KNI, maka mulai disusun pemerintahan baru di alam kemerdekaan.[17] Berbeda dengan daerah-daerah lainnya., di Surakarta KNI baru dibentuk pada tanggal 1 November 1945. Hal ini karena di Surakarta terdapat dua kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkuneraran, yang tampaknya kurang bersimpati dengan revolusi dan tidak segera mengambil tindakan yang progesif.[18]

Sementa itu, peranan KNI di Kabupaten Pekalongan mencerminkan kenyataan-kenyatan yang terjadi di daerah it dari pada di tingkat nasional atau propinsi. Sikap pasif pangreh praja terhadap proklamasi berakibat timbulnya kekosongan kekuasaan. Para tokoh tua perjuangan memandang bahwa KNI sebagai pengganti aparat pemerintah kolonial yang lemah dan tidak mampu bertindak secara bijaksana. Hal in berbahaya bagi kelangsungan kehidupan republik. KNI-KNI adalah basis kekuasaan baru sebagai sarana bagi para

pemimpin tua untuk dapa berunding dengan Jepang demi mendapatkan senjata, dan mengatur kegiatan pemuda.[19]

Setelah suasana agak teratur dan hubungan dengan pemrintah pusat dan daerah agak lancar, maka status KNI di daerah-daerah berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat. KNI di kawedanan dan kecamatan dibubarkan, sedang KNI di kabupaten dan keresidenan berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Di antara anggota-anggota DPR di karesidenan dan kebupaten itu, dipilih lima orang anggota yang menjadi badan eksekutif. Tugas badan eksekutif ini mendampingi residen dan bupati dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pada waktu itu yang menjadi ketua DPR adalah residen atau bupati.Mereka juga merangkap sebagai ketua badan eksekutif.

2.1.2.2 Badan Perjuangan dan Organisasi Pemuda

Tidak lama setelah pengumuman Presiden Sukarno pada tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan BKR, maka di berbagai daerah segera didirikan BKR. Para pemuda mendirikan BKR di daerah mereka masing-masing sebagai upaya menampung kekuatan masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat. Seperti diketahui bahwa beberapa tahun sebelum proklamasi para pemuda telah digembleng di dalam PETA, Heiho, dan Barisan Pelopor. Pemuda-pemuda inilah yang dengan penuh semangat dan keberanian mengadakan perlawanan terhadap tentara asing dengan hasil rampasan dari Jepang. Kelompok-kelompok pemuda ini kemudian dihimpun di dalam BKR. Dengan dipelopori oleh para pemuda bekas anggota PETA, di tiap keresidenan dibentuk BKR. BKR ini bukan tentara, melainkan korps kesatuan setempat untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan demikian keamanan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam waktu singkat, terbentuklah BKR Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut : (1). BKR Semarang dipimpin oleh Soetrisno, (2). BKR Salatiga di bawah pimpinan Moehari, (3). BKR Purwokerto dipimpin oleh Soedirman, (4). BKR Surakarta di bawah pimpinan beberapa orang, yaitu Soetarto, A. Fadjar, GBH Porbonegoro, Soenarto Koesoemodirdjo, dan GBH Djatikoesoemo, (5). BKR Pati

pada mulanya dipimpin Holan Iskandar, kemudian diganti dr. Goenawan, dan (6). BKR Kedu dipimpin oleh Soesman.[20]

Di sampig lembaga-lembaga tersebut, sesudah proklamasi kemrdekaan juga dibentuk Rukun Tetangga. Rukun Tetangga ini bukan merupakan bagian dari pemerintahan, tetapi merupakan gerakan rakyat di desa-desa dan kampung-kampung untuk memelihara sifat gotong-royong. Dalam masa perjuangan, Rukun Tetangga banyak jasanya dalam mengerahkan bantuan.

Selain BKR, di berbagai daerah juga dibentuk badan-badan perjuangan lain yang sebagian besar beranggotakan para pemuda. Di samping adanya BKR yang kemudian menjadi tentara resmi, di tiap-tiap tempat berdiri organisasi-organisasi pemuda yang bermaksud menghimpun kekuatan pemuda di luar ketentaraan. Segera sesudah proklamasi kemerdekaan di Semarang didirikan Angkatan Muda (AM) untuk menghimpun kekuatan rakyat guna kepentingan perjuangan. Berdirinya Angkatan Muda di Semarang segera diikuti oleh daerah-daerah lain. Sampai pelosok-pelosok desa Angkatan Muda dapat didirikan dan para pemuda mengambil peranan penting dalam perjuangan. Angkatan Muda ini kemudian pecah menjadi dua, yaitu aliran yang revolusioner dan yang moderat. Aliran revolusioner tetap bernama Angkatan Muda, sedang Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) beraliran moderat.

Pada masa perjuangan menanamkan kekuasaan RI dan perlucutan senjata Jepang, pergerakan pemuda belum ada persamaan dalam organisasi. Pada umumnya badan perjuangan para pemuda menggunakan nama Angkatan Muda. Ada Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), Angkatan Muda PTT (AMPTT), dan angkatan muda dari berbagai kantor yang lain. Sesudah di Semarang diselenggarakan konperensi AMRI pada bulan Oktober 1945, maka organisasi pemuda lebih teratur. Hampir di tiap tempat hingga pedesaan, dibentuk AMRI. Akan tetapi di samping AMRI, dibentuk pula organisasi-rganisasi pemuda yang lain seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Marhaen, Pemuda Republik Indonesia, Ikatan Pemuda Indonesia, Pemuda Kristen Protestan Indonesia, Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan sebagainya.[21]

Pada tanggal 9-10 November 1945 di Yogyakarta dilangsungkan konggres pemuda. Keputusan penting dari konggres itu ialah penggabungan organisasi pemuda yang berhaluan sosialistis ke dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Pada masa revolusi, kehidupan penduduk jauh dari ke tenteraman karena selalu diburu dengan rasa takut akibat peperangan. Keadaan ini terutama terjadi di daerah-daerah medan pertempuran atau di dekatnya. Adapun di daerah yang kurang strategis dan jauh dari medan pertempuran hampir tidak ada perubahan-perubahan selama masa peperangan. Berbagai aktivitas baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan tetap dapat dilakukan seperti dalam keadaan aman.

Jawa Tengah memiliki daerah pantai di sepanjang pantai utara Laut Jawa dan pantai selatan Samodera Indonesia. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai yang mempunyai arti ekanomi adalah kelapa. Di daerah pantai utara Jawa banyak ditemukan tambak yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian penduduk. Tambak-tambak ikan ini dapat ditemukan di Kendal, Jepara, Rembang, dan beberapa tempat lain. Di samping itu, penduduk di daerah pantai ini juga banyak yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Di beberapa daerah terdapat-tempat pembuatan garam seperti di Rembang dan Juwana.[25]

Selama perang kemerdekaan, di daerah yang cukup subur tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pangan, karena produksi beras yang melimpah. Daerah pertanian yang memiliki surplus hasil padi mempunyai arti penting, karena dapat memberikan suplai bahan pangan bagi daerah pertempuran. Selain disumbangkan untuk badan-badan perjuangan, hasil pertanian dan peternakan di daerah-daerah ini dijual secara gelap ke daerah-daerah pendudukan. Misalnya beberapa penduduk desa di Weleri menjual beras, sayur-sayuran, telur, ikan asin, ayam ke Semarang secara gelap. ketika Belanda melakukan blokade ekonomi di kota itu. Karena Jawa Tengah mengalami pertempuran yang sangat hebat, banyak bangunan-bangunan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hasil pertanian seperti Balai Pembibitan, bendungan-bendungan, dan sebagainya.

Di daerah sepanjang pantai utara Laut Jawa memiliki tanah yang subur untuk pertanian seperti di Karesidenan Pekalongan dan Kendal. Wilayah bukit di Pekalongan menghasilkan tanaman niaga seperti gula, kopi, kina, teh, karet, dan coklat. Daerah ini merupakan satu-satunya tempat bagi petani kecil yang menjadi hasil komoditi eksport. Perpaduan antara musim hujan yang teratur, tanah subur, dan jaringan irigasi sungai Comal dan Pemali yang dibangun oleh perkebunan-perkebunan tebu milik orang Eropa, menyebabkan irigasi daerah ini terutama yang membentang dari Batang sampai Losari menjadi yang terbaik dan tersubur di Jawa Tengah yang mampu berswasembada beras.

Di sepanjang pantai terdapat usaha-usaha tambak ikan, di samping ada juga yang berusaha di sektor pertanian. Daerah ini secara ekonomis cukup potential dalam mendukung kebutuhan ekonomi selama masa perang. Keadaan lingkungan alam ini bukan saja memberikan kemungkinan-kemungkinan yang besar bagi kemajuan manusia, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.[26]

Dataran tinggi di Jawa Tengah memiliki tanah vulkanis yang cukup subur untuk pertanian, misalnya di Magelang, Salatiga, Temanggung, Wanasaba, dan daerah Banyumas. Bekas daerah *vorstenlanden* juga merupakan daerah yang subur. Terdapat beberapa daerah yang kurang subur untuk pertanian misalnya sebagian daerah Demak, Purwadadi, Rembang dan Blora. Di Blara dan Purwadadi tanahnya mengandung kapur dan banyak hutan jati. Daerah ini tidak subur untuk pertanian karena kadar kapurnya tinggi dan langkanya irigasi teknis pada masa revolusi menyebabkan penduduk sulit mendapatkan air baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan pertanian. Kebanyakan sawah merupakan sawah tadah hujan yang berfungsi sebagai tegalan yang ditanami jagung dan palawija. Dengan kondisi ekologis seperti ini sebagian besar penduduk desa hanya mempunyai pilihan sebagai petani gurem yang hidup dari pertanian tegal, penebang pohon di hutan-hutan jati milik pemerintah, dan buruh pabrik.[27]

Di Jawa Tengah banyak dijumpai industri atau kerajinan rumah tangga. Sektor ini merupakan mata pencaharian penduduk terutama

di daerah-daerah pusat industri. Di daerah Pekalongan dan Surakarta terdapat perusahaan-perusahaan batik. Di Kudus, Banyumas, dan Juwiring (Klaten), terdapat perusahaan payung. Di Kaliwungu, Kendal juga pernah terdapat perusahaan batik, payung, rokok kretek, dan payung. Ketika hasil industri batik mengalami kemunduran, banyak pengusaha batik dari daerah ini yang pindah ke Pekalongan. Hal ini juga terjadi pada perusahaan payung, dan pengusahanya banyak yang pindah ke Ambarawa. Adapun industri krupuk tetap berkembang, dan hasil dijual ke daerah-daerah sekitarnya selama perang kemerdekaan. Selama masa perang kemerdekaan, Kaliwungu memegang peranan penting sebagai garis depan di sektor barat kota Semarang.

Di Kudus terdapat perusahaan rokok kretek. Perusahaan rokok kretek milik bangsa Indonesia yang cukup besar adalah Pabrik Rokok Kretek Nitisemito yang pernah mengalami kejayaan pada tahun 1922--1940. Pada masa Jepang, kekayaan pabrik yang disita Jepang sehingga aktivitas pabrik terhenti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pengusaha Tionghoa untuk menguasai pasar Nitisemito. Pada awal revolusi perusahaan berjalan kembali, tetapi berhenti lagi selama masa Perang Kemerdekaan I karena pemiliknya aktif di Masyumi. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia II. aktif kembali, tetapi pasarannya telah dikuasai oleh pengusaha Tionghoa.[28]

Jawa Tengah memiliki pabrik pengilangan minyak, yaitu di Cepu dan Klanthung, Kendal. Perusahaan minyak di Klanthung tidak sebesar di Cepu, karena hanya terdiri dari 27 sumur dengan pengambilan secara sederhana yaitu ditimba. Sementara itu, Cepu memiliki ladang-ladang minyak dan pabrik yang merupakan sumber penghasilan bagi negara sejak akhir abad ke 19. Data tahun 1950 menunjukkan jumlah pegawai perminyakan di kota Cepu sebanyak 915 orang, sedang pegawai minyak di Kawengan, Wonosari, adalah 650 orang. Dapat diperkirakan jumlah pegawai dan buruh minyak di Cepu berkisar sekitar 8.000 orang pada awal revolusi. Selama masa revolusi para pegawai pabrik minyak ini membentuk Laskar Minyak yang jumlahnya mencapai 12.000 orang.[29] Ada kemungkinan jumlah sebesar ini termasuk para pemuda yang direkrut menjadi anggota Laskar Minyak.

Perang yang berlarut-larut telah menyebabkan kehidupan perekonomian rakyat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Situasi sulit ini masih ditambah lagi dengan diberlakukannya blokade laut yang menutup pintu bagi ke luar masuknya perdagangan RI oleh Angkatan Laut Belanda. Blokade ini dimaksudkan untuk melikwidari RI dengan senjata ekonomi. Sementara itu, keadaan bahan makanan dan tekstil sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh Belanda daerah-daerah surplus di Jawa Tengah , diduduki sehingga daerah RI hanya tinggal daerah-daerah yang relatif minus. Daerah-daerah minus ini harus ditambah bebannya karena harus menampung ribuan pengungsi dari daerah pendudukan.[30]

Untuk mengatasi tindakan blokade Belanda, rakyat Jawa Tengah banyak melakukan penyelundupan dan perdagangan gelap. Sementara itu, kekacauan situasi keuangan menyebabkan pemalsuan uang. Bahkan pemalsuan uang ditoleransi oleh Belanda, sehingga nilainya terus mengalami kemerosotan.[31] Masyarakat juga menghadapi kesulitan memperoleh uang kecil. Dari Surakarta dikabarkan, bahwa untuk menghadapi kesulitan memperoleh uang kecil, pemerintah kota Surakarta mengeluarkan bon dari 50 sen, satu rupiah, dua setengah rupiah, dan sepuluh rupiah. Semua bon yang syah dapat ditukar dengan ORI pada pemerintah kota Surakarta sampai Rp.5.00,-. untuk tiap orang.[32] Berkurangnya uang kecil ini berakibat rusaknya hubungan antar golongan masyarakat, sehingga sering terjadi perselisihan antara masyarakat pribumi dengan orang Tionahoa.

Sementara itu, badan-badan pemerintah dan tentara Belanda di daerah yang diduduki Belanda, sebagian besar dibiayai dengan uang NICA dan uang pinjaman dari Negeri Belanda. Karena daerah yang diduduki Belanda lebih luas, maka uang NICA lebih banyak laku. Di daerah pendudukan di Jawa Tengah uang NICA dinamakan "uang kulon" atau uang berlaku di daerah Jawa Tengah bagian barat, sedang ORI dinamakan "uang wetan" yaitu uang berlaku di daerah Jawa Tengah bagian timur.

Aktivitas perdagangan di berbagai daerah tetap berlangsung. Di Semarang, Demak, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal perdagangan semakin ramai setelah penandatanganan Perjanjian Renville. Toko-

toko Cina di Pekalonoan dan Tegal banyak yang tutup kecuali di Semarang. Pada umumnya. barang-barang yang dijual sama dengan barang-barang di daerah republik.[33] Perdagangan juga kelihatan agak ramai di daerah perbatasan. Jual beli di daerah perbatasan masih menggunakan uang ORI. Di Demak, ORI juga masih beredar dengan luas.

Bagi penduduk atau pedagang yang berdomisili di daerah pendudukan, untuk memperoleh barang kebutuhan yang berada di daerah republik, harus menukarnya dengan barang-barang perdagangan yang tersedia di daerah pendudukan dan dibutuhkan di daerah republik. Setelah barang itu dijual, mereka memperoleh ORI dan membelanjakannya dengan barang-barang yang dibutuhkan di daerah pendudukan. Hal ini juga berlaku bagi penduduk di daerah republik yang membutuhkan barang-barang di daerah pendudukan. Barang-barang yang dibutuhkan dibawa ke darah republik tempat mereka berdomisili.[34] Mereka tidak berani membawa uang NICA, karena takut diketahui oleh para pejuang republik dan dituduh sebagai mata-mata musuh atau golongan yang anti republik. Sebaliknya penduduk dan pedagang di daerah pendudukanpun juga tidak berani membawa uang ORI.

2.1.3 Kehidupan Sosial Budaya

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Jawa Tengah memiliki jiwa gotong-royong atau tolong-menolong. Dasar tolong-menolong ini dilakukan dalam kegiatan pertanian, mendirikan rumah, mempunyai hajat, menderita kesusahan, menjaga desa, serta membangun dan merawat sarana umum. Sifat gotong-royong ini sangat menonjol, terutama di daerah pedesaan. Bentuk gotang-royong di dalam masyarakat kota misalnya untuk kematian, perkawinana, upacara-upacara, kerja bakti, dan berbagai bentuk kehidupan sasial lainnya.

Masyarakat Jawa Tengah memiliki berbagai tradisi yang menggambarkan kuatnya sifat keagamaan. Masyarakat yang dipayungi oleh nilai-nilai keagamaan, akan memiliki kekhasan dalam menanggapi peristiwa. Tanggapan itu dapat didasarkan pada pemahaman ajaran agama yang dianut atau oleh ajaran tradisi.

Dalam kondisi seperti itu, kerapkali terjadi proses saling menyerap. Boleh jadi antara tradisi dan agama berjalan paralel, atau ajaran-ajaran agamalah yang dijadikan sumber suatu tradisi.[35] Dalam hal seperti ini tradisi-tradisi yang tercermin dalam berbagai upacara di Jawa Tengah bersumber dari ajaran Islam. Ajaran agama dan tradisi ini menjadi dasar dari penyelenggaraan berbagai upacara.

Menurut Cecil Helman, upacara-upacara yang berlaku dalam banyak masyarakat pada dasarnya dapat dibeda-bedakan ke dalam tiga kategori. Pertama, upacara yang berkaitan dengan penanggalan. Kedua, upacara yang berkaitan dengan transisi sosial, dan ketiga upacara yang kerkaitan denqan peristiwa yang tidak menguntungkan.[36] Upacara yang berkaitan dengan penanggalan tidak terlepas dari sistem keyakinan masyarakat yang bersangkutan dengan peristiwa-peristiwa penting sehubungan dengan keagamaan maupun kehidupan sosial. Yang pertama tampak pada motif memperingati hari-hari besar keagamaan, dan yang kedua didasari oleh kebutuhan memperingati peristiwa sosial, politik, atau kebanaraan seperti Upacara Peringatan Kemerdekaan RI.

Dilihat dari segi kepentingan penyelenggaraan upacara, maka terdapat dua jenis upacara yaitu upacara individu seperti dalam upacara daur hidup dan upacara komunal yaitu upacara yang melibatkan sebadian besar warga. Ritus daur hidup meliputi kelahiran, akil balig, perkawinan, kehamilan, dan kematian. Adapun ritus komunal dijalankan atas dasar siklus kalenderial yaitu peristiwa yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam.

Upacara untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Suran (1 Muharam), Muludan (Maulud Nabi), Nifsu Sa'bang Selikuran (tanggal 21 Ramadhan), Sawalan (Idul Fitri), dan lain-lain. Upacara Maulud Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW di Surakarta diselenggarakan dalam bentuk perayaan Sekaten. Kata Sekaten berasal dari kata Sekati atau Kyai Sekati yaitu nama gamelan kraton Surakarta yang dibunyikan setiap perayaan Sekaten. Namun sebenarnya, kata sekaten berasal dari bahasa Arab *syahadatain* yang berarti kedua kalimah sahadat. Perayaan sekaten sudah dilakukan di Jawa Tengah sejak jaman kerajaan Demak. Perayaan Sekaten masih dilakukan di Surakarta hingga saat ini.

Sama halnya pada masyarakat Jawa lainnya, berbagai upacara dalam masyarakat Jawa Tengah itu disebut selamatan. Selamatan yang berkaitan dengan ritus daur hidup dan ritus komunal di Jawa Tengah secara ekspresif banyak disifati oleh pandangan-pandangan keaaamaan. Doa-doa Islam, tahlilan, sholawatan, pada setiap upacara selalu menjadi warna dasarnya.[37]

Masyarakat Jawa Tengah mempunyai kebiasaan penghormatan terhadap arwah, yang mendorong munculnya tradisi penguburan, selamatan, ziarah, dan lain-lain. Upacara penguburan dilakukan secara khidmad dan dihadiri oleh segenap sanak keluarga, kerabat, dan handai-taulan. Dalam mengantarkan jenazah, di sepanjang jalan hingga tempat penguburan disebarkan bunga-bunga. Bagi keluarga yang mampu, selain bunga juga disebarkan uang. Orang yang memperoleh uang itu dilarang membelanjakannya, selain untuk membeli minyak. Maksudnya agar minyak itu dapat untuk menyalakan lampu, sehingga arwah yang meninggal mengalami jalan terang dalam perjalanan di alam baka. Upacara penguburan juga disertai dengan benda-benda tertentu seperti kendi berisi air, buah kelapa, dan payung yang ditaruh di atas kuburan.[38] Selama masa revolusi, di berbagai daerah upacara penguburan tetap berlangsung seperti biasanya. Sementara itu pada bulan Sya'ban arang mengadakan upacara Nyadran yaitu memuliakan arwah dengan selamatan dan ziarah kubur. Ziarah kubur dilakukan oleh sanak keluarga dengan membersihkan kubur dan mengirim doa untuk arwah nenek moyang.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Jawa Tengah sebagian besar berpendidikam rendah. Bahkan pada tahun 1950, sekitar 60% penduduk Jawa Tengah masih buta huruf.[39] Oleh karena itu, Pemberantasan Buta Huruf menjadi salah satu program utama Pemerintah RI dalam bidang sosial pendidikan. Pada tahun 1945, usaha pemberantasan buta huruf diperluas secara besar-besaran. Di tengah-tengah api peperangan yang berkobar di seluruh pelosok Jawa Tengah pada masa perjuangan bersenjata melawan Belanda, kader Pendidikan Masyarakat yang.menangani Pemberantasan Buta Huruf tetap bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Hampir di segala penjuru dan pelosok desa didirikan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Bahkan para pegawai, istri pegawai, kaum terpelajar

yang mengungsi ke pelosok-pelosok desa menjadi guru. Dengan demikian usaha pemberantasan buta huruf berkembang. Terjadilah hubungan simbiolik antara rakyat pedesaan yang buta huruf dengan orang kota. Orang kota mendermakan ilmunya, sedang penduduk desa mendermakan sebagian hasil pertanian dan rumahnya. Namun ketika pecah Agresi Belanda II pada tanagal 19 Desember 1948, pemberantasan buta huruf yang ditangani oleh Pendidikan Masyarakat kacau dan terpaksa berhenti. Program itu baru berjalan kembali setelah keadaan aman.

2.2 Peranan Masyarakat Jawa Tengah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Perjuangan masyarakat Jawa Tengah untuk mempertahankan kemerdekaan dimulai segera setelah disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak begitu lama segera tersebar di Jawa Tengah. Di beberapa daerah berita proklamasi didengar pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga. Namun ada pula daerah yang baru mendengar berita itu beberapa hari kemudian. Hal ini dapat dipahami, karena berita siaran proklamasi kemerdekaan di siang hari tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak dapat menjangkau banyak orang.

Ketika berita itu menyebar dari kota ke desa-desa, kedatangannya disambut dengan kegembiraan dalam berbagai bentuk. Bendera Merah Putihpun segera berkibar di berbagai tempat. Merah putih sangat mewarnai lingkungan kota dan desa. Bendera merah putih berukuran kecil menghiasi berbagai macam kendaraan. Para pemuda memasang warna merah putih di lengan baju. Kegembiraan menyambut proklamasi kemerdekaan juga dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang mengada kan pasar malam, wayangan dan selamatan. Banyak daerah di Jawa Tengah yang menyatakan rasa sukur atas kemerdekaan yang diperolehnya dengan melakukan sujud sukur. Sujud sukur dilakukan di pesantren-pewsantren, masjid-masjid, musala-musala, dan tempat-tempat lain. Namun tidak semua daerah di Jawa Tengah telah bertindak dengan begitu tegas dan pasti dalam menunaikan seruan proklamasi kemerdekaan. Di beberapa daerah rakyat masih

ragu- ragu untuk bertindak. Keadaan ini misalnya terjadi di Surakarta dan Karesidenan Pekalongan, yang mengakibatkan terjadinya revolusi sosial.

Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai daerah menghadapi beberapa musuh yang berusaha untuk menggoyang kemerdekaan RI. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini meliputi perjuanaan dalam menghadapi Jepang, Sekutu dan Belanda.

2.2.1 Menghadapi Jepang

Di berbagai daerah. proklamasi kemerdekaan diikuti dengan pemindahan kekuasaan Jepang ke tangan rakyat Indonesia. Semua alat pemerintahan, jawatan-jawatan, serta milik negara menjadi milik RI. Namun Jepang tidak begitu saja menyerahkan senjata dan kekuasaannya ke tangan RI. Oleh sebab itu, pada akhir September dan selama bulan Oktober di berbagai daerah terjadi pertempuran untuk merebut kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang.

Jalannya peristiwa di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kedudukan Jepang. Jendral Nakamura, panalima Jepang Jawa Tengah, agak bersimpati terhadap pergerakan nasionalis. Ia hanya mempunyai sedikit personalia dan kedudukan markasnya tidak di pelabuhan besar Semarang atau pusat kerajaan Surakarta, tetapi di sebuah kota kecil Magelang. Oleh karena itu, proses perlawanan terhadap Jepang bukan diawali di Semarang. Perebutan senjata Jepang di Jawa Tengah tergantung pada kondisi dan situasi daerah masing-masing. Misalnya saja di Banyumas, perebutan senjata Jepang sangat berhasil karena dapat memperoleh hasil sebanyak-banyaknya tanpa jatuh korban.[40] Demikian pula keadaan yang terjadi di Pati. Pengambilalihan kekuasaan baru berlangsung pada tanqgal 20 September 1945, setelah rakyat menyerbu tangsi Kenpetai. Hal ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa pertumpahan darah.[41]

Di Surakarta, proses pengambilalihan kekuasaan sipil telah melangkah semakin cepat pada-akhir bulan September. Kepamimpinan gerakan pengambilalihan kekuasaan ini dipegang oleh para pemuda dari Barisan Pelopor, Angkatan Muda, API. dan unsur-

unsur pemuda lainnya dari bekas anggota PETA. Sasaran gerakannya tidak hanya di stasion radio, pusat-pusat telekomunikasi, bank-bank, dan gedung-gedung pemerintah. Para pemuda juga menduduki perkebunan-perkebunan tebu di Klaten dan Sragen. Pada akhir bulan September pengambilalihan kekuasaan sipil selesai. Pada tanggal 1 Oktober diadakan parade keliling kota untuk merayakan kemerdekaan Surakarta.

Setelah itu perhatian pemuda dialihkan ke masalah militer dan persenjataan. Perundinqan antara para bekas anggota PETA dengan komandan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945 menghasilkan persetujuan, bahwa sebagian terbesar pasukan Jepang akan mundur ke kamp-kamp darurat di dekat Boyolali dan Tampir. Pada tanggal 6 Oktober 1945 proses penempatan kembali telah selesai. Hanya sejumlah kecil orang Jepang yang masih tinggal di kota, tetapi sebagian besar senjata mereka telah berada di tangan pemuda. Karena ancaman serangan massal dari para pemuda, polisi, dan BKR, maka penyerahan senjata Jepang berlangsung tanpa pertumpahan darah pada tanggal 13 Oktober 1945.[42]

Di Magelang, Jendral Nakamura mulai menyerahkan sejumlah besar senjata sejak tanggal 5 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober Kenpeitei dipaksa menyerahkan senjata dan meninggalkan kota. Setelah Jepang menyerahkan kota itu kepada pihak Indonesia, mereka kemudian bergerak pindah ke Ambarawa.[43]

Pada bulan September dan Oktober, nasib oranq-orang Jepang di Karesidenan Pekalongan tergantung pada KNI-KNI kota. Hal yang masih menahan kekuasaan pangreh praja di Karesidenan Pekalongan hanyalah kehadiran Jepang. baik yang sipil di pabrik-pabrik juga maupun yang militer seperti satuan-satuan kempetai di Tegal dan Pekalongan.

Konfrontasi pertama di Tegal terjadi ketika para aktivis perjuangan dengan berani berkeliling kota untuk menurunkan bendera Jepang di mana-mana dan menggantinya dengan Bendera Merah Putih.[44] Mereka akhirnya sampai di Balai Kota yang letaknya hampir berhadapan dengan asrama kempetai. Di tengah jalan dua truk yang membawa para pemuda itu dihentikan oleh kempetai dan

menyuruh para pemuda itu untuk turun dan menuju ke asrama kempetai. Para pemuda menolak dengan tegas, sehingga terjadi perdebatan sengit. Untuk mengatasi ketegangan ini. ketua KNI Ki Citrosatmoko mengadakan perundingan dengan kempetai. Namun sebelum berlangsung perundingan, 10 orang kempetai datang dengan bersenjata lengkap. Hal ini menyebabkan perundingan berlangsung dalam suasana tegang. Berkat diplomasi ketua KNI, maka situasi menjadi tenang.

Perasaan anti Jepang sangat membakar hati pemuda. Sangat membahayakan bagi orang Jepang untuk pergi ke luar kota. Bahkan ke luar rumahpun dapat dicegat dan dimasukkan ke dalam penjara oleh para pemuda. Pengambilalihan kekuasaan dan senjata terjadi hingga di pabrik-pabrik gula. Konfrontasi di Tegal mengakibatkan asrama kempetai dikepung selama satu minggu. Resideh Banyumas Mr. Iskaq datang membawa Komandan Kempetai Banyumas yang pangkatnya lebih tinggi, untuk membujuk Komandan Kempetai Tegal agar menyerah. Akhirnya perundingan secara damai tercapai, dan kempetai meninggalkan kota Tegal.

Di Pekalongan keadaannya berbeda. Serah terima senjata dari Jepang kepada pemuda telah menyebabkan beberapa senjata berada di tangan orang-orang sipil. Menjelang bulan Oktober semua tentara Jepanq, kecuali kempetai, telah menyetujui serah terima senjata yang disimpan di Societeit, bekas sedung pertemuan Belanda. Para aktivis menuntut agar kempetai juga menyerahkan senjata beratnya, yaitu senapan mesin. Kempetai tidak bersedia, bahkan mengadakan pameran kekuatan keliling kota. Peristiwa ini menjadi sumber ketegangan.

Pada tanggal 4 Oktober siang, rakyat berkumpul di depan markas kempetai menunggu perundingan antara Residen Besar dengan kempetai.[45] Setelah dua jam, Residen Besar ke luar untuk menjelaskan hasil persetujuan yang telah dicapai. Kempetai telah sepakat akan menghentikan aksi-aksi keliling kota dan menyerahkan sejumlah senjata kepada polisi kota, supaya jumlah senjata polisi sama dengan yang dimiliki kempetai. Senjata itu akan disimpan di Gedung Societeit, sedang kuncinya satu dipegang Residen Besar dan lainnya dibawa komandan kempetai. Para pemuda menolak dan menuntut penguasaan senjata itu secara penuh.

Ketika residen masuk ke kantor karesidenan untuk melanjutkan perundingan, sekelompok orang bergerak memanjat pagar pemisah antara asrama kempetai dengan kantor karesidenan. Seorang pemuda kereta api memanjat ke atas gedung kempetai dan menurunkan bendera Jepang. Beberapa saat kemudian datang bantuan dari para pemuda Semarang dengan membawa dinamit. Pengepungan dilakukan terhadap gedung kempetai oleh bekas Peta dan BKR, setelah Mr. Besar berhasil meloloskan diri.

Pada sore hari berikutnya, Pekalongan memakamkan 32 orang korban pertempuran, termasuk beberapa orang Jepang. Pada sore hari itu datanglah Residen Banyumas Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo dan Kapten Nonaka dari garnizun Banyumas untuk mengadakan perundingan dengan BKR. Perundingan itu berakhir pada tengah malam tanggal 6 Oktober 1945. Pihak Jepang menyetujui untuk meninggalkan wilayah Karesidenan Pekalongan secepatnya dan menyerahkan senjatanya kepada BKR. Pada hari tanggal 7 Oktober 1945, semua personil militer Jepang diangkut dengan truk ke Banyumas. Adapun orang-orang sipil diangkut pada hari-hari berikutnya.

Sementara itu, perebutan senjata Jepang di Semarang telah berlangsung menjadi pertempuran besar-besaran yang dikenal dengan nama Pertempuran Lima Hari. Sejak tanggal 14 September 1945, didorong oleh para pemuda terkemuka, kantor-kantor pemerintah mulai mengibarkan Dendera Merah Putih tanpa bendera Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, seluruh instalasi sipil di Semarang telah jatuh ke tangan pemuda.[46] Perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik yang terletak di daerah sekitarnya, dengan spontan disita oleh para buruh yang bekerja di sana. Pada tanggal 12 Oktober, Mr. Wongsonegoro diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah, menggantikan R.P. Soeroso yang kepemimpinannya kurang meyakinkan. Meskipun Wongsoneaoro telah memperoleh sejumlah besar senjata dan telah memastikan penyerahan Kenpeitei tanpa kesulitan namun ia masih menghadapi kesulitan dengan Kidobuttai. Pasukan inti ini menolak menyerahkan senjata dan tetap siaga di tangsi mereka di Jatingaleh.

Suasana di kota Semarang memburuk dengan cepat sejak tanggal 12 Oktober 1945. Insiden-insiden kecil berupa perkelahian antara pemuda dengan tentara Jepang semakin sering terjadi. Kecurigaan para pemuda semakin memuncak terhadap Jepang, karena pimpinan Kidobutai di Jatingaleh tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pihak RI.

Pada hari Minggu pagi tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda dari Perguruan Perekonomian Taman Siswa Semarang telah berhasil menduduki sebuah gedung bekas tempat kediaman sejumlah opsir Jepang di Candi Baru.[47] Sementara itu, para pemuda Semarang lainnya mengadakan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan, terutama orang-orang Indo dan Jepang.

Menjelang malam hari, Semarang berada dalam keadaan yang sangat panas. Di tengah malam menjelang fajar tanggal 15 Oktober 1945 Kidobutai di Jatingaleh merebut gedung di Candi Baru yang pagi hari sebelumnya telah diduduki oleh Angkatan Muda Perguruan Perekonomian Taman Siswa Semarang. Mereka ditangkap dan ditahan di Markas Kempetei yang letaknya tidak jauh dari gedung itu. Mereka tidak diberi makan hingga hari Jum'at, ketika tentara pendudukan Inggris datang menduduki daerah Candi Baru.

Sementara itu, Jepang mengadakan teror serta menyerbu kota dan berusaha untuk merebut senjata di Markas BKR Jl. Pandanaran. Tentara Jepang lainnya membakari rumah-rumah penduduk di Jl. Lempongsari, Jl. Mangga, Depok, Kampung Batik, dan beberapa tempat lain. Mereka juga melakukan pembunuhan terhadap rakyat di Gedung Sobokarti. Taman Serayu, sekitar jembatan Pandean Lamper, Jl. Patimura, Alun-alun Pasar Juhar, Lemah Gempal, Bulu, dan tempat-tempat lain.[48]

Dalam suasana yang menegangkan itu, didengar berita bahwa pasukan Jepang meracun reservoir air di Jl. Wungkal Candi Baru. Kepala Laboratorium RS Purusara (sekarang RSUP dr. Karyadi) Semarang, dr. Karyadi, yang hendak memeriksa kebenaran berita itu ditembak mati oleh Jepang di Jl. Pandanaran. Tentu saja peristiwa ini semakin memanaskan situasi konflik antara ke dua belah pihak.

Dalam pertempuran itu sekelompok Jepang sipil, diperkirakan berjumlah antara 250--400 arang yang bekerja di pabrik baja Cepiring, telah tertahan dan dibawa ke penjara Bulu. Pada ujung senja tanggal 15 Oktaber 1945, para tahanan ini menjadi korban dari pemuda yang dihantui rasa takut dan ingin membalas dendam. Sekurang-kurangnya 130 orang dibunuh secara mengerikan dan 60 orang lebih hilang tanpa bekas. Di bagian lain di kota Semarang, orang-orang Jepang yang terpisah-pisah juga disembelih. Kemudian Jepang memperkirakan, paling sedikit 250 orang mati terbunuh. Ketika Kidobutai menemukan apa yanq telah terjadi, kemarahan tak terkendalikan. Meskipun inti Kidobutai hanya berjumlah 500 orang, karena orang-orang Jepang lainnya kemudian dipersenjatai, akhirnya mereka mempunyai pasukan yang terdiri dari 1.100 orang. Dengan pasukan besar itu mereka memasuki kota. Orang-orang yang membawa senjata atau dicurigai membawa senjata dibunuh di tempat. Beberapa truk orang Semarang dibawa ke luar kota dan tidak pernah terdengar lagi berita mengenai mereka. [49]

Pertempuran Lima Hari yang terjadi dari tanggal 15--20 Oktober 1945 itu telah membawa korban ribuan jiwa. Di samping itu, harta benda milik penduduk yang tidak ternilai harganya menjadi sasaran dalam pertempuran itu. Diperkirakan sekitar 2.000 orang Indonesia dan 500 arang Jepang 50 telah tewas dalam pertempuran selama lima hari itu.[50]

Demikianlah kondisi kota Semarang yang sudah diperkirakan akan dapat dikuasai dengan mudah oleh Sekutu yang ditumpangi NICA. Keadaan yang sangat menyedihkan dan mencekam sedang berlangsung.

Laporan-laporan tentang pertempuran sengit di Semarang menarik para pemuda dari kota-kota dan desa-desa terdekat untuk datang ke Semarang membantu melawan Jepang. Dari arah timur para pemuda daerah Genuk, Demak, Pati, Cepu, datang membantu pemuda Semarang untuk menyerbu Jepang. Dari arah tenggara dan selatan datang pemuda dari daerah Purwodadi, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, Salatiga, Ambarawa dan Banyumas. Begitu pula dari arah barat datang pemuda-pemuda dari Kendal, Pekalongan, Purwakerto. dan lain-lain.[51]

Dari berbagai peristiwa dalam menghadapi Jepang, tampak bahwa pemuda memegang peranan yang sangat penting. Dengan inisiatif sendiri para pemuda bergerak untuk merealisasikan kemerdekaan, kekuasaan, dan kelengkapan negara yang baru saja diproklamasikan. Karena Jepang sebagian besar berada di daerah perkotaan, maka peranan pemuda kota tampak lebih menonjol dari pada pemuda desa. Pemuda-pemuda desa di sekitar pabrik juga memegang peranan penting selama masa peralihan kekuasaan dan perebutan senjata. Pelopor gerakan dalam menghadapi Jepang adalah para pemuda revolusioner yang status sosialnya lebih baik dari pada pemuda kebanyakan. Mereka adalah bekas anggota PETA. Heiho, Barisan Pelopor, dan sebagainya. Mereka menggerakkan masyarakat, untuk merebut senjata dari tangan Jepang dan mengusir mereka. Kebencian masyarakat terhadap kekejaman Jepang pada masa lampau telah mendorong tindakan kekerasan terhadap orang-orang Jepang. Ungkapan-ungkapan kebencian tampak dalam pengusiran terhadap Jepang di berbagai daerah di Jawa Tengah. Sementara itu, peranan golongan masyarakat lainnya selama periode ini adalah, membantu perjuangan pemuda dalam menghadapi Jepang.

2.2.2 Menghadapi Sekutu

Masalah baru bagi pemuda dalam melaksanakan perebutan kekuasaan adalah kedatangan pasukan Sukutu. Pasukan Sekutu yang datang ke Indonesia ini di bawah *Southeast Asia Command* dengan pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan Sekutu ini bernama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI), mempunyai tugas menerima penyerahan dari Jepang, membebaskan tawanan perang, melucuti senjata Jepang dan memulangkannya, menjaga keadaan damai, dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil RI.[52] Kedatangan pasukan Sekutu ini disambut dengan netral oleh pihak RI. Namun setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu ini juga membawa serta orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) secara terang-terangan, maka sikap pihak RI berubah menjadi curiga. Pasukan Sekutu ini mendarat di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang.

Pendaratan pasukan Sekutu di Semarang berlangsung ketika para pemuda pejuang Jawa Tengah disibukkan dengan Pertempuran Lima Hari melawan jepang. Setelah mendarat pada tanggal 20 Oktober 1945 di Semarang, pasukan Sekutu (Inggris) itu kemudian menuju ke Ambarawa dan Magelang dengan dalih untuk mengurus tawanan Jepang dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Mereka sampai Magelang pada tanggal 6 Oktober 1945. Gerakan pasukan Sekutu ke Magelang ini tidak mendapat gangguan dari pihak RI.

Ternyata kedatangan Pasukan Sekutu ini telah menimbulkan kekacauan-kekacauan. Serdadu-serdadu Sekutu mulai melakukan tindakan-tindakan provokatif. Bendera Merah Putih yang berkibar di gedung-gedung yang mereka tempati diturunkan dan diganti dengan bendera Inggris. Kendaraan RI yang didapat dari Jepang dirampas dengan alasan bahwa semua kendaraan eks Jepang adalah milik Sekutu yang memenangkan perang atas Jepang. Mereka telah membebaskan interniran orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda itu bersikap congkak dan berusaha untuk menduduki kembali fungsi-fungsi mereka sebelum Perang Dunia II. Keadaan ini menyebabkan rakyat Jawa Tengah sangat marah, sehingga dilancarkan boikot bahan pangan dan keperluan sehari-hari lainnya terhadap mereka. Pada tanggal 31 Oktober 1945 rakyat Magelang mengangkat senjata melawan Sekutu.[53] Kekuatan-kekuatan kelaskaran seperti BPRI, Pesindo, Hisbullah, Sabilillah, API, Barisan Banteng, KRIS, Polisi Istimewa, dan lain-lain bangkit membantu TKR bertempur melawan Sekutu.[54]

Blokade terhadap Musuh dilakukan dengan ketat. Rakyat sepanjang jalan Magelang-Semarang memasang barikade dengan cara menebangi pahon-pohon di tepi jalan. Karena jalan sudah diblokir dan dijaga ketat akibatnya komunikasi antara pasukan Sekutu di Magelang dan induk pasukan di Semarang terputus. Tekanan berat seperti kurangnya suplai bahan pangan dan kebutuhan lain telah menyebabkan moril dan fisik mereka semakin merasot. Akhirnya pada tanggal 21 November 1945 malam hari, pasukan Sekutu meninggalkan Magelang menuju ke Ambarawa di bawah perlindungan Angkatan Udaranya.

Gerakan mundur pasukan Sekutu dari Magelang diikuti dengan teror terhadap penduduk. Teror ini yang menyebabkan terjadinya peperangan di Ambarawa (Palagan Ambarawa). Pasukan-pasukan TKR dan badan-badan kelaskaran dari segenap pelosok Jawa Tengah semuanya mengalir ke Ambarawa untuk mengepung musuh. Mulai tanggal 25 November 1945 selama tiga hari terus-menerus Ambarawa mengalami bombardemen dari udara. Pertempuran terus berlangsung dengan sengit di seluruh wilayah Ambarawa dan sekitarnya hingga pertengahan bulan Desember. Palagan Ambarawa ini berlangsung hingga tanggal 15 Desember 1945, ketika pasukan Sekutu bergerak meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Pengunduran mereka diikuti dengan pengejaran dari pasukan TKR. Pagi harinya, tanggal 16 Desember 1945 bendera Merah Putih berkibar dengan megahnya di Ambarawa.

Pada saat pasukan Sekutu mundur dari Ambarawa, mereka tidak luput dari pengejaran pihak RI. Mereka masih mencoba mempertahankan kota Ungaran, meskipun hanya mampu bertahan satu hari satu malam. Mereka akhirnya dapat didesak masuk kota Semarang. Mereka digiring dari berbagai arah yaitu timur, tenggara, selatan dan barat. Ketika mereka telah memasuki kota Semarang, maka kota itu dikepung dari berbagai penjuru. Selain melakukan blokade bahan pangan, serangan dari pihak TKR semakin terorganisasi.

Sementara itu, di Semarang pertempuran yang terjadi sejak bulan Oktober 1945 masih terus berlangsung. Pada tanggal 18 November 1945 pertempuran meletus lagi di Semarang dalam bentuk segi tiga ialah Jepang-Inggris-Indonesia. Dalam pertempuran yang berlangsung hingga tanggal 21 November pasukan RI dapat mengepung Sekutu hingga memutuskan jaringan perhubungan. Kecuali itu, pasukan RI dapat menguasai kamp-kamp tawanan. Posisi pasukan RI yang semakin kuat ini menyebabkan Sekutu minta bantuan ke Surabaya.

Pasukan-pasukan RI yang bertempur itu datang dari sebelah timur dan barat Semarang. Pertempuran yang berlangsung hingga tanggal 30 November 1945 berjalan dengan hebat. Pertempuran ini telah mengakibatkan putusnya hubungan Sekutu dengan daerah lain, hingga

perhubungan hanya dapat dilakukan lewat udara. Sementara itu, di pihak RI bantuan terus mengalir dari daerah-daerah di sekitar Semarang seperti dari Purworejo, Karanganyar, dan lain-lain.

Pada tanggal 7 Desember 1945, lapanaan terbang Kalibanteng dapat dikuasai aleh pihak RI Bala bantuan terus saja mengalir dari Kudus, Demak, Pati dan kota-kota lain. Bantuan ini dapat memperkuat pasukan RI, hingga dapat memperhebat pengepungan terhadap musuh. Selama bulan Desember 1945 pertempuran melawan Inggris terus berlangsung dengan seru. Setelah melalui masa-masa yang sulit penuh dengan pertempuran, dan ternyata pasukan Sekutu memang ditumpangi Belanda, maka pada tanggal 1-2 April 1946 diadakan *Jogja Agreement*. Perundingam antara RI dengan Sekutu itu berisi tentang pengangkutan tawanan perang dan tentara Jepang.

Sementara itu secara diam-diam dan berangsur-angsur Belanda mulai mendaratkan tiga batalyon KNIL. Pada bulan Mei 1946 seluruh Brigade T KNIL telah mendarat dan mengkonsolidasikan kekuatannya di Semarang.[55] Pada tanggal 17 Mei 1946 berlangsung upacara serah terima komando pendudukan dari *Brigade Darling* (Sekutu) kepada Kolonel Van Langen (KNIL). Sejak itu kota Semarang secara resmi diduduki oleh Belanda. Sementara itu, pasukan Inggris atas nama Sekutu telah ditarik dari Jawa Tengah.[56]

Tidak boleh dilupakan, bahwa peranan masyarakat desa selama menghadapi Sekutu cukup dapat dibanggakan. Semua lapisan masyarakat menyumbangkan apa saja yang dimiliki dengan penuh keikhlasan. Pemuda dari berbagai daerah aktif dalam medan pertempuran. Ulama memberikan dorongan spiritual kepada para pejuang. Kaum pria yang tidak maju dalam medan pertempuran membantu garis belakang dengan menyediakan akomodasi dan logistik bagi para pejuang membantu pembuatan barikade dan tugas-tugas lain untuk mendukung pertempuran.

Dapur umum diselengarakan oleh warga masyarakat secara spontan. Bahan makanan mengalir dari berbagai daerah untuk mencukupi kebutuhan dapur umum ini. Pengumpulan bahan makanan dikoordinasi oleh para pemimpin formal desa yang dibantu oleh rakyat. Pengangkutan bahan pangan ke dapur-dapur umum dilakukan

oleh rakyat. Dapur-dapur umum yang diselenggarakan oleh kaum wanita ini menyediakan nasi bungkus yang dikenal dengan nama *nuk*. Nasi bungkus dengan lauk-pauknya yang sederhana, dibungkus daun jati, daun pisang, atau dalam *besek* dikirim oleh petugas secara khusus untuk pejuang di garis depan. Keterlibatan wanita juga tampak menonjol dalam tugas perawatan korban perang.

2.2.3 Menghadapi Belanda

Serah terima antara pihak Sekutu dengan Belanda dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1946. Meskipun demikian, tentara Inggris yang mewakili Sekutu baru ditarik seluruhnya dari Indonesia pada tanggal 30 November 1946.[58] Kalau Sekutu sudah meninggalkan bumi Indonesia, maka bangsa Indonesia kemudian berhadapan langsung dengan Belanda yang dengan jelas hendak menjajah bangsa Indonesia kembali. Keadaan ini yang menyebabkan pertempuran berkobar lagi di Semarang.

Sejak tanggal 25 Mei 1946 pasukan TRI kembali melancarkan serangan terhadap kota Semarang. Di seluruh sektor serangan gerilya berlansung setiap malam. Situasi kota Semarang berubah dengan cepat. Keadaan kota Semarang makin buruk dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Sejak tanggal 2 Juni 1946 Belanda melancarkan aksi pembersihan dan penggeledahan yang dimulai dari kampung Suburan. Pemerintahan juga terancam. Niat NICA untuk mengubah pemerintahan *de facto* makin nyata. Setelah Semarang oleh Inggris diserahkan kepada Belanda, maka segera dilakukan penangkapan terhadap beberapa pemimpin Indonesia.[59] Pada tanggal 3 Juni 1946 Walikota Semarang, Mr. Iksan ditangkap. Penangkapan juga dilakukan terhadap anggota-anggota Balai Kota. Sementara itu anggota polisi sipil RI dilucuti. Tanggal 21 Juni Walikata Semarang dilepaskan, tetapi pada tanggal 1 Juli ditangkap lagi dengan alasan mengadakan hubungan gelap dengan luar kota. NICA juga membubarkan Balai Kota. Pada tanggal 21 Juni 1946 NICA melangsungkan konperensi untuk membentuk Balai Kota baru.

Dengan bubarnya Balai Kota lama maka pemerintahan *de facto* RI telah berakhir. Kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh NICA

dengan dibantu kaki tangannya orang-orang Tionghoa dan Indo yang tiap hari melakukan penangkapan, penggeledahan, perampokan, penculikan, dan lain-lain. Kampung Pindrikan, Rejosari, Krakatau, Mangkunegaran, Mlaten telah ditinggalkan oleh penduduk yang jumlahnya puluhan ribu.[60] Mereka mengungsi membanjiri daerah pedesaan di sekitar Semarang.

Di dalam pengungsian di luar daerah pendudukan, sejak permulaan tahun 1946 dapat dibentuk Pemerintah Daerah Kota Semarang. Tugasnya antara lain mengurus gaji dan kedudukan selanjutnya dari para pegawainya yang diperintahkan meninggalkan daerah pendudukan. Pemerintah Daerah Kota Semarang di dalam pengungsian dapat langsung berdiri di luar daerah pendudukan sampai bulan Desember 1945 berturut-turut di Purwodadi, Gubug Kedungjati, Salatiga, dan terakhir di Yogyakarta.[61]

Selama terjadi serangan dan teror dari pihak Belanda. peranan masyarakat untuk perjuangan menegakkan republik cukup besar. Rakyat bekerja dengan penuh kerelaan, menyumbangkan tenaganya melayani prajurit dalam segala kebutuhan. Beribu-ribu pemuda dari berbagai daerah bersatu dengan semboyan lebih baik hancur dari pada dijajah kembali.[62] Pemuda dan pelajar yang tergabung di bawah panji-panji Laskar Kere berjuang dengan gigih. Laskar Kere ini kemudian menjadi inti dari Brigade 17 atau yang dikenal dengan nama Tentara Pelajar.

Dalam rangka membebaskan rakyat Semarang dari teror Belanda, direncanakan untuk mengepung kota Semarang. Guna mengefektifkan pengepungan itu, maka disusun sektar-sektor dengan pembagian sebagai berikut :[63]

1. Sektor Markas Medan Timur (MMT), dengan pimpinan sektor di Demak. Wilayahnya meliputi pantai Laut Jawa sebelah timur Semarang ke selatan sampai Alastuwo (rel kereta api Semarang Kedungjati).
2. Sektor Medan Tenggara (MMtg), dengan pimpinan sektor di Mranggen. Wilayahnya sebelah utara rel kereta api Semarang Kedungjati dan selatan Metesih.

3. Sektor Markas Medan Selatan (MMS), dengan pimpinan sektor di Ungaran. Batas wilayah sebelah timur Matesih dan sebelah barat Gunungpati. Kemudian MMS dibagi menjadi dua, yaitu MMS dan MMBD (Markas Medan Barat Daya) yang dibatasi Kaligarana.
4. Sektor Markas Medan Barat (MMB), dengan pimpinan sektor di Boja. Wilayahnya sebelah selatan Gunungpati terus ke utara hingga Laut Jawa di sebelah barat kota Semarang.

Untuk kebutuhan suplai seluruh pasukan TRI dan laskarnya yang bertugas di sektor MPP, diatur oleh Dewan Urusan Bahan Makanan yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro dibantu para residen Jawa Tengah. Adapun berasnya diambil dari daerah Purwodadi, Gubuk dan Demak.

Di samping TRI sebagai intinya, terdapat badan-badan perjuangan yang membantu di sektor-sektor tersebut. Pembagian sektornya adalah sebagai berikut : BPRI di MMTG, MMbdp dan MMB. Tentara Rakyat Mataram, Laskar Rakyat, Laskar Kere dari Sala, dan Pesindo di MMS dan MMTG. Hisbullah/Sabilillah dan Laskar Banteng di MMT. MMS, dan MMTG. Kemudian Barisan Srikandi, Polisi Istimewa Semarang, dan Pasukan Jenggot di MMTG. ALRI dari Pekalongan di MMB Sektor II. Sementara itu Tentara Pelajar dan Pasukan Alap-Alap dari Sala di MMS. Di samping itu masih banyak lagi badan-badan kelaskaran lainnya dari Magelang, Purworejo, Kebumen, Kutoarjo, Temanggung, dan Cepu. Pasukan Wanita dari Yogyakarta, Laskar Buruh. Laskar Minyak juga turut berperanan serta meskipun belum jelas tempat tugasnya.[64]

Dengan adanya MPP, maka aksi pengepungan terhadap daerah pendudukan Belanda dikoordinasi di bawah komando MPP Jawa Tengah. Serangan umum terhadap kota Semarang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 1946 dan berhasil menguasai Jatingaleh. lapangan terbang Kalibanteng, Ngesrep, Jangli, dan Candi Lama. Akhirnya tercapai gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946. Gencatan senjata ini disusul dengan Perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946, namun baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Untuk merealisasi gencatan senjata, maka

Pimpinan MPP Jawa Tengah Kol. Sunarto Kusumodirdjo dan sejumlah perwira diperintahkan masuk kota Semarang untuk berunding dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Kol. van Langen, Buurman van Vreden, dan lain-lain.[65]

Kekhawatiran pihak RI akan adanya agresi militer Belanda ternyata menjadi kenyataan. Pada tanggal 21 Juli 1947 dini hari, Belanda menembakkan artilerinya ke seluruh sektor pertahan TNI dengan dahsyat. Pada malam tanggal 21 Juli Belanda menembaki seluruh front sektor pertahanan TNI. Dengan kekuatan satu brigade, Belanda menerobas ke seluruh pertahanan ialah sektor barat, selatan dan timur. Dalam serangan di Jawa Tengah, Belanda menggunakan pasukan-pasukan Brigade T dan Brigade W dari Jawa Barat.

Pada keesokan harinya dua pesawat Mustang Belanda mengadakan pengintaian ke Salatiga. TNI menghalau dengan tembakan dari bawah. Tembakan balasan dari Belanda dilancarkan secara membabi buta. Gerakan Belanda ke arah selatan ini terhambat oleh barikade dan ranjau. Mereka berhasil menduduki Ungaran dari arah Gunungpati. Pasukan Belanda baru dapat memasuki Salatiga pada tanggal 28 Juli 1947. Gerakan Belanda ke selatan terhenti karena jembatan-jembatan telah diputuskan dan jalan-jalan dirusak. Sementara itu, gerakan Belanda dari Semarang ke arah barat mendapat perlawanan dari pihak RI di sepanjang jalan. Di Jrakah Belanda mendapat serangan dari pasukan RI di Gunungpati. Baru pada tanggal 28 Juli 1947 Kaliwungu dapat dikuasai.[66] Di samping itu Belanda juga mendaratkan pasukannya melalui pantai Cilacap.

Gerakan Belanda itu selalu mendapat perlawanan dari pihak RI di sepanjang jalan yang dilaluinya. Baru pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda dapat menguasai Weleri dan Demak. Pertempuran juga berlangsung di Gombong ketika Belanda sampai di sana pada tanggal 5 Agustus 1947. Selama bulan Agustus pertempuran berlangsung hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pengeboman hampir setiap hari dilakukan oleh Belanda.

Betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pertempuran di daerah Semarang dan beberapa daerah Jawa Tengah lainnya.

Jalan-jalan dan gedung-gedung rusak berat. Gedung-gedung yang sedikit utuh digunakan untuk markas berbagai badan kelaskaran. Ini terlihat dari tembok-tembok yang penuh tulisan dan corat-coret seperti Markas Besar Barisan Rakyat, Pesindo. Barisan Banteng, BPRI, dan sebagainya. Kawat tilpon dan listrik malang melintang di sepanjang jalan, sedang pohon-pohon dan tiang listrik dirubuhkan sebagai barikade. Sementara itu, Ambarawa terkesan seperti kota mati dan angker. Suasana di sekitar kota amat mencekam. Kerusakan gedung sebagian besar bukan karena pertempuran, tetapi justru karena perampokan.

Gerakan militer Belanda itu lebih bersifat tekanan diplomatik dari pada gerakan militer yang bersifat menguasai dan mempertahankan daerah yang telah dikuasainya.[67] Gerakan militer ini terutama adalah gerakan tawar menawar konsesi politik. Belanda dapat berkuasa untuk sementara waktu di suatu daerah, tetapi tidak mungkin menguasai daerah itu dalam waktu yang agak lama. Makin luas daerah yang dikuasainya makin berpencar serdadu-serdadunya dan makin berkurang kekuatan militernya. Di samping itu, puluhan ribu tentara Belanda yang datang ke Indonesia tidak membawa makanan. Oleh karena itu, dengan nekad tentara Belanda menyerbu daerah-daerah yang banyak bahan pangan dan padinya. Dengan demikian gerakan militer Belanda ini bersifat gerakan perampokan modern.

Untuk menjalankan kekuasaan di daerah yang didudukinya, Belanda membentuk alat pemerintahan yang bernama *Regeerings Commissie voor Bestuurs Aangelegenheden* (Recomba), yang bertindak seperti pangreh praja pada waktu penjajahan. Uang Belanda diedarkan dengan paksa untuk melancarkan sistem ekonomi kolonialnya. Belanda berusaha memikat rakyat dengan memberikan kedudukan-kedudukan kepada siapapun yang mau bekerja sama dengan Belanda dan membagikan-bagikan bahan pangan dan pakaian kepada rakyat. Namun hanya orang-orang yang tidak memiliki rasa kebangsaan saja yang mau bekerja sama dengan Belanda. Guna menegakkan kekuasaan kolonialnya, orang-orang semacam itu dipergunakan untuk menindas rakyat di daerah pendudukan. Dalam bidang pendidikan, didirikan sekolah-sekolah dengan sistem pengajaran kolonial. Bahasa Belanda digunakan sebagai

bahasa pengantar dan diadakan pembedaan dengan sekolah-sekolah bumiputera seperti pada masa penjajahan Belanda.

Penyerangan militer Belanda dan pendudukannya terhadap daerah-daerah yang berhasil dikuasainya mendapat tentangan yang hebat dari rakyat Indonesia. Untuk mempersatukan potensi rakyat guna mengadakan perlawanan, maka diusahakan penggabungan bermacam-macam kelaskaran dari para pegawai, persorangan dan golongan masyarakat yang karena agresi Belanda terpaksa menyinqkir. Di sepanjang garis pertahanan dan daerah-daerah kantong dapat dibentuk kesatuan-kesatuan gerilya yang sebagian besar terdiri dari para pemuda setempat yang semula telah tergabung dalam TNI. Karena mereka adalah pemuda-pemuda yang bertempat tinggal dan berasal dari daerah tersebut, maka untuk mengenal medan paham sekali, hingga serangan-serangan gerilya mereka selalu berhasil dan dapat mengacaukan kedudukan-kedudukan Belanda. Di samping serangan-serangan gerilya, mereka memasang jaring-jaring gerakan di bawah tanah untuk melakukan sabotase dan intelegensi bagi kesatuan-kesatuan TNI di sepanjang garis pertahanan RI. Mereka juga mengadakan kampanye anti Belanda serta melakukan pembersihan terhadap kakitangan dan mata-mata Belanda.

Aksi militer Belanda tidak berakhir seperti yang diharapkan. Belanda yang menilai rendah daya tempur badan-badan perjuangan, ternyata menemui kenyataan lain. Rakyat mempunyai semangat yang meluap-luap untuk melawan musuh melalui perang gerilya yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga memperbesar semangat perlawanan dan kebencian terhadap Belanda.[68] Daya tempur tidak terletak pada pertempuran frontal, tetapi juga di belakang garis pertempuran berupa berbagai tindakan yang mendukung aksi melawan musuh. Dalam perang gerilya peranan badan perjuangan tidak dapat dipandang ringan. Dalam strategi perang Belanda, badan-badan perjuangan itu diperhitungkan dan dipantau secara cermat. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan-laporan yang sangat cermat mengenai keadaan tiap-tiap badan perjuangan.[69]

Peranan rakyat yang cukup besar ini menunjukkan adanya inisiatif rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam keadaan-

darurat, tampak bahwa rakyat memiliki oto aktivitas dalam membela kepentingannya. Semangat gotong-royong dan kolectivitas cukup menonjol selama masa perjuangan melawan Belanda.[70] Hal ini dapat ditemui dalam aktivitas rakyat desa untuk mengumpulkan beras, bahan makanan, hasil kebun, serta menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk kepentingan perang. Kolektivitas dan gotong-royong rakyat pada masa Agresi Belanda I muncul dengan kuat karena dipaksa oleh keadaan. Rakyat secara gotong-royong mempertahankan kepentingan dan cita-citanya. Mereka juga bergotong-royong dalam menghadapi gelombang puluhan ribu pengungsian selama masa agresi militer Belanda.

Agresi serta gerakan-gerakan militer Belanda terhadap RI ternyata menggoncangkan seluruh dunia. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mengadakan intervensi dalam rangka menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Anjuran dari Dewan Keamanan PBB untuk meletakkan senjata tanggal 4 Agustus 1947 secara konsekwen ditaati oleh RI. Sebaliknya Belanda secara resmi mentaati namun dalam realitasnya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Untuk mengatasi keadaan ini dibentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan KTN, akhirnya melahirkan perundingan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.[71]

Setelah ditandatanganinya Perundingan Renville, kemudian dilangsungkan perundingan mengenai batas-batas demarkasi antara komandan-komandan daerah militer Indonesia dan Belanda di lima tempat di Jawa. Di Jawa Tengah, perundingan dilakukan di tiga tempat yaitu : di sebelah timur kampung Kemit yang terletak di jalan raya Gombong-Karanganyar, di jembatan Kali Turen di Jalan raya Sukorejo-Parakan, dan di jembatan Kali Tanggi di sebelah utara kampung Tengaran jalan raya Salatiga-Tengaran.[72] Dengan adanya garis-garis demarkasi itu, terbagilah daerah Jawa Tengah menjadi daerah pendudukan Belanda dan daerah Republik Indonesia.

Pada tanagal 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan mendadak terhadap Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Gerakan agresi Belanda berangkat dari daerah

pendudukan Belanda. Dari arah barat pasukan Belanda berangkat dari markasnya di Gombong menuju ke timur dan dapat menguasai Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Prembun, dan Purworejo. Dari Purworejo, arah serangan pasukan Belanda menuju ke Magelang dan Muntilan. Gerakan agresi Belanda dari arah utara berawal dari Ambarawa menuju ke Salatiga, Boyolali, Surakarta. Sementara itu dari Demak Belanda bergerak ke Kudus, Pati, dan Rembang.[73] Dengan dikuasainya daerah-daerah tersebut, maka secara militer Belanda dapat menduduki kota-kota kecil di sekitarnya. Namun daerah-daerah yang diduduki Belanda hanya meliputi kota-kota saja, sedangkan desa-desa tetap dikuasai pasukan TNI yang berjuang bersama-sama rakyat secara bergerilya. Kemudian Belanda menjalankan patrolinya ke semua jurusan untuk menghancurkan pasukan TNI yang bergerilya di daerah itu.

Di daerah-daerah yang baru saja diduduki, mulai dibentuk pemerintahan sipil Recomba dengan mempergunakan tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Akan tetapi Pemerintahan Sipil Recomba hanya berjalan di kota-kota dan tidak menguasai rakyat. Meskipun ada beberapa orang yang mau bekerja sama dengan Belanda, namun pada umumnya rakyat tetap patuh dan taat kepada Pemerintah RI. Rakyat ikut berjuang bersama dengan TNI Yang bertahan di kantong-kantong gerilya dan pemerintahan dalam pengungsian.

Masyarakat desa memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Sistem *sambat-sinambat* yaitu tolong-menolong atau gotong-royong berfungsi sangat operasional.[74] Dalam konteks perang gerilya, sifat ini sangat mendukung perjuangan. Hal ini terbukti bahwa peranan rakyat desa cukup besar selama masa Agresi Belanda II. Rakyat banyak membantu kesukaran-kesukaran yang dialami pasukan-pasukan yang berjuang di garis pertempuran. Rakyat desa memberi bantuan bahan pangan, pakaian, obat-obatan, persenjataan, serta tempat penampungan bagi pasukan gerilya. Dengan demikian rakyat telah memainkan peranan penting dalam membantu perjuangan melawan Belanda.

Pada masa Agresi Militer Belanda II itu, disusun Pemerintahan Militer di daerah-daerah yang baru maupun yang telah lama diduduki Belanda. Dengan adanya Pemerintahan Militer, maka perlawanan

gerilya mempunyai landasan yang semakin kuat dari seluruh rakyat. Dalam perang gerilya terdapat kerjasama yang sangat rapi antara rakyat dan TNI dalam membantu pemerintahan dan perjuangan menegakkan Republik Indonesia. Dalam hal ini peranan para pemimpin semakin penting. Lurah menjadi pimpinan total bagi desanya yang tetap ditaati oleh rakyatnya.[75] Lurah menjadi sendi bagi pemeliharaan pemerintahan RI. Namun bila lurah menunjukkan sikap pro Belanda, maka rakyat akan memusuhinya dengan penuh kebencian.

Catatan :

1. Tim Penyusun Monografi Jawa Tengah, 1981, *Monografi Daerah Jawa Tengah,* Proyek Pengembanaan Media Kebudayaan Depdikbud RI. h. 23--24.
2. KODAM VII/Diponegoro, 1970, *Buku Petunjuk Teritorial I.* h.2--3.
3. *Ibid.*, h. 5
4. Heather Sutherland. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*,- Jakarta : Sinar Harapan, h. 17.
5. George D. Larson. 1990, *Masa Menjelang Revolusi. Keraton dan Menjelang Kehidupan Politik di Surakarta. 1912--1942* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h.l.
6. G.A. Ohorella dkk, 1990, *Peta Sejarah Jawa Tengah.* Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. h.9.
7. Sartona Kartodirdio, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI,* Jakarta : Balai Pustaka, h.5.
8. A.G. Prinaqodigdo, 1952. *Tata Negara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Jepang dari Bulan Maret sampai Bulan Desember 1942* Yogyakarta. h.22--23

9. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, h. 62.
10. G.A.Ohorella. *loc. cit.*,
11. *Ibid.*
12. George D. Larson, *op. cit.*, h.3.
13. Sartono Kartodirdio, *op. cit.*. h. 29.
14. Ben Anderson, 1988, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta Sinar Harapan, h. 110.
15. Anton E. Lucas. 1989, *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, h. 118
16. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponeaoro, 1968, Sedjarah TNI-AD KODAM VII/Diponegaro, *Sirnaning Jakso katon Gapuraning Ratu,* Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro, h. 25.
17. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, 1952. *Propinsi Djawa Tengah,* h. 23--26.
18. Georqe D. Larson. *loc. cit.*
19. Anton E. Lucas. *op. cit.*, h. 118--119.
20. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *loc. cit.*
21. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah. *op. cit.*. h. 111--112.
22. Ben Anderson. *op. cit.*,- h. 283--293
23. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah. *op. cit.*. 120--121.
24. Akira Nagazumi, 1988, *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h. 92.
25. KODAM VII/Diponec-ioro, *op. cit.*, h.3.
26. R. Firth. 1966, *Tjiri-Tjiri dan Alam Hidup Manusia.*, Bandung : Sumber Bandung, h. 44.

27. A.M. DiDjuliati Suroyo *Revolusi dan Mentalitas (Cepu Sekitar Masa Revolusi Kemerdekaan) 1945-1949*, Makalah pada Seminar Sejarah Lokal Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945- 1947 di Bandungan Semarang tanggal 13-15 Oktober 1994, h. 7. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *op. cit.*, h. 238.

29. A.M. Djuliati Suroyo, *op. cit.*, h. a.

30. Sudjito Sosrodihardjo, 1968, *Perubahan Struktur Masyarakat Djawa,* Jogyakarta: Karia, h. 49.

31. J.R.Chaniago dkk, 1986. *Ditugaskan Sejarah Perjuangan Merdeka 1945 -1989*, Jakarta : Pustaka Merdeka. h. 30.

32. *Boeroeh*, No. 162, Th. VII, 20 Djoeli 1948.

33. *Nasional*, No. 78, Th. III, 3 April 1948.

34. Chusnul Hayati dkk, 1965, *Situasi Moneter di Semarang dan Yogjakarta pada Masa Revolusi 1945-1950,* Laporan Hasil penelitian Fakultas Sastra UNDIP Semarang, h. 45.

35. Cecil Helman. 1984, *Culture, Health and Illness,* Bristol : John Wright & Sons Ltd.

36. Nudjahirin Thchir. 1995. *Upacara. Lingkaran Hidup dan Upacara Konunal di Kalangan masyarakat Krajan Kulon, Kaliwunqu. Kendal,* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Sastra UNDIP, h. 2

37. *Ibid.* , h. V.

38. KODAM VII/Diponegoro. *op. cit.*, h. 8.

39. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *op. cit.*, h. '-.70.

40. Sediarah Militer Kodam VII/Diponegora, *op. cit.*, h. 33

41. Djawatan Peneranaan Propinsi Djawa Tengah, *op. cit.,* h. 24.

42. Ben Anderson, *op. cit.*, h. 169.

43. *Ibid.*, h. 170.

44. Anton E. Lucas, *op cit.*, h. 122.
45. *Ibid.*, h. 124.
46. Anderson, *op. cit.*, h. 171.
47. Soekirno, 1956, Semarang.. *Semarang Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang*, h. 94.
48. *Ibid.*, h. 98.
49. Anderson, *op. cit.*, h. 173.
50. *Ibid.*
51. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.*, h. 35
52. Sartono Kartodirdio, *op. cit.*, h. 31--32.
53. Dinas Sejarah Militer KODAM VII/ Diponegoro : 1979, *Palagan Ambarawa*, Semarang ': Dinas Sejarah Militer KODAM VII?Diponegoro. h. 41.
54. Sediarah Militer KODAM VII/Diponegoro, *op. cit.*, h.39.
55. *Ibid.*, h. 43.
56. *Ibid.*, h. 72.
57. *Ibid.*, h. 73.
58. *Almanak Angkatan Perang*, 1956. Djakarta PT Upeni, h. 388.
59. *Kedaoelatan Rakjat*, 1 Dioeli 1946.
60. *Kedaoelatan Rakjat.* 13 Dioeli 1946.
61. Soekirno, *op. cit.*. h. 56.
62. *Kedaoelatan Rakjat*, 19 Dioeli 1946.
63. Soekirno, *op. cit.*, h. 121.
64. Sedjarah Militer KODAM VII/Diponeaoro, *op. cit.*. h.
65. *Ibid.*. h. 77.
66. *Ibid.*, h. E39. Lihat juga pada G.A. Ohorella, *op. cit.*. h. 17.
67. *Bintang Merah*, 7.1 Dioeli 1947.

68. K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Jakarta : Gunung Agung, h.122.

69. A.B. Lapian & P.J. Drooglever, 1992, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta : Grafiti, h. E39.

7o. M. Nasreon, 1951, *Masalah Sekitar Otonomi*, Groningin, Djakarta J.B. Wolters, h. 49.

71. Sartono Kartodirdio, *op. cit.*. h. 51-53

72. Sedjarah Militer KODAM VII/Diponegoro. *op.. cit.*, h.112

73. G.A. Ohorella. *op. cit.*, h. 17.

74. Sartono Kartodirdjo, 1994, *Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta : Aditya Media, h. 159.

75. A.H. Nasution, 1980, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Yang Lalu dan Masa Yang Akan Datang*. Bandung : Angkasa, h. 87.

BAB III

PERANAN MASYARAKAT DESA DI KENDAL DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN

3.1 Keadaan Umum Kabupaten Kendal

3.1.1 Lingkungan Geografis

Kendal merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, terletak sekitar 29 Km arah barat dari kota Semarang. Letak wilayah antara titik koordinat 109° 40' -- 110° -- 18' bujur timur dan 6° 32' -- 7° 24', dengan batas-batas wilayah utara Laut Jawa, timur Kotamadya Dati II Semarang, selatan Kabupaten Dati II Semarang dan Kabupaten Dati II Temanggung, barat Kabupaten Dati II Batang.[1] Wilayah Kabupaten Kendal secara morfologis mempunyai karakteristik, yakni bagian utara merupakan tanah rendah sepanjang pantai di Pantai Utara Jawa, bagian tengah merupakan tanah pegunungan yang rendah, dan bagian selatan berupa dataran tinggi pegunungan. Kondisi alam yang demikian itu berpengaruh terhadap penerapan sistim pertahanan, wilayah gerilya dan wilayah yang dengan mudah dapat dikontrol oleh kekuatan tentara dengan dukungan peralatan modern.

Keadaan tanah di Kendal Utara merupakan tanah margalit yang subur, dan baik untuk areal persawahan. Wilayah ini merupakan hamparan persawahan yang mendapatkan irigasi teknis. Kalikuto terletak di perbatasan bagian barat Kendal dengan Kabupaten Batang.

Sungai Bodri terletak di tengah wilayah, sedangkan sungai Blorong mengaliri Boja, Kaliwungu dan Brangsong. Terdapat sungai yang lainnya seperti sungai Putih, Bungai Wringin, sungai Blorong, sungai Glagah . Banyaknya aliran sungai itu menjadikan persawahan Kendal tidak kekurangan air, dan dimasa diterapkannya sistim gerilya, sungai merupakan tempat strategis untuk pendadakan ataupun menghilang. Beberapa bagian bertanah lempung yang baik untuk bahan pembuatan batu bata, genting ataupun pembuatan gerabah. Adapun di sepanjang pantai merupakan tanah tambak yang digunakan untuk usaha perikanan. Bagian wilayah Kendal Tengah merupakan hutan dan perkebunan yang ditanami kayu Jati, karet, kopi, teh, coklat dan yang lainnya. Daerah onderneming ada di bagian tengah ini. Bagian Selatan berupa tanah latrit aeran, merupakan lereng dari Gunung Perahu, Gunung Kendeng, Gunung Ungaran dan Gunung Patakbanteng.[2] Wilayah ini merupakan tempat strategis sebagai pos pertahanan.

Secara klimatologi, wilayah bagian utara mempunyai ketinggian antara 0 s.d. 10 meter, sedang bagian selatan merupakan tanah pegunungan dengan ketinggian 10 s.d. 2.579 meter. Tanah di lereng dan lembah pegunungan tersebut subur dan cukup menimbun air. Kondisi alam yang demikian itu, menyebabkan Kendal mempunyai obyek wisata alam; seperti air terjun Curugsewu, Gua Kiskendo, Sumber air panas Gonoharjo, Pantai Laut Sendang Sikucing, Pantai Laut Mororejo dan yang lainnya. Suhu udara antara 25°C -- 27°C. Bagian daerah pantai berhawa panas, sementara di daerah selatan relatif sejuk. Demikian pula mengenai curah hujan, daerah selatan yang merupakan pegunungan lebih sering terjadi turun hujan daripada di daerah ngarai.

Pada musim hujan yang berlangsung antara bulan Oktober s.d Maret, angin bertiup dari barat laut ke tenggara. Bulan April s.d September arah angin dari tenggara ke barat laut, berlangsung musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, perubahan musin yang dikenal dengan mareng dan labuhan. *Mareng* berlangsung antara bulan Pebruari - April, sedangkan labuhan antara September - Nopember. Pada sekitar bulan Januari dan September, arah angin tidak menentu; sehingga sering menimbulkan adanya bencana angin ribut.

3.1.2 Kehidupan Sosial Ekonomi

Topografi alam merupakan salah satu variabel yang turut menentukan kondisi sosial masyarakat, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Alam dengan kekayaan yang dimiliki dimanfaatkan oleh manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian manusia dengan lingkungan alamnya telah terjalin dalam suatu interaksi. Manusia memanfaatkan alam, sementara alam dengan ciri spesifik yang dimilikinya menentukan terhadap corak aktivitas manusianya. Lingkungan sosial dari wilayah persawahan akan berbeda dengan lingkungan sosial daerah perladangan.[3] Namun demikian, manusia tetap merupakan faktor dinamik yang dapat menentukan adanya perubahan.

Luas daerah Kendal Bekitar 100.338.1054 HA. Sekitar sepertiga wilayahnya (31.117 HA) merupakan tanah sawah, dan selebihnya merupakan tanah tegal keras, hutan, perkebunan, tambak, dan tanah negara. Kendal merupakan daerah persawahan yang subur, yang dalam setahunnya dapat panen dua kali. Pada masa kolonial, jenis padi yang dikenal adalah *padi Jawa,* seperti *ginjah, arondol, trumbun, genjah Jawa* dsb. Pada masa itu, saat mulai tanam sangat diperhatikan. Apabila tabur atau tanam dimulai sebelum April, padi akan tergenang air sehingga terserang hama mentek. Kalau sudah demikian, desa akan melakukan *ruwatan* dengan menanggap wayang. Setelah panen petani diminta sumbangan berupa beberapa *gedeng* padi. Untuk pengerjaan sawah dilakukan dengan pengerahan tenaga kerja, tanpa memperoleh imbalan uang. Selama melakukan pekerjaan bersama tersebut memperoleh makan, sebagaimana melakukan kerja pancen kepada lurah. Pemberian hak garap atas tanah dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Pencabutan hak garap akan dilakukan terhadap mereka yang *mulodoro* atau merantau yang selama tiga bulan tidak ada kabar beritanya. Demikian pula hak waris juga tidak dapat diberikan kepada anak yang tidak bertempat tinggal dalam satu desa.[4]

Pada masa Jepang, Pemerintah pendudukan melakukan gerakan-gerakan massal untuk memperkuat kedudukannya. Salah satu gerakan massal yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat adalah yang disebut dengan Gerakan Hidup Baru. Gerakan ini mewajibkan kepada rakyat untuk menanam Jarak, menyetorkan sepertiga dari hasil panennya; menyerahkan benda-benda yang terbuat dari emas, berlian, intan, perak, alumunium dan sejenisnya. Bagi mereka yang mempunyai *pathok narowito* mendapat giliran kerja. Dengan demikian pada jaman Jepang ditandai oleh kehidupan ekonomi yang serba kekurangan. Pangan sulit diperoleh, sementara bahan pakaian hilang dari pasar. Penyakit mewabah dimana-mana, terutama penyakit kulit yang terkenal dengan istilah *gudik*. Kekurangan pangan disebabkan adanya kewajiban bagi petani untuk menyerahkan hasil panenannya kepada pemerintah, yang dalam praktek sering penyerahan itu mencapai setengah dari hasil panen. Dalam pelaksanaan penyerahan hasil bumi dan barang berharga, seperti besi, emas permata dan lainnya; tugas lurah dibantu oleh polisi desa. Beban penderitaan rakyat di desa, ditentukan pula oleh praktek perilaku lurah. Di salah satu desa di Weleri ada lurah yang pada masa itu lebih mudah memperoleh kekayaan daripada masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan membangun tiga buah rumah dengan menggunakan atap dari genting. Hanya saja lurah tersebut setelah kemerdekaan diberhentikan dari Jabatannya.[5]

Beras menjadi barang yang sulit diperoleh, sehingga penduduk harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Pola komsumsi dan bahan makanannyapun bergeser, dari dua atau tiga kali makan nasi; harus diselingi atau bahkan diganti dengan bahan makanan dari jagung, gaplek dan bahkan di beberapa lokasi terutama di daerah pegunungan *gogik* menjadi menu utama.[6] Namun demikian tidak semua unsur dalam kelompok masyarakat mengalami situasi yang sama. Para pemilik tanah yang tergolong kaya di desa, masih tetap menyelenggarakan kehidupan seperti biasa; yaitu makan nasi sehari dua atau tiga kali. Memang ada larangan perdagangan beras antar daerah, dengan pengawasan yang ketat. Di daerah-daerah perbatasan ditempatkan petugas pengawas untuk pelaksanaan aturan tersebut. Kalau sampai ada uang ketahuan, akan dilakukan penyitaan.[7] Tenaga laki-laki banyak digunakan untuk pelaksanaan kerja yang telah ditentukan oleh tentara pendudukan, seperti untuk *romusha,* memagari laut di Kendal utara, latihan baris-berbaris dalam *semendan, sinentai*

ataupun menjaga keamanan desa. Kewajiban dalam pengerahan tenaga dikaitkan dengan penguasaan tanah. Bagi pemilik tanah ada kewajiban untuk melakukan kerja-kerja seperti tersebut di atas. Kalau tidak memenuhi kewajiban maka hak pemilikan akan ditarik oleh desa. Beberapa orang yang tidak memiliki sawah, berusaha untuk memperolehnya dengan cara menjadi romusha; menggantikan pemilik tanah yang tidak mau dikirim sebagai tenaga romusha.

Kebutuhan sandang sangat kurang. Pakaian sulit diperoleh karena penduduk tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya. Pakaian yang dipakai oleh kebanyakan orang sering diistilahkan dengan sebutan *kathok karung, klambi goni*, yaitu celana terbuat dari bahan karung, sedangkan bajunya terbuat dari goni. Bahan sarung terbuat dari karet. Para pedagang pribumi yang tergolong berkecukupan, pakaiannya tidak sampai menggunakan goni, karena kain kasar buatan Pekalongan masih dapat diperoleh.[8] Mereka ini tinggal di desa daerah persawahan atau kota. Bagi mereka yang memiliki hasil sawah dan telah menyerahkan hasil parohannya, akan memperoleh jatah berupa beras, minyak dan bahan pakaian melalui *andren* (antri),dengan menggunakan girik (kartu). Penyelenggaraannya diatur oleh bagian perekonomian yang disebut *kumiai, Kominco* atau satu kepala keluarga akan memperoleh satu botol minyak, sekitar 5 Kg beras dan untuk kain disesuaikan dengan setoran panenan hasil sawah.[9]

3.1.3 Kehidupan Sosial Budaya

Kota Kaliwungu merupakan pusat pemerintahan sebelum pindah di Kendal. Pemindahan pusat pemerintahan terjadi pada masa Pemerintahan Inggris, atas usul Pejabat Bupati Patih Wiromenggolo. Pemindahan ini dengan pertimbangan bahwa Kaliwungu sering dilanda banjir dan di sebelah selatannya merupakan tanah berbukit-bukit. Kendal tanahnya luas dan datar, dekat dengan pantai. Maka Pemerintah Inggris pada tahun 1812 menyetujui pemindahan tersebut, dan menobatkan Pangeran Ario Prawirodiningrat II sebagai bupati.[10]

Dalam pelaksanaan kehidupan keagamaan tampak dipengaruhi oleh kepercayaan sebelumnya. Kehidupan sinkretis dari kepercayaan

nenek moyang, Hindu dan Islam terlihat dalam banyak pelaksanaan, seperti upacara yang meminta restu kepada danyang dan yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu, dengan harapan dapat tercapainya keinginan dari si pemintanya.[11] Adat yang demikian itu terlihat pula pada pelaksanaan *adat kalang*, yaitu upacara pemberian bekal kepada orang yang telah meninggal dengan cara membakar benda, terutama pakaian yang menjadi kesukaan dari orang yang telah meninggal tersebut. Pelaksanaan *Adat kalang* hanya dapat dilakukan pada hari Selasa Wage. Kemudian *adat wiwitan* dilaksanakan berkaitan dengan awal musim giling tebu, tradisi ini dilakukan dengan harapan memperoleh keselamatan selama melakukan pelaksanaan kerja giling. Di samping ltu masih terdapat adat yang lain seperti sawalan dan lain sebaginya. Masyarakat Kendal juga masih menjalankan upacara-upacara yang berkaitan dengan daur hidup, seperti tingkeban, upacara kelahiran., perkawinan, kematian dsb.

Di Kendal lembaga pendidikan pesantren telah ada sejak jaman kolonial, dan didatangi oleh santri-santri yang bukan saja dari Kendal sendiri, akan tetapi juga berasal dari luar daerah. Lahirnya tradisi syawalan di Kaliwungu tidak terlepab dari adanya pesantren. Para alumni pesantren dan masyarakat merasa berkewajiban untuk tetap menjalin hubungan dengan kyai atau ulama, sekalipun kyai tersebut telah meninggal dunia. Mereka melakukan ziarah dengan mengucapkan dhikir dan memanjatkan do'a, untuk mengharapkan barokhah. Pesantren dengan unsur-unsurnya mempunyai peranan yang besar pada masa perjuangan kemerdekaan.

Corak kesenian rakyat yang bernafaskan agama Islam berupa kesenian *terbangan, kuntulan, srandul, kentrung, arang-arang, qosidah* dan *opak abang,* Sedangkan kesenian yang berbau magis adalah kesenian *kebodangkal, sintren. kuda lumping* dan *barongan,* Dari jumlah kelompok maupun jumlah personil senimannya, seni *terbangan* menduduki Jumlah yang terbanyak.

3.1.4 Kehidupan Sosial Politik.

Masyarakat Kendal sebagaimana masyarakat lainnya, terdiri dari beberapa kelompok yang terbangun dalam suatu struktur. Kelompok

masyarakat dapat dilihat berdasarkan pada pekerjaan yang pada umumnya terkait dengan lingkungan tempat tinggal. Atas dasar perbedaan itu dapat disebut, misalnya kelompok petani, pedagang, nelayan dan pegawai. Petani tinggal di pedesaan, dan kehidupannya mendasarkan pada pengolahan Bawah. Nelayan tinggal di daerah pantai yang mendasarkan kehidupannya pada penangkapan ikan, sedang pedagang dan pegawai tinggal di kota. Dalam setiap kelompok masyarakat terbentuk suatu struktur, yang pada intinya terdiri dari kelompok atas dan kelompok bawah.[12] Hubungan dalam struktur dan basis lokasi tempat, menjadikan unsur-unsur di dalamnya memegang fungsi spesifik, yang secara bersama-sama menggerakkan roda kehidupan sosial. Persoalan sosial politik pemerintahan lebih dimainkan oleh kelompok dalam struktur tertentu, sehingga dalam pembahasannya tidak melibatkan kelompok lain secara langsung.

Kabupaten Kendal pada masa awal kemerdekaan, secara administrasitif dibagi ke dalam 5 wilayah Pembantu Bupati atau Kawedanan, yang meliputi 17 wilayah Asisten Wedana atau Kecamatan, terdiri dari 306 Desa. Pembagian ini sebagai kelanjutan dari pembagian wilayah sebelumnya. Jepang selama menduduki Kabupaten Kendal, tidak mengubah susunan pemerintahan. Hanya penyebutannya saja yang dirubah. Kabupaten diganti dengan KEN, Kawedanan diganti dengan GUN, Kecamatan diganti dengan SON dan Desa diganti dengan KU; sehingga nama kepala daerah sampai lurah menjadi *kencho, guncho, soncho* dan *kucho*. Pemerintahan dipegang oleh seorang Bupati, yang dibantu oleh seorang patih. Bupati dan Patih dalam menjalankan kepemerintahannya dibantu oleh sejumlah wedono. Wedono membawahi beberapa camat yang mengkoordinasi para lurah. Lurah bersama pamong desa bertugas mengurus desa.[13]

Nama-nama dinas dan Jawatan diberi nama dengan bahasa Jepang, misalnya Jawatan Kereta Api diganti *Rikuyu,* Jawatan Radio diganti *Hoso Kyoku* dan sebagainya. Raden Koesoemohoedojo sebagai Patih Kendal memegang kendali pemerintahan, menggantikan Bupati Kendal R.M. Zarwito Purbonegoro yang diberhentikan oleh pemerintah pendudukan. Namun demikian pemerintahan sehari-hari berjalan biasa. Pejabat dan penguasa tetap dipegang oleh bangsa Indonesia, dikendalikan dengan sistim pemerintahan militer dengan

penegakan disiplin yang ketat. R. Koesoemohoedojo memegang kendali pemerintahan sampai bulan Nopember 1945, setelah didaulat oleh rakyat untuk meletakkan jabatannya. Pada jabatan Kepolisian terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Takahashi diganti oleh Soekarno Djojonegoro.[14]

Memasuki era kemerdekaan, terjadi perubahan struktur kekuasaan politik secara drastis. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebagai tindak lanjut dari keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diadakan di Jakarta, dan pidato radio Presiden Sukarno pada tanggal 23 Agustus agar segera dibentuk Komite Nasional di pusat, maka di daerah-daerah segera merealisasikan keputusan itu. Pada akhir Agustus di Kendal dibentuk Komite Nasional Daerah Kendal. Komite ini mengambil inisiatif, merencanakan dan menggembleng semangat rakyat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Berkenaan dengan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober tahun 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNI, di Kendal pada akhir Nopember 1945 dibentuk BPKNIP daerah Kendal diketuai oleh Bupati Soekarmo.

3.2 Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Masa Perjuangan Kemerdekaan

Berita proklamasi di daerah diterima dengan suka cita. Secara spontan beberapa desa di Kendal mengadakan kegiatan berupa syukuran. Desa-desa di sekitar Kaliwungu, yang sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat muslim, berkumpul di mushola atau masjid untuk melakukan sujud syukur sebagai ungkapan kegembiraan dengan disertai kenduri ala kadarnya. Di Weleri, syukuran dilakukan dengan mementaskan pagelaran wayang kulit Adapun di Tempat Penimbunan Kayu Kalibodri, atas inisitatif dari pimpinan dilakukan pasar malam. Kegiatan-kegiatan tersebut disamping berfungsi sebagai ungkapan kegembiraan, sekaligus sebagai penyebarluasan berita, karena pada awal pelaksanaan kegiatan diisi dengan pemberitaan bahwa negara kita telah merdeka.

Kecepatan dalam menerima berita proklamasi banyak ditentukan oleh kedekatannya dengan jaringan informasi yang ada. Bagi mereka

yang terlibat secara langsung dengan gerakan-gerakan organisasi, berita proklamasi diterima dalam waktu yang relatif dekat dengan peristiwanya sendiri. Di antara anggota arganisasi ada yang mendengar melalui siaran radio yang cara mendengarnya secara sembunyi-sembunyi. Berita ini kemudian diberitahukan kepada anggota yang lain, melalui lisan dari mulut ke mulut sehingga berita tersebut menyebar. Media penyebaran berita masih sangat terbatas, sehingga kantor yang pemiliki sarana komunikasi atau yang berhubungan dengan gerak mobilitas, seperti jawatan kereta api, ondernemeng mempunyai peranan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi.

Kegiatan penggantian bendera Jepang di beberapa kantor di Kendal, dilakukan satu hari setelah peristiwa proklamasi : yaitu setelah adanya ederan dari Semarang. Pemuda memperluas daerah jangkauan pemasangan bendera dengan usaha pengadaan kain merah putih yang digunakan untuk membuat bendera, kemudian dipasang di jalan-jalan.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan dengan segera. Merdeka berarti dapat menentukan segala-galanya oleh bangsanya sendiri, tanpa ada rintangan dari siapapun juga. Sementara Jepang yang baru saja menyerah kepada Sekutu, mempunyai sikap pendirian yang berbeda. Tentara Jepang masih bertahan pada posisi sebelumnya, menguasai perkantoran, pabrik senjata dan beberapa pabrik lainnya, seperti Pabrik Gula Cepiring, Pabrik Besi di Gemuh dan Pabrik Kertas di Kaliwungu. Tentara Jepang tetap berpegang pada perintah Sekutu, untuk menjaga status quo. Kondisi yang demikian itu berhadapan dengan gelora pemuda pejuang yang sedang berkobar, mewarnai gerakan perebutan kekuasaan oleh pemuda terhadap Jepang di Kendal.

Pemerintah RI tanggal 22 Agustus 1945 mengeluarkan instruksi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban dan keamanan untuk menegakkan kemerdekaan. Sejalan dengan instruksi itu di Karesidenan Semarang pada tanggal 30 Agustus 1945 diresmikan pembentukan BKR, dan Soetrisno Soedomo ditetapkan sebagai pimpinannya.[19] BKR Karesidenan Semarang meliputi : BKR Salatiga,

BKR Kabupaten Semarang, BKR Kabupaten Demak, BKR Kabupaten Purwadadi, dan BKR Kabupaten Kendal. BKR Kendal dipimpin oleh Soetedjo Harjoko.[20] Pemuda-pemuda yang pernah ikut dalam *Heiho, Kaigung, Rikugung* dan Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang, banyak yang kemudian menjadi anggota BKR. Di samping itu, banyak pula yang masuk dalam organisasi perjuangan yang dibentuk di Kendal, di antaranya : Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dipimpin oleh Tajul Noor Arifin, Laskar Rakyat oleh Abimanju Sandiman, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) oleh Danu, Sabilillah oleh Kyai Mastur, Hisbullah oleh Kyai Hamzah, Barisan Banteng oleh Kusnaeni. Barisan Pelopor aleh Sinuwan, Organisasi Kepanduan oleh Sujano, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) oleh Ny. Soekarmo dan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh Prawiromartojo.[21]

Kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi anggota badan perjuangan sangat ringan. Asalkan umur sekitar 15 tahun atau dipandang telah mencukupi dan berbadan sehat dapat menjadi anggota. Namun demikian orientasi pilihan pemuda bergabung kepada salah satu badan perjuangan lebih didasarkan pada hubungan sosial dan lingkungannya. Jika kebanyakan dari orang-orang yang dikenal yang berada di lingkungan pergaulannya, seperti tokoh masyarakat atau pemuda setempat yang berpengaruh menjadi salah satu badan perjuangan, maka pemuda di lingkungannya akan menjadi anggota dari badan perjuangan tersebut. Dengan demikian akan nampak kelompok-kelompok badan perjuangan yang anggota-anggotanya berasal dari lingkungan tempat tinggal yang relatif sama. Pemuda yang umurnya baru mencapai belasan tahun, dalam kondisi tertentu sering dilibatkan dalam badan perjuangan dengan tugas khusus; seperti membantu dalam menyampaikan pesan atau tugas kurir.

Organisasi perjuangan dan kelaskaran secara spontan berkembang pesat. Dengan menjadi anggata suatu organisasi perjuangan, dalam dada pemuda tumbuh rasa bangga. Kegiatan dalam organisasi menjadi tempat penyaluran dinamika jiwa mudanya yang telah lama tertekan dalam kungkungan penjajah. Semangat dari jiwa merdeka menjadi penggerak utama dari pemuda, sehingga dalam melakukan perjuangan; pemuda sering bertindak secara konfrontatif revolusioner. Potensi

yang demikian itu bila dibiarkan akan menjadi tidak terarah. Untuk itu pemerintah memandang perlu adanya tentara yang bersifat nasional di bawah satu komanda Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu dikeluarkan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Kondisi di daerah menentukan perkembangan lain, Tentara Sekutu yang bertugas untuk mengurus tawanan perang dan mengembalikan orang Jepang, telah diikuti oleh NICA. Di lingkungan pabrik, perkebunan, tinggal orang Jepang Sakura, yaitu orang Jepang sipil. Pemuda Kendal membantu mengurus pengembalian arang-orang Jepang. Oleh Hutapea dan kawan-kawan, orang Jepang Sakura di Cepiring, dikumpulkan di Pabrik Gula yang telah dialih fungsikan menjadi peleburan besi. Untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, dan sambil menunggu perintah pengiriman tahanan Sakura ke Semarang; dilakukan peniagaan oleh BKR Cepiring yang dibantu oleh laskar rakyat. Dengan menggunakan kereta api, sejumlah 400 orang Jepang diangkut ke Semarang. Terkecuali bala tentara Jepang yang berstatus pimpinan yang jumlahnya 13 orang tetap ditahan dan ditempatkan di rumah panggung di muka pasar Cepiring. Penahanan ini dimaksudkan untuk mengatur penyerahan dengan pihak Sekutu.

Sementara itu di Pabrik Kertas Kaliwungu ditahan 53 pemuda Semarang tawanan.[22] Ketegangan yang terjadi antara pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dengan tentara Jepang semakin memanas. Banyak korban berjatuhan, bahkan tentara Jepang bertindak sangat bengis, di luar batas kemanusiaan. Kabar yang dibawa oleh pemuda-pemuda Kendal yang turut membantu pemuda Semarang, dalam Pertempuran Lima Hari; ditambah dengan kedatangan para pengungsi dari Semarang ke Kaliwungu dan sekitarnya, menyebabkan terbakarnya kemarahan rakyat Kaliwungu. Rakyat mendesak kepada BKR Kaliwungu agar Jepang yang masih ditahan "dihabisi" , sebagai pembalasan terhadap kekejaman Jepang dalam pertempuran yang masih berlangsung di Semarang. Di bulan Oktober 1945, suatu sore sebelum maghrib tiba, seluruh tawanan yang ada di Kaliwungu menjadi sasaran kemarahan. Pemuda yang sudah siap dengan segala persenjataan, seperti tombak, pedang, bambu runcing dan semacamnya itu, digunakan untuk

menghabisi seluruh tawanan. Tidak berbeda pula dengan yang terjadi di Cepiring. Tawanan tersebut juga menjadi sasaran balas dendam kemarahan pemuda rakyat. Dua orang sempat melarikan diri, tetapi pada pagi harinya dapat ditangkap oleh laskar rakyat yang kemudian diserahkan kepada BKR.

Pertempuran Lima Hari menyebabkan adanya rasa kegelisahan yang meluas dari masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Belum lagi reda dari kondisi yang demikian itu, kedatangan tentara Sekutu yang seharusnya bertugas mengendalikan situasi, justru diikuti oleh tindakan-tindakan yang memperkeruh keadaan, sehingga Panglima Keamanan Rakyat (TKR) Supriyadi dari Jakarta datang ke Semarang merundingkan perlucutan senjata dengan tentara pendudukan Inggris. Pada akhir bulan Oktaber 1945 pertempuran kembali meletus, dan meluas sampai di Magelang. Untuk menenteramkan suasana, Presiden Sukarno datang secara khusus.[23]

Badan-badan perjuangan dari berbagai penjuru memberikan bantuan ke Semarang, dengan mengirim pemuda pejuang, akomadasi dan kelengkapan lainnya. Untuk itu di Kendal pada bulan Nopember 1945 dibentuk Markas Umum, yang bermarkas di Kawedanan Kaliwungu dengan pimpinan Mohammad Kasan. Badan ini berperan menjadi pusat komando dan koordinasi dari badan-badan perjuangan. Dengan pimpinan yang sama badan ini kemudian disempurnakan menjadi Dewan Perjuangan Kendal. Dengan demikian daerah Kaliwungu dan Tugu pada masa tersebut sebagai salah satu daerah terdepan yang berhadapan langsung dengan kekuatan lawan, yang kemudian menjadi basis pertahanan dari Markas Medan Barat (MMB). Di samping berperan sebagai daerah koardinasi badan-badan perjuangan, Kaliwungu juga sebagai daerah tujuan pengungsi dari penduduk kota yang mencari tempat aman. Para pengungsi meninggalkan rumahnya secara mendadak, tergesa-gesa tanpa sempat membawa kelengkapan kebutuhannnya. Tidak sedikit dari mereka yang datang tanpa perbekalan, dan secara spontan mereka diterima oleh masyarakat Kaliwungu. Para pengungsi ada yang langsung ikut menumpang pada suatu keluarga. sementara bagi sebagian dari mereka dibantu oleh markas umum untuk memperoleh tempat mengungsi.

3.2.1 Gerakan Daulat Rakyat

Gerak roda revolusi bergulir mengikuti iramanya, mendobrak setiap kemapanan yang merintanginya. Birokrasi sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah, mengalami gerak perubahan yang sangat lamban bahkan cenderung mandeg, yang menurut pelaku pejuang merupakan penghalang bagi terwujudnya cita -cita proklamasi. Penilaian yang demikian itu sangat dipengaruhi tindakan, peran dan respons birokrasi dalam menghadapi perubahan di masa sebelumnya. Kecenderungan yang ada pada birokrasi adalah mempertahankan status quo, dengan toleransi perubahan yang sangat evolusionis. Sementara itu akselerasi gerak pelaku-pelaku birokrasi sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Di Kendal pamong praja tidak segera menangkap semangat revolusi, sehingga anggota-anggotanya telah diganti oleh rakyat dengan orang lain dari daerah itu.[24] Hal itu mencerminkan kurang selarasnya gerak birokrasi dengan kehendak rakyat. Kedudukan para pemimpin penyelenggara pemerintahan mulai pejabat bupati sampai lurah desa banyak yang diberhentikan. Kedudukan mereka yang secara otomatis seperti masa sebelumnya, begitu memasuki alam kemerdekaan, digugat aleh para pemuda. Birokrat pada masa sebelumnya dianggap telah merugikan rakyat.

Gerakan pendaulatan dipelopori oleh pemuda yang tergabung dalam Minari, yaitu ikatan mahasiswa sekolah tinggi yang dikirim dan dipersiapkan oleh pemuda pejuang di pusat untuk mempersiapkan dan mempelopori pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang, terutama terhadap aset yang vital seperti Pabrik Gula Cepiring yang telah dialihfungsikan menjadi Pabrik Pengecoran Besi untuk pembuatan senjata. Gerakan pemuda eks Minari mendapat dukungan dari pemuda pejuang, kelaskaran dan organisasi lainnya, menuntut adanya penggantian pejabat bupati, wedono sampai lurah yang dianggap tidak mempunyai jiwa yang sejalan dengan cita-cita proklamasi. Pada tanggal 17 Nopember 1945 berkumpulah pemuda-pemuda pejuang tersebut di alun-alun Kabupaten Kendal. Mereka melakukan rapat yang dipimpin oleh Soekarmo. Rapat mengambil dan menetapkan keputusan;

Pertama, memberhentikan Bupati R. Koesoemohoedojo sebagai Bupati Kendal.

Kedua, menunjuk Soekarmo sebagai Bupati Kendal, dengan Patihnya Partoikromo

Adapun yang ditunjuk sebagai Wedono adalah sebagai berikut :

Sebagai Wedono Kendal	:	M. Soesatio
Sebagai Wedono Weleri	:	Hadiwinoto
Sebagai Wedono Boja	:	Mardihadi
Sebagai Wedono Kaliwungu	:	Iskandar Martowidagdo
Sebagai Wedono Sukorejo	:	S. Soerjowidagdo

Selesai rapat, massa dibubarkan. Soekarmo dan beberapa pemuda yang ditunjuk sebagai perwakilan menemui R. Koesoemohoedojo agar menyerahkan kekuasaan. Bupati Kendal R. Koesoemohoedojo memberikan jawaban, bahwa ia dapat menyerahkan jabatannya hanya kepada pemerintah pusat. Untuk menjaga reaksi rakyat atas jawaban tersebut, R. Koesoehoedojo dan keluarganya diamankan di Pabrik Gula Cepiring. Gerakan itu diikuti dengan pemberhentian para asisten wedono sampai dengan lurah yang pada masa pendudukan Jepang dianggap telah turut menindas rakyat. Beberapa orang pejabat yang dapat melindungi rakyat, tetap dapat melangsungkan jabatannya. Gerakan ini berjalan tanpa menimbulkan bentrokan. Hal ini memperlihatkan betapa dasyatnya kekuatan rakyat yang secara bulat, menyatukan sikap untuk memberhentikan pemegang birokrasi rezim sebelumnya. Di sisi lain, selama memegang jabatan, person-personnya tidak mampu mengembangkan pengaruh kekuasaannya ke dalam masyarakat. Paling tidak mengembangkan akar kekuatan pada lingkungan kelompok birokrasi. Keterikatan di antara pemegang kekuasaan tampak lemah, yang kemungkinan disebabkan oleh tingkat imbalan keuntungan yang mereka dapatkan dari tentara pendudukan Jepang tidak memadai. Faktor yang lain adalah pada penunjukan yang memaksa, sehingga dalam pelaksanaan tugas dijalankankannya dengan sekedar dapat berjalan. Hal ini terbukti di Kendal pada masa pendudukan Jepang tidak terjadi gerakan yang disebabkan oleh keresahan yang meluas. Di beberapa desa memang terjadi penangkapan terhadap lurah oleh *kempetai* yang dianggap menjadi mata-mata kekuatan musuh, namun kekejaman semacam itu dilakukan oleh tentara Jepang; bukan oleh pimpinan pribumi.

Strategi pendaulatan kekuasaan dimulai pada sumber kekuasaan jabatan yang strategis dan tepat, yaitu dari jabatan bupati. Dengan demikian kekuatan jabatan di bawahnya secara psikologis harus tunduk pada kemauan rakyat yang telah terbukti mampu melakukan pendobrakan terhadap struktur di atasnya. Proses penggantian pangreh praja berlangsung secara damai, sedang perlakuan terhadap person yang diganti tetap memperlihatkan adanya rasa hormat. Walau telah dilakukan penggantian terhadap pangreh praja, seperti di Sukorejo masih terjadi ketidakpuasan terhadap wedono yang baru bernama S. Soeriowidagdo. Rakyat menghendaki agar wedono tersebut diganti. Untuk memenuhi tuntutan rakyat Sukorejo, S. Soeriowidagdo dipindahkan ke Kabupaten Kendal, diganti dengan Iskandar Martowidagdo; seorang Wedono Kaliwungu. Adapun Wedono Kaliwungu ditetapkan Oepoyo Prawirodilogo.

Bupati Kendal dengan aparatnya yang merupakan pejabat baru, segera mengatur jalannya pemerintahan. Beberapa tindakan untuk memelihara jiwa kejuangan disosialisakan, seperti penggantian sebutan *ndoro* dengan pak, atau dengan sebutan bung. Kemudian kepada rakyat diharuskan memakai lencana merah putih pada dada kiri atas serta penggunaan salam pekik merdeka. Tugas pemerintahaan yang baru saja terbentuk itu mengurus soal-soal pemerintahan, serta memperkuat pertahanan dalam membantu perlawanan terhadap kekuatan yang datang dari luar.

Kyai Hisam. Sementara itu di kampung Pesantren di Krajan Wetan Kaliwungu, rumah Nasikhin dijadikan sebagai dapur umum. Peran desa-desa di sekitar Kaliwungu pada masa tersebut, menjadi penting. Di samping sebagai daerah koordinasi terdepan dalam pertahanan di MMB, dan penyelenggaraan dapur umum; desa-desa tersebut juga menampung pengungsi dari kota. Logistik untuk kepentingan tentara mendapatkan drop-dropan dari pemerintah. Bahan logistik disimpan di rumah Kyai Maksum di Krajan Kulon. Di samping sebagai tempat menyimpan logistik, rumah tersebut juga digunakan untuk gudang amunisi dari MMB.

Penyelenggaraan dapur umum ini mendapat dukungan yang luas dari seluruh anggota masyarakat. Ulama Kaliwungu berperan

penting dalam penyediaan bahan pangan. Mereka juga berperan menumbuhkan motivasi berjuang. Tidak sedikit dari mereka yang rumahnya dijadikan sebagai markas dan tempat pengungsian, bahkan mereka memegang pimpinan dalam kelaskaran seperti dari laskar Hisbullah dan laskar Sabilillah. Dalam hal pengumpulan bahan-bahan pangan dari masyarakat, Ulama mengumpulkan hasil panen dan zakat mal, yang kemudian diserahkan di dapur umum. Besarnya bantuan mendasarkan pada kesadaran masyarakat, tanpa memberikan kriteria tertentu.[26] Namun demikian, sumbangan itu terus mengalir; baik berupa beras, sayur mayur atau apa saja yang dihasilkan oleh petani. Sementara itu nelayan menyerahkan ikan asin, garam dan semacamnya. Bahan-bahan tersebut di dapur umum dimasak oleh wanita, yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja putri. Kemudian mereka juga mempersiapkan bungkusan yang dikenal dengan *nuk-nuk,* dilengkapi dengan sayur ataupun lauk berupa tempe, tahu, gereh, krupuk, dan kadang-kadang ada daging. *Nuk-nuk* tersebut dimasukkan ke dalam kranjang diangkut dengan truk atau kereta api. Sesampai di Karanganyar, dibawa ke Semarang untuk memberi makan pasukan gerilya.

Peranan ulama secara umum dalam masyarakat dapat dikemukakanan, bahwa ulama pada setiap kesempatan selalu memberikan dorongan untuk berjuang. Kesempatan berdakwah, berkotbah di masjid serta pertemuan pengajian; digunakan oleh ulama untuk mendorong keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat jihad terus ditanamkan, sehinga pemuda tidak takut mati, karena mati dalam berjuang adalah sebagai syuhada dan langsung masuk surga. Pada saat pemuda Hisbullah Sabilillah akan berangkat ke medan, berkumpul terlebih dahulu di rumah kyai. Kyai memberikan restunya, ditandai dengan pemberian *air putih* yang telah diberi do'a, ataupun pemberian bacaan-bacaan do'a tertentu. Dukungan semacam ini secara psikologis sangat membantu menambah keberanian, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun. Saat berangkat mereka keluar dari rumah kyai secara bersama-sama. Pada kesempatan itu orang-orang tua wanita dan anggota keluarga lain yang-ada di rumah, menyaksikan dan mengantar sambil berdo'a.[27] Menjadi pejuang dengan berangkat ke medan laga, bukan saja memberi

kebanggaan pada dirinya sendiri, melainkan pula terhadap keluarga dan sanak familinya. Menjadi pejuang merupakan peluang untuk mengangkat derajat keluarga berdiri sejajar dengan keluarga terkemuka lain di lingkungannya, yang selama masa penjajahan perasaan pada kedudukan sederajat sulit untuk diperoleh. Pada masa itu ada anggapan', bahwa menjadi pejuang merupakan kebanggaan setiap pemuda.

Pasukan-pasukan yang berangkat dari Kaliwungu menuju Pos Tugu dan Mangkang dengan naik kereta api, turun di Karanganyar dilanjutkan dengan jalan kaki. Sering kereta api yang menghantar pasukan itu, berjalannya mundur. Loko penggerak gerbong ada di belakang, berjalan mundur, dengan suatu perhitungan apabila secara mendadak ada serangan dari timur yang dilakukan oleh tentara Belanda, kereta akan dengan segera dapat dijalankan maju ke depan menuju arah Kaliwungu untuk menyelamatkan pasukan. Apabila ada anggota pejuang yang sampai gugur di pertempuran, dibawa kembali ke Kaliwungu. Jenazah di semayamkan di Masjid Kaliwungu. dan diberangkatkan dari halaman masjid ke pemakaman. Kesempatan semacam itu akan dihadiri oleh ribuan rakyat. yang menyatakan rasa bela sungkawa. Suasana kebersamaan dalam menghadapi akibat tindak kekejaman musuh, menumbuhkan rasa solidaritas di antara rakyat dari berbagai golongan yang semakin kuat. Pemberangkatan jenasah juga mendapat kehormatan secara militer, yakni kerandanya ditutup dengan bendera merah putih. Dengan menyaksikan suasana yang demikian itu, secara empirik memberikan pembenaran terhadap ucapan ulama; bahwa pemuda pejuang yang gugur di medan pertempuran adalah sebagai syuhada.

Dalam menjalankan perannya sebagai basis koordinasi pertahanan, Kaliwungu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Kendal. Di samping bantuan pasukan, juga mendapatkan bantuan akomodasi dari masyarakat Cepiring, Weleri dan Kendal pada umumnya. Bantuan-bantuan itu dikoordinasi oleh laskar setempat yang bekerjasama dengan lurah. Setelah bantuan terkumpul, kemudian diangkut dengan menggunakan kereta api, truk, dokar atau gerobak. Daerah Kendal di luar garis pertahanan terdepan, dalam situasi aman dan dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri; mengingat bahwa

persawahan menghampar di daerah tersebut. Dengan demikian bantuan akomodasi tersebut dikeluarkan oleh rakyat yang dalam kondisi yang relatif telah dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Desa-desa di daerah Kendal tersebut menjadi penopang mengalirnya bantuan akomodasi ke daerah koordinasi pertahanan, yang kemudian digunakan untuk suplai terhadap pejuang yang ada di garis depan.

Datangnya pengungsi dari Semarang yang masuk di daerah Kaliwungu, telah menambah keharusan untuk tersedianya barang kebutuhan; termasuk di antaranya akamodasi. Dengan adanya dukungan dari daerah Kendal lainnya seperti disebutkan di atas., menjadikan keberlangsungan kebutuhan hidup di Kaliwungu tetap berjalan. Diakui oleh beberapa informan bahwa kebanyakan pengungsi dari golongan yang relatif berada, sehingga tidak terlalu memberatkan bagi penduduk yang ditumpanginya. Mereka hanya menumpang tempat tinggal, sementara kebutuhan hidupnya dicukupi sendiri. Bekal bawaan kalau dipakai terus menerus akan menipis, maka keadaan memaksa untuk melakukan adaptasi. Banyak dari mereka di tempat pengungsian, kemudian bergabung dengan kelaskaran. Ada yang bekerja sebagai pedagang ataupun melakukan pekerjaan apa saja demi kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun, kedatangan pengungsi telah menambah kebutuhan akomodasi yang harus ada di daerah Kaliwungu, sementara dalam kondisi biasa daerah harus menyediakan kebutuhan akomodasi untuk penduduknya.

3.2.2 Daerah Kendal Sebagai Basis Markas Medan Barat

Perundingan antara RI dengan pihak Sekutu mengenai pengangkutan tawanan perang pada tanggal 1 April 1946 telah mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya *Jogja Agreement.* Di Semarang pada tanggal 17 Mei 1946 Brigade "T" KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger*) mengambil alih kamando tentara pendudukan dari Sekutu. Tentara Sekutu secara keseluruhan ditarik dari Jawa Tengah, dan Semarang diduduki oleh Belanda. Dengan kekuatan 3 batalion yang didaratkan sebelum terjadinya pengambilalihan komando, Belanda mengubah Semarang menjadi Suatu Sistim pertahanan yang kuat.

Adanya kenyataan tersebut, pasukan kita melancarkan serangan-serangan untuk membatasi ruang gerak Belanda. Mulai tanggal 25 Mei 1946 gerak pasukan kita dilakukan dari semua sektor. Di sektor selatan pasukan kita berhasil menduduki Jatingaleh, sementara di sektor barat tembakan metraliur berat kita setiap saat dapat mengancam lapangan terbang Kalibanteng. Kolonel Soenarto Koesoemodirdjo sebagai pimpinan Markas Pimpinan Pertempuran (MPP) Jawa Tengah, pada tanggal 1 Juni 1946 mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para Komandan Sektor dan Komandan Resimen Jawa Tengah. Sidang berhasil menyusun suatu pedoman kerja, yang antara lain menyepakati bahwa sistim perlawanan terhadap Belanda yang ada di kota Semarang merupakan perlawanan rakyat, dengan TRI sebagai intinya. Untuk itu diadakan pembagian sektor perlawanan. Daerah operasi Markas Medan Barat (MMB) meliputi daerah Gunungpati, Ngaliyan, Jrakah sampai ke Pantai. MMB dibagi menjadi dua sektor; yaitu Sektor Markas Medan Barat Daya yang bermakas di Boja dan Sektor Markas Medan Barat Laut yang bermarkas di Kaliwungu.

Pada mulanya MMB dipegang oleh pasukan dari Kendal dengan inti resimen 24 Kendal. Oleh karena resimen 24 pimpinan Letkol. S. Soediarto pada bulan Agustus 1946 dipindah ke MMT, maka MMB digantikan oleh Resimen dari Purwokerto dipimpin oleh Letkol. Moch. Bakhrun. Mereka berjuang bersama-sama. dengan badan-badan perjuangan yang ada di Kendal, dibantu dengan badan-badan perjuangan yang datang dari daerah lain.

Susunan Resimen 24 Kendal mengalami perubahan. Bermula dari ditetapkannya Jendral Mayor Soetarto sebagai Panglima Devisi IV. Formasi pasukan Resimen 24 Kendal sbb:

- Resimen 2/Devisi IV : Letkol Hendroprawoto. Kastaf Soejadi, (membawahi 4 batalyon).

1. Batalyon V (Boja) dbp Mayor Prawoto
   - Ki I Letnan Satu (Lettu) Soemadi
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Bedor
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Soewito

2. Batalyon VI (Kaliwungu) dbp Mayor S.Soediarto
   - Ki I Letnan Satu (Lettu) Rasmin
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Alwi
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Scedarmanto
3. Batalyon VII (Weleri) dbp Mayor Widagdo
   - Ki I Letnan Satu (Lettu) Sadono
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Darmo
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Soediak
4. Batalyon VIII (Sukorejo) dbp Mayor Purnawi
   - Ki 1 Letnan Satu (Lettu) Moh. Laval
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Iskandar
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Boediman

Dengan diangkatnya Mayor Prawoto menjadi Komandan Batalyon V di Boja, maka didatangkan pasukan C.P.M. (P.T) baru dari MMT Demak dibawah pimpinan Kapten Imam Bardjo untuk membentuk Detasemen C.P.T di daerah Kendal. Pada tanggal 1 Pebruari terbentuk Detasemen 221, yang meliputi Sub Detasemen 221/I di kaliwungu - Mangkang, Sub Detasemen 221/II di Boja, Gunungpati, Kedungbegal, dan Sub Detasemen 221/III di Weleri, Sukorejo.

Perkembangan baru dalam Resimen 24, sehingga susunan formati menjadi sebagai berikut

- Resimen 2/ Devisi IV Letkol S. Soediarto. Kastaf. Mayor Soejadi (membawahi 4 batalyon)

1. Batalyon IV dbp Mayor Purnawi Purnomohadi
   - Ki 1 Letnan Satu (Lettu) Moh. Laval
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Iskandar
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Boediman
2. Batalyon V dbp Mayor Soemartono
   - Ki 1 Letnan Satu (Lettu) Soepandi
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Bedor
   - Ki 3 Kapten Soewito

3. Batalyon VI dbp Mayor Joesmin
   - Ki 1 Kapten Rasmin

- Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Alwi
- Ki 3 Soedarmanto
- Ki 4 Letnan Satu (Lettu) Achmad

4. Batalyon VII Mayor Widagdo
   - Ki I Letnan Satu (Lettu) Sadono
   - Ki 2 Letnan Satu (Lettu) Darmo
   - Ki 3 Letnan Satu (Lettu) Soedjak.

Pada bulan Agustus 1946 Resimen 24 di Kendal mengalami perubahan daerah. Resimen 24 mendapat tugas baru di MMT, sehingga seluruh pasukan harus pindah ke Purwodadi dan Demak.

Pemuda pejuang berupaya menghambat gerak pasukan tentara Belanda dengan membuat perintangan jalan yang diperkirakan akan dilalui. Pahon-pohon ditumbangkan, jembatan diputus dan fasilitas perkantoran dibumihanguskan. Keadaan pemerintah Kabupaten Kendal dipandang tidak aman lagi. maka pada tanggal 30 Juli 1947 dipindahkan di Weleri dibawah pimpinan Patih Kendal S. Kartoikromo. Sementara itu Bupati Kendal Soekarmo terus sibuk memimpin pertahanan dan keamanan dengan kelaskaran dan TNI. Setelah itu tentara Belanda menduduki Kaliwungu, pada tanggal 1 Agustus 1947 melalui jalan sebelah selatan, lewat desa Sidorejo, Putat, Pegandon, Gemuh masuk ke Weleri. Jalan tersebut terpaksa ditempuh karena jembatan yang berada di jalan utama telah dihancurka. Belanda menggunakan komplek Pabrik Gula Cepiring sebagai markasnya. Baru pada tanggal 2 Agustus 1947 tentara Belanda masuk di Kendal.

Setelah Weleri diduduki Belanda, Pemerintah Kabupaten Kendal dipindahkan ke Sukorejo, menempati Kantor Kawedanan Sukorejo. Pemerintahan di bawah pimpinan Patih Kendal. Wilayah Sukarejo merupakan wilayah selatan Kendal yang kondisi geografisnya berbukit, digunakan untuk menyusun markas pemerintahan sipil maupun militer. Batalion 60 pimpinan Mayor Salamun beserta badan-badan kelaskaran Kendal melakukan konsolidasi. Pos-pos pertahanan dan strategi perlawanan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pos pertahanan TNI menempati pos terdepan di Pageruyung yang terletak 10 Km dari markas Sukorejo, di samping pos pertahanan yang lain

seperti di Dadapayam, Surokonto, Kebon Gembong, Sukomangli dan lain-lainnya. Sesuai dengan keadaan alam perbukitan, posisi tersebut dapat menghadang tentara Belanda yang datang dari arah Weleri. Beberapa kali gerak pasukan Belanda dapat tertahan di pos tersebut, bahkan banyak korban di pihak Belanda. Oleh karena itu pos ini menjadi sasaran serangan tentara Belanda.

Daerah Sukorejo sebagai daerah yang masih dikuasai oleh RI menjadi wilayah yang didatangi oleh arus pengungsi. Para pengungsi mencari tempat tinggal di desa-desa di sekitar Sukorejo, seperti di desa Curugsewu, Krandean, Sidodadi, Sidokumpul, Dongembong dan desa-desa lainnya.[32] Rumah-rumah penduduk di desa tersebut menjadi tempat tinggal baik dari kelaskaran, tentara maupun rakyat biasa. Mereka diterima sebagai anggata keluarga dengan diberi makan sesuai dengan kemampuan mereka. Badan Penolong Pengungsi yang ada di Kendal tidak memperkirakan kalau serangan Belanda begitu tiba-tiba dan secara meluas, sehingga tidak sempat melakukan persiapan untuk mengatur pengungsi.

Tentara pendudukan Belanda yang telah dapat menguasai sebagian besar wilayah Kendal, terus mengejar Pemerintah Kabupaten Kendal untuk dihancurkan. Pemerintah Kabupaten Kendal di Sukorejo yang menempati Kantor Kawedanan pada pagi hari tanggal 17 AgustuS 1947 mendapat serangan udara dari tentara Belanda. Saat tersebut bertepatan dengan persiapan akan diadakannya upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Kantor Kawedanan Sukorejo dan markas pertahanan menjadi sasaran serangan Belanda. Dalam peritiwa tersebut, bom yang dijatuhkan meleset ke sebelah kiri belakang kantor, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.[33] Sukorejo kemudian menjadi incaran serangan Belanda. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kendal dipindahkan ke dukuh Tlagu desa Sukorejo yang dipandang lebih aman.

Pada tanggal 22 Agustus 1947, sejak pagi-pagi pasukan Belanda menyerang Pageruyung dari utara. Kekuatan 1 seksi tentara Belanda dapat dipukul mundur. Pada siang harinya, kembali serangan dilakukan dari arah selatan dan utara. Serangan dari arah selatan tersebut dengan menggunakan truk dan sepeda motor, dapat

menembus pertahanan sampai di Dadapayam. Pada saat yang sama tentara Belanda di Pageruyung menghadapi pertahana dari TNI dan kelaskaran, sehingga pada sore harinya tentara Belanda dipaksa untuk mundur kembali.

Belanda kembali melakukan penyerangan ke Sukorejo, Plantungan dan Pageruyung. Serangan pada tanggal 29 Agustsu 1947 tersebut banyak jatuh korban, terutama menimpa penduduk. Pertempuran berlangsung hingga larut malam, dan Belanda dipukul mundur dari Sukorejo; tetapi berhasil merebut Perkebunan Sukomangli.

Dalam kondisi yang demikian itu, mengharuskan adanya koordinasi dan penggalangan kekuatan, maka pada tanggal 1 September 1947 Bupati Kendal Soekarno menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Kyai Biru.[34] Pasuka ini bekerjasama dengan TNI dalam menyaring informasi mengenai kekuatan musuh, dan juga melakukan kegiatan sabotase terhadap musuh. Pembentukan Pasukan Kyai Biru diikuti oleh terbentuknya pasukan-pasukan lainnya di daerah yang telah dikuasai oleh musuh, seperti Pasukan Kemangi yang bergerak di daerah Cepiring dipimpin oleh musuh, seperti Pasukan Sudjahri Diposoegondo; kemudian pasukan Kyai Gembyang yang bergerak disekitar kota Kendal dibawah pimpinan Djumron Soedibjo.[35] Pembentukan pasukan-pasukan tersebut pertanggungan jawabannya kepada Residen Kedu dan Komandan Sektor Pertahanan Kedu Utara dibawah pimpinan Letkol Sarbini. Hal ini ditempuh, mengingat sulitnya komunikasi dengan pusat pemerintah Karesidenan Semarang yang berkedudukan di Purwodadi.[36] Pasukan memperoleh bantuan pembiayaan dari dewan Pertahanan Daerah Kedu dan Dewan Pertahana Negara Pusat, disamping pula bantuan dari rakyat berupa bahan pangan seperti beras, garam, gula, sayur-mayur dan sebagainya.

Pengorganisasian Pasukan Kyai Biru terdiri dari dua bagian, yaitu :

1) Bagian A, merupakan bagian yang mempunyai tugas mengadakan hubungan dengan daerah yang telah diduduki Belanda, menanamkan jiwa perlawanan, mengadakan sabotase

dan menyaring informasi untuk kepentingan militer dan pemerintah.

2) Bagian B dan BB, merupakan bagian yang bertugas di front membantu TNI mempertahakan daerah Kendal dan Daerah Kedu Utara.

Bagian B terdiri dari para pemuda dan pelajar, sedangkan bagian BB terdiri dari pemberani, dan pencoleng yang pada masa sebelumnya mempunyai reputasi jelek di masyarakat. Pasukan BB dikenal pula sebagai pasukan "P", yang anggota dari kelompok ini kegiatannya diarahkan untuk kepentingan republik. Pasukan B terdiri dari seksi 77 dan seksi 99. Pasukan Kyai Biru dipimpin oleh Bupati Kendal Soekarmo, dengan pembantu pimpinan S. Kartodikromo. Sementara itu Kamandan pasukan adalah sbb

a. Hardjano sebagai Komandan bagian A
b. Abimanju Sadiman sebagai Komandan bagian B
c. Pimpinan pasukan BB adalah Sarpani, K. Harsojo dan Asmogimun

Markas Pasukan Kyai Biru berada di desa Manggung, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dengan daerah operasi di daerah lereng utara gunung Prahu, Tretep sampai di Plantungan. Pasukan memperoleh latihan dan penggemblengan tentang taktis gerilya dari Batalion 60 di desa Lempuyangan Kecamatan Candiroto. Adapun markas kompi terletak di desa Candikan Kecamatan Batok, dengan pasukan terdepan di dukuh Kenteng desa Purwosari Kecamatan Sukarejo. Pasukan Kyai Biru melakukan sabotase dan serangan terhadap kedudukan Belanda. Seperti yang pernah dilakukan penyerangan terhadap kedudukan Belanda di pabrik teh Banaran menimbulkan kerugian dan korban, sehingga Belanda terpaksa mengundurkan diri. Kemudian pertempuran di Kediten, penghancuran jembatan di Sukorejo dan penyusupan yang dilakukan oleh pasukan A di daerah Boja.[38]

Dalam menjalankan operasinya Pasukan Kyai Biru bekerjasama dengan TNI pimpinan Mayor Salamun. Kerjasama tersebut terjalin dalam perisiwa-peristiwa, seperti 5 September 1947 ketika Pasukan

Kyai Biru dengan TNI mempertahankan Sukorejo dari gempuran Belanda. Karena tidak seimbangnya persenjataan, maka Sukorejo dapat diduduki Belanda, sementara pertahanan pasukan mundur ke dukuh Kenjuran, desa Purwosari, kecamatan Sukorejo yang terletak di kaki gunung Prahu. Markas di Kenjuran digunakan untuk menyusun strategi dalam menghadapi Belanda yang ada di Sukarejo. Kontak-kantak senjata yang pecah pada tanggal 14 September dan 21 September 1947 di daerah Sukorejo, merupakan upaya menegakkan pertahanan. Oleh karena markas di Kenjuran selalu mendapatkan ancaman serangan Belanda, maka markas dan kantor pemerintahan dipindahkan di desa Banaran yang termasuk Kabupaten Temanggung. Adapun kantor Kabupaten Kendal dipindahkan lagi ke dalam kota Temanggung dengan menumpang di sebagian Kantor Kejaksaan Negri.

Markas Kenjuran kemudian menjadi sasaran dari serangan Belanda. Pada suatu hari di bulan Oktober diperoleh suatu informasi bahwa pasukan Belanda dalam jumlah yang besar mulai bergerak menuju markas Kenjuran. Atas informasi tersebut, Pasukan Kyai Biru dibantu dengan lima orang Jepang; mengadakan persiapan dengan mengambil tempat yang strategis di atas bukit di Bringinsari. Dengan posisi tersebut, dapat melihat gerak pasukan Belanda yang sedang menuju ke markas Kenjuruan. Segala persiapan dilakukan, sambil menunggu sampainya posisi musuh pada jarak sergap. Sergapan yang dilakukan secara mendadak, telah menyebabkan jatuhnya korban di pihak tentara Belanda. Dalam situasi yang demikian itu, Belanda bergerak mundur sambil melindungi diri. Serangan gencar terus dilakukan terhadap tentara yang sedang mundur tersebut. Berak pasukan gerilya terhenti dan terpaksa mengambil sikap mundur setelah tentara Belanda memperoleh bantuan perlindungan dari pesawat udara.

Tidak lama dari peristiwa tersebut, Belanda mengerahkan kembali tentaranya dengan menggunakan jalur yang lain, melalui dukuh Gepor, desa Mulyoharjo. Informasi gerak pasukan tersebut diketahui oleh Pasukan Kyai Biru dan TNI. Untuk itu diambil tindakan persiapan-persiapan dengan mempersipakan diri mengambil posisi strategis Akhir dari kontak senjata, pasukan Belanda dapat dipukul mundur dengan meninggalkan korban.[39]

Kaki gunung Prahu yang berbukit merupakan faktor alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang strategi pertahanan gerilya. Dengan penguasaan kondisi alam yang demikian., dapat melihat gerak pasukan musuh, menyerang secara mendadak dalam jarak dekat, dan dapat bergerak mundur menghindari jatuhnya karban dalam waktu yang cepat. Strategi tersebut ditempuh berdasarkan pada pertimbangan adanya ketidakseimbangan sistim persenjataan yang dimiliki. Walau demikian, sistim persenjataan. Belanda dapat diimbangi oleh penerapan sistim gerilya dan keunggulan penguasaan medan dengan didasari oleh semangat pantang menyerah. Peritiwa-peristiwa tersebut telah menimbulkan korban yang tidak kecil bagi Belanda, maka gerakan pasukan dan patroli Belanda di Sukorejo bagian selatan kemudian menjadi jarang dilakukan..

Pasukan Belanda yang berkedudukan di Sukorejo, terus mengamankan daerah yang telah didudukinya. Daerah Kecamatan Plantungan yang sampai bulan Desember 1947 masih berada dalam lingkungan Republik, pada tanggal 20 Desember diserang dari tiga jurusan, yaitu dari Sukorejo, Tersono dan Bawang. Pasukan Kyai Biru mengambil sikap mundur ke desa Wonodadi. Pemerintah Kecamatan Plantungan dipindahkan ke dukuh Kalanggengan, desa Tlogapayung. Tentara Belanda menduduki Plantungan dan menggunakan bekas Kecamatan di Wonokambang sebagai markasnya. Markas di Wanodadi mendapat incaran dari Belanda dengan melakukan patroli. Karena letak Wonodadi yang kurang menguntungkan, markas dipindahkan di Senting-Gunung dengan pos terdepan di Kediten. Kedudukan pos terdepan tersebut dapat diketahui oleh Belanda, dan pada tanggal 25 Desember 1947 pos Kediten diserang kemudian diduduki, sementara pasukan gerilya mundur kembali di Genting-Gunung.

Gelora perjuangan yang terjadi di daerah Kendal, tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa secara nasional. Sejalan dengan itu, Perjanjian Renville yang tercapai pada tanggal 17 Januari 1948 ; menentukan irama gerak perjuangan di kemudian. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Renville, di Sukorejo pada hari Sabtu tanggal 25 januari 1948 pukul 09.30 diadakan perundingan antara Komandan Republik dengan Belanda di bawah pengawasan anggota Staf

KTN Kal. Crowes. Rombongan Republik dikepalai oleh Kol. Sarbini sedang Belanda dipimpin oleh Letkol de Vries. Perundingan membicarakan tentang pokok-pokok penyelesaian *cease fire* dan hal-hal mengenai teknik dari pelaksanaan tembak-menembak. Anggota perundingan yang lain dari pihak Republik, yaitu Letkol Sukandar, Mayor Seno, Mayor A. Yani, Bupati Kendal Soekarmo dan Patih Temanggung.

Mengingat hampir sebagian wilayah Kabupaten Kendal menjadi daerah pendudukan Belanda, maka Pasukan Kyai Biru dikembalikan kepada induk pasukannya. Tinggal 7 desa di Kendal yang benar-benar dikuasai oleh Republik, yaitu 5 desa di Kecamatan Sukorejo; yaitu desa Purwosari, Bringinsari, Genting Gunung, Hariodowo dan Ngargosasi, dan dua desa di Kecamatan Plantungan, yaitu desa Kediten dan Blumah.[41] Untuk itu anggota pasukan yang berasal dari pelajar memasuki dunia pendidikan kembali, anggota yang berasal dari pegawai masuk ke dalam Jawatannya, dan pemuda pejuang-kelaskaran disalurkan ke dalam kesatuan Tentara, Polisi dan sebagainya. Staf Kabupaten Kendal tetap masih mengungsi di Temanggung. Tenaga pegawai staf Kabupaten Kendal, ada yang diperbantukan kepada pemerintah pendudukan dengan maksud membina lingkungan berjiwa republiken, untuk mengetahui kondisi Belanda, dan tidak jarang pula yang ditugaskan di tengah-tengah masyarakat untuk tetap mengobarkan semangat perjuangan.

3.4 Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Pelaksanaan Persetujuan Renville

Seperti diuraikan di atas bahwa hasil Persetujuan Renville menyebabkan hampir seluruh daerah Kabupaten Kendal menjadi daerah pendudukan Belanda. Hanya 7 desa, yaitu 5 desa berada di Kecamatan Sukorejo, dan 2 desa berada di Kecamatan Plantungan masih tetap berada dalam kekuasaan Republik. Di samping ke 7 desa tersebut, terdapat 13 desa di sekitarnya yang menjadi daerah pendudukan; akan tetapi tetap membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia. Batas wilayah pendudukan Belanda dengan Republik ditentukan oleh garis yang disebut Garis Demarkasi atau

Garis Status Quo, yaitu garis batas wilayah yang penentuannya berdasar pada penguasaan wilayah sampai dengan menjelang ditandatangani Persetujuan Renville. Pada saat delegasi persetujuan berunding, tentara Belanda terus berusaha melebarkan wilayah penguasaannya.

Dengan demikian-wilayah Kabupaten Kendal hampir secara keseluruhannya menjadi daerah pendudukan Belanda. Mengingat kekuasaan terhadap wilayah Kabupaten Kendal hasil Persetujuan Renville tersebut, maka ditetapkan pemerintah Kabupaten Kendal tetap terus berada di Kota Temanggung.

Tindakan tentara Belanda terhadap daerah pendudukan yang baru saja dapat dikuasai, tetap melanjutkan pada penerapan tindakan membujuk dan menekan. Sasaran tindakan penekanan diarahkan kepada tokoh masyarakat, baik pimpinan formal atau informal. Bagi desa yang kepala desa atau lurahnya ikut mengungsi bersama Republik, dilakukan penggantian lurah dengan cara menunjuk seseorang yang dipandang dapat membantu tentara pendudukan. Seperti yang terjadi di desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, karena lurah Kusen mengikuti Republik; tentara pendudukan menunjuk orang desa tersebut bernama Sumandri menjadi lurah.[42] Adapun terhadap lurah yang diketahui mempunyai hubungan dengan republik dilakukan penangkapan dan kemudian dipenjara. Lurah hasil tunjukan tentara pendudukan, berdasarkan pada penggunaan kekuasaan-jabatannya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Pertama, lurah yang menerima pengangkatan tersebut akan tetapi tetap memperhatikan kepentingan republik, dengan tetap melindungi kepentingan rakyatnya. Kedua, lurah yang menerima pengangkatan dan menggunakan kesempatan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau bahkan untuk melakukan balas dendam terhadap orang lain yang dianggap sebagai musuh. Tindakan lurah pada masa pendudukan menjadi faktor penentu terhadap perlakuan balas dendam yang terjadi kemudian pada saat kekuatan republik berhasil menyusup ke desa-desa di Kendal. Tindak balas terhadap lurah yang bekerjasama secara penuh dengan tentara pendudukan Belanda, berbeda dengan tindak balas pada lurah yang diangkat oleh Jepang. Gerakan

pendaulatan untuk mengganti lurah pada masa awal kemerdekaan berlangsung secara damai tanpa menimbulkan korban jiwa, sedangkan gerak penyusupan pejuang republik di desa-desa di Kendal sekitar agresi ke 2; memakan korban jiwa. Lurah Triharjo bernama Asari diangkat oleh Belanda pada tahun 1945, dibunuh oleh pemuda karena mengkhianati perjuangan dengan menunjukkah pos-pos pasukan RI yang ada di desa Sojomerto. Lurah desa lain yang pro terhadap Belanda, seperti lurah desa Pamriyan dan lurah desa Blorok mengalami nasib yang sama.

Tentara pendudukan juga melakukan gerakan pembersihan berupa penangkapan terhadap pimpinan masyarakat, pemuda pejuang yang berjiwa republik untuk kemudian dikirim ke dalam penjara. Sementara itu tindakan pembujukan dilakukan dengan upaya untuk memikat hati rakyat, yang antara lain berupa mencukupi kebutuhan rakyat, membangun jalan-jalan yang rusak, memperbaiki bangunan pemerintah yang rusak, membuka kembali sekolah-sekolah, memenuhi kebutuhan sekolah dan sebagainya. Dengan demikian di daerah Kendal yang relatif lebih dahulu dikontrol oleh tentara pendudukan, terutama di daerah Kendal bagian utara, berlangsung kehidupan yang relatif makmur, mengingat daerah ini juga merupakan daerah persawahan.

Di sekitar daerah garis demarkasi, hubungan antara Republik dengan penduduk di daerah pendudukan terus berlangsung. Pejuang republik menyamar sebagai penduduk biasa untuk masuk wilayah pendudukan. Sementara itu penerapan uang di wilayah pendudukan, dapat ditembus melalui bantuan orang-orang yang berjiwa republik yang tinggal di wilayah pendudukan; yaitu dengan cara menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhannya ditukar dengan barang bawaan atau dibayar dengan uang republik. Tidak sedikit barang kebutuhan yang dibantukan secara penuh.[43] Dalam perjuangan telah terbukti bahwa wilayah daerah administrasi tertembus oleh kepentingan perjuangan itu sendiri. Rakyat desa di Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Daerah Kendal mempunyai andil jasa yang tidak kecil. Mereka telah ikut menopang memberikan bantuan akomodasi, tempat dan apa yang ada untuk kepentingan perjuangan rakyat dan pemerintah Kabupaten Kendal.

3.5 Peranan Masyarakat Desa di Kendal pada Perang Kemerdekaan

Belanda secara sepihak menyatakan tidak lagi terikat pada Perjanjian Renville, dengan melakukan agresi secara serentak di seluruh wilayah republik mulai jam 05.30 tanggal 19 Desember 1948. Pada sore harinya, Jogjakarta sebagai ibu kota Republik diduduki Belanda. Sebelum terjadinya agresi, Angkatan Perang RI telah menyusun konsep strategi yang tertuang dalam Instruksi Panglima Besar tanggal 9 Nopember 1948 yang dikenal dengan nama Perintah Panglima Besar No. 1 atau Perintah Siasat No. 1. Dalam Perintah Siasat No. I antara lain berisi tentang perubahan sistim pertahanan linier dengan sistim pertahanan wehrkreise.[44] Adanya agresi militer, pada hari itu juga Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Kilat No. 1/PB/D/48. Segenap angkatan segera mengatur diri, mengadakan konsolidasi dan mundur ke daerah pedalaman untuk mempersiapkan perang gerilya, sebagai mana tertuang dalam Perintah Siasat.[45]

Berkaitan dengan situasi yang demikian itu di Temanggung dilakukan aksi bumihangus. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1948 Belanda dapat menduduki Temanggung. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kendal di Temanggung menyingkir masuk kembali ke Wilayah Kendal, dengan perjalanan melalui lereng gunung Sumbing, gunung Sindoro ke gunung Prahu. Pasukan dan pemerintahan sipil yang ada di sebelah timur Temanggung masuk daerah Kendal melalui pegunungan Ungaran.[45] Dengan demikian tidak ada lagi garis demarkasi. Seluruh wilayah menjadi medan pertempuran dengan menerapkan kantang-kantong pertahanan secara bergerilya. Sementara itu Staf Brigade 9 yang berpusat di Magelang, meninggalkan Magelang dalam tiga kelompok; yaitu Staf X, Staf Y dan Staf Z untuk melakukan wingate. Batalion 8 dari pimpinan Mayor Panoedjoe diperintahkan untuk ber-wingate di daerah Kendal dan menyusun daerah Sub Wehrkreise 298 (SWK 296).[47]

Pada tanggal 25 Desember 1948 Markas Besar Komando Djawa mengeluarkan Instruksi Panglima MBKD No.I/MBKD/Mobil/48 yang mengubah organisasi Territorial Jawa menjadi Pemerintahan Militer

sepenuhnya, yang menempatkan kekuasaan pemerintah berada di tangan militer. Pembentukan Pemerintahan militer dimaksudkan agar terbentuk suatu pemerintahan yang tegas, yang dapat membantu pihak militer dalam menghadapi tentara Belanda.

Di Kendal Instruksi Panglima MBKD tertanggal 25 Desember 1948, diikuti oleh pembentukan Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) yang disebut Komando Distrik Militer (KDM) Kendal. Komandan KDM adalah Kapten Sudarmadi dari Batalion Cakrayuda atau Kuda Putih Brigade 9/Divisi 3. Dengan demikian di Kendal terdapat dua staf, yaitu Staf Ketentaraan dan Staf Pemerintahan; yang mempunyai tugas menyelanggarakan *de facto* pertahanan militer, *de facto* pemerintahan dan kesejahteraan. Persoalan yang menyangkut pertahanan militer diserahkan kepada pasukan tempur Batalion Cakrayuda pimpinan Mayor Panoedioe, untuk pemerintahan sipil dan kesejahteraan diserahkan kepada pihak sipil pimpinan Bupati Kendal Soekarmo. Agar kedudukan Pemerintah tidak mudah diketahui oleh musuh, maka pimpinan Pemerintah Sipil dengan stafnya terpisah. Bupati Soekarmo bersama dengan Kamandan KDM Kapten Sudarmadi berada dukuh Dempel, desa Plosogeden, kecamatan Candiroto, sedangkan staf Pemerintahannya berada di dukuh Kenjuran, desa Purwosari, kecamatan Sukorejo.[48]

Terbentuknya PMKB atau KDM diikuti oleh konsolidasi kekuatan TNI dan rakyat untuk melancarkan perang gerilya. Perang gerilya pada hakekatnya adalah perang rakyat semesta dimana rakyat dilibatkan dalam tanggungjawab nasional untuk mencapai kemenangan. Untuk itu dibentuk kelompok pejuang-pejuang sukarela di kalangan rakyat desa. Instruksi Panglima MBKD No. II/MBKD/49 tanggal 25 Djanuari 1949, menginstruksi kan untuk dibentuk Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) di bawah PMKB atau KDM, dengan tugas melakukan penjagaan desa, pengintaian., sabotase, melakukan bumihangus dan menjadi tenaga cadangan tentara dan membantu Kepolisian Militer dalam PMKT (Pemerintah Militer Kecamatan) atau KODM (Komando OnderDistrik Militer). Kecuali terbentuk Pager Desa di setiap desa, terdapat pula pasukan mobil dari Batalion 8 Cakrayuda pimpinan Mayor Panoedjoe. Adapun pembagian daerah operasi dari kesatuan Kuda Putih adalah sbb :

- Kompi 29, Komandan Kapten Sugondo ditugaskan di Kendal bagian barat dengan sasaran utama Kota Kendal dan Weleri.
- Kompi 30, Komandan Kapten Subagio ditugaskan di Kendal bagian timur dengan sasaran utama Boja dan kaliwungu.
- Kompi 31, Komandan kapten Havik Suyono sebagai pasukan cadangan ditugaskan di daerah Temanggung sebelah utara.[49]

Daerah Kabupaten Kendal hampir secara keseluruhan dinyatakan sebagai daerah pendudukan Belanda. Di setiap ibu kota kecamatan, Belanda telah menempatkan markas militer lengkap dengan alat-alat pemerintahannya. Banyak pejabat mulai Wedono sampai lurah merupakan orang hasil tunjukan dari tentara pendudukan Belanda. Pengangkatan Tjitro sebagai Wedono Kendal, Soemodiprodjo sebagai Asisten Wedono Pegandon dan Mantri Polisi Soewarto setelah daerah-daerah tersebut dikuasai oleh tentara pendudukan, sangat merugikan Republik; karena menggunakan kedudukannya untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai dan menjelek-jelek RI.[50]

Orang-orang semacam ini yang menjadi incaran dari gerilya. Bahkan pos gerilya di Cipluk yang baru saja seminggu ada di desa tersebut, disergap oleh Belanda. Akan tetapi pihak gerilya telah mengetahui akan adanya penyergapan, maka pos dikosongkan. Belanda datang di desa Cipluk mendapati pos dalam keadaan kosong, dan di desa tersebut Belanda menunjuk seorang warganya menjadi sarekat (perangkat) desa yakni bekel. Terbukti orang yang diangkat menjadi bekel tersebut adalah orang yang menunjukkan pos gerilya yang ada di Cipluk. Oleh karena itu, ia pada kesempatan lain diculik oleh gerilya.[51] Namun demikian, di sisi lain masyarakat memberikan tanggapan yang antusias terhadap pembentukan Pager Desa, memberikan bantuan kepada pasukan gerilya yang masuk ke daerahnya; berupa bantuan logistik, akomodasi, perlindungan dan informasi. Oleh karena itu, bagi pasukan gerilya terdapat kecenderungan untuk lebih mempercayai informasi dan melakukan hubungan dengan petani penduduk desa.[52]

Pagar Desa dalam melakukan gerilya diatur oleh Komandan tempur setempat, dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas

menuju titik-titik sasaran. Peran Pager Desa semula lebih pada membantu menunjukkan jalan, akan tetapi dalam operasi-operasi mampu menembus pertahanan musuh. Peran masyarakat desa dalam sistim gerilya sangat menentukan hasilnya. Seperti yang dinyatakan oleh Sjamsuharto, seorang Komandan seksi bahwa pada awal aksi wingate yang dilakukan Batalion 8 untuk menguasai Kaliwungu dan Boja, terhenti di Boja. Walau Boja dapat diduduki, akan tetapi setelah Belanda mendatangkan bantuan dari Semarang disertai serangan udara, menyebabkan pasukan Kampi 30 Batalion 8/ Cakrayuda pimpinan Kapten Subagio harus mundur.[53] Dalam pertempuran tersebut gugur Sersan Soepardjo dengan 12 anggotanya. Dari kekalahan tersebut disadari bahwa sistim operasi yang konvesnional dan terbuka, tidak dapat mengimbangi kekuatan musuh dengan dukungan persenjataan yang lebih baik. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah belum dibina dan dipersiapkannya dukungan masyarakat secara luas.

Dukungan dari masyarakat juga diakui pada operasi yang dilakukan oleh Kompi 29 pimpinan Kapten Soegondo dalam memulai gerakan di daerah pendudukan, yakni berupa informasi tentang keadaan musuh, dan untuk itu kadang pasukan sambil melakukan persiapan, menunggu sampai adanya kepastian berita. Demikian pula keberhasilan Kompi ini dalam melakukan perusakan terhadap sinyal kereta api dan penyerangannya terhadap pos musuh di tengah kota Pegandon, berhasil mencapai sasaran berkat bantuan masyarakat. Bahkan ketika pasukan melanjutkan gerakannya ke Kaliwungu, berada di Gunung Blorok berhadapan dengan pasukan Belanda dari batalion VB (*Veiligshein Batalyon*) Anjing Hitam di bawah pimpinan Mayor Van Swieten; menerapkan sistim bertahan di hutan jati di sekitar Gunung Blorok. Sistim bertahan di hutan tidak dapat berlangsung lama, karena mengalami kesulitan bantuan perbekalan pangan dari masyarakat; sehingga diputuskan untuk kembali ke markas sebelumnya di dukuh Cipluk.[54]

Pos pertahanan Belanda yang relatif terpencil menjadi incaran serangan gerilya. Pada bulan Pebruari 1949 pasukan Kapten Soegondo mengadakan serangan ke pos Belanda di Sojomerto yang menempati

Sinderan. Dalam serangan tersebut, jatuh korban di pihak Belanda dalam jumlahnya cukup banyak. Disebut-sebut peran dari eks tentara Jepang yang bergabung dengan gerilya RI, menjadi salah satu kekuatan. Penyergapan yang sangat berhasil itu dilakukan tanpa mengeluarkan suara dengan mengandalkan pada penyelinapan, kemudian membunuh dengan menggunakan samurai dan semacamnya.[55] Setelah terjadinya penyerangan, pos Sojomerto dikosongkan. Dalam waktu satu minggu pasukan gerilya pimpinan Soegando yang bermarkas di desa tersebut mempersiapkan diri masuk ke Kota Kendal.

Gerilya pasukan RI yang banyak menimbulkan korban pada Belanda, dibalas dengan aksi pembersihan, berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang dicurigai. Pasukan gerilya sebanyak satu regu yang tertangkap di desa Ngarianak sebelah barat Kota Boja, dibunuh di desa Puguh pada waktu siang hari, sehingga pasukan gerilya dengan kekuatan terbatas tidak mampu menolongnya.[56] Pembunuhan juga dilakukan terhadap penduduk desa Serang yang baru saja selesai melakukan bersih kubur (nyadran), pada hari Jum'.at Kliwon tanggal 10 Pebruari 1949. Belanda tidak dapat menerima penjelasan dari pamong desa mengenai kegiatan yang baru saja dilakukan. Penduduk laki-laki sebanyak 24 arang tersebut ditembak mati.[57]

Memasuki bulan Maret 1949, banyak tentara Belanda yang dikirim dan diperbantukan ke Jogjakarta; sehingga kekuatan di daerah Kendal berkurang. Kesempatan tersebut digunakan oleh pasukan gerilya untuk meningkatkan operasinya. Pengaruh diperluas terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dijalin hubungan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dengan menghubungi lurah desa lewat orang-orang kepercayaan; untuk kemudian dititipi anggota pejuang "dari Kidul", yaitu sebutan pada pejuang RI. Keturunan Tionghoa yang tergabung dalam barian Po Antui yang dibentuk oleh Belanda, diminta untuk dibubarkan. Dengan demikian dukungan dari masyarakat semakin meluas, meliputi semua unsur dari segala penjuru. Desa-desa menjadi basis operasional, sedangkan kota yang menjadi sasaran dari operasi gerilya, masyarakatnya telah dipersiapkan untuk membantu kelancaran operasi.

Gerak pasukan gerilya berlangsung terus sampai berlakunya *cease fire*, sebagai tindak lanjut dari hasil perjanjian Rum-Royen 7 Mei 1949. Pelaksanaan penghentian tembak menembak untuk wilayah Semarang berlaku mulai 16 Agustus 1949. Di Kendal, pelaksanaannya dilakukan setelah pertemuan antara pihak TNI yang diwakili oleh M. Syamsuharto dengan pihak tentara Belanda yang dipimpin aleh Van Swieten di Kawedanan Weleri mencapai kata sepakat.[59] Bahwa semua tembak menembak harus dihentikan, posisi Belanda berada di kota- kota Kecamatan sampai perundingan politik selesai, sedangkan desa-desa di luar kota Kecamatan dikuasai TNI.

Persiapan-persiapan dilakukan untuk memasuki kota kembali. Pemerintah Militer mempersiapkan diri di desa Sojomerto dengan menempati rumah Lurah Kusen dan beberapa rumah sekitarnya. Sementara Pemerintah Sipil yang ada di dukuh Kenjuran dipersiapkan di Pegandon. Patih Pekalongan R. Prajitno Partodidjoia oleh Pemerintah Pusat diangkat sebagai Bupati Kendal.[60]

Pada tanggal 15 Desember 1949 Pemerintah Sipil dan Pemerintah Militer telah memasuki Kota, dan terjadi *Dobbel Bestuur* antara Pemerintahan Sipil dengan Pemerintahan Militer atau Recomba. Oleh karena itu di Kendal mulai tanggal 29 Desember 1949 terjadi serah terima dari Recomba kepada pejabat Republik Indonesia Serikat untuk melakukan konsolidasi.[61]

Catatan

1. Kantor statitik Kabupaten Kendal, 1987. *Kabupaten Kendal Dalam Angka,* hal. 2.
2. Kodam VII Diponegoro. *Buku Petunjuk Teritorial II/1970.*, hal. 221.
3. Periksa konsepsi Clifford Geertz dalam, *Involusi Pertanian,* Bhratara, Jakarta, 1976.
4. Wawancara dengan Soedomo, Desa Pojoksari Kecamatan Rowosari - Kendal; tanggal 29 Januari 1995.
5. Wawancara dengan Sabar, Desa Pojoksari Kecamatan Rowosari Kendal; tanggal 29 Januari 1995.
6. Wawancara dengan Soeparlan, Jl. Pemuda Kendal, tanggal 27 Januari 1995.
7. Wawancara dengan Chafudh, Kaliwungu; tanggal 5 Pebruari 1995.
8. Wawancara dengan Chamim, desa Gempolsewu, Kecamatan Rowasari; tanggal l4 Pebruari 1995.
9. Wawancara dengan Supratikno, Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh Kendal; tanggal 28 Januari 1995.
10. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, 1988. *Aspek-aspek Budaya Di Kabupaten Daerah Kendal*, hal. 14.

11. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, *Ibid*, hal. 24.
12. Harton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1990. *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta; hal. 5.
13. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, 1976. *Sejarah Perjuangan Kabupaten Kendal,* hal. 5.
14. Wawancara dengan Soeparlan.
15. Wawancara dengan Chafudh.
16. Wawancara dengan S. Sastro Admodjo Desa cepiring Kecamatan Cepiring Kendal, tanggal 3 Pebruari 1995.
17. Wawancara dengan Sueb, Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh; tanggal 28 januari 1995.
18. Wawancara dengan Soeparlan.
19. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegora, *Sedjarah Tentara Nasional Indonesia Komando daerah Militer VII Diponegoro,* Semarang, hal. 25.
20. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Ibid*
21. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal *Op cit*, hal. 20. Wawancara dengan Soehartono, *loc cit.*
22. Wawancara dengan Moeslich, Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kendal, tanggal 3 Pebruari 1995. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *Ibid,* hal. 12.
23. Soekirno, *Semarang*, Djawatan Penerangan Semarang, hal. 102.
24. Republik Indonesia, *Propinsi Jawa Tengah*, hal. 23.
25. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *Op cit.* hal.24
26. Wawancara dengan Chafudh, *Loc cit.*
27. *Ibid.*
28. Soekirno, *op cit,* hal. 122.
29. Nasution, A.H., 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* Jilid V, Bandung. Penerbit Disjarah AD. hal. 101.

30. Soekirna, *op cit* hal. 34.
31. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *op cit*, hal 46
32. Wawancara dengan Chafudh.
33. Wawancara dengan Soehartono.
34. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *Op cit*..hal.58
35. *Ibid.* hal. 65.
36. Wawancara dengan Soeparlan.
37. Sediarah Militer Kodam VII/ Diponegoro,1968. *Sedjarah TNI AD Kodam VII/Dinonegara Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*, Semarang, jajasan Penerbit Diponegoro.
38. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *op cit*,hal.66
39. *Ibid*, hal. 70.
40. Harian Pagi *Nasional*, No.21 TH.III, Senin 26 Djanuari 48
41. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *op cit*, hal. 40
42. Wawancara dengan Sueb, *Loc cit.*
43. *Ibid.*
44. Periksa Simatupang, T.B., 1980. Lapaoran Dari banaran (Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan), Jakarta, Sinar Harapan, hal. 43.
45. M. Syamsuharto, *Kisah Singkat Aksi dan Route Gerilya batalyon 8 "Tjakrajuda" Di Daerah Kabupaten Kendal,* Suatu kesaksian tertulis, hal. 3. Lihat Moh Oemar, 1976. *Pahlawan Nasional Gatot Soebroto,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Biografi Pahlawan Nasional.
46. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *op cit*, hal.77
47. M. Syamsuharto, *op cit*, hal. 3.
48. S. Sutrisna, 1955. *Riwayat Singkat P.D.M. Kendal Territorial IV/ Div.* Diponegoro, hl. 1.

49. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *op cit.* hal.
80. Wawancara dengan Soehartono, Loc cit.
50. M. Syamsuharto, *op cit,* hal. 4.
51. Djoemadi, *Sejarah Gerilya Para Prajurit Kita Tahun 1949*, suatu kesaksian tertulis.
52. Wawancara dengan Sofani, Desa Sedayu Kecamatan Gemuh, tanggal 28 Januari 1995.
53. M. Syamsuharto, *op cit,* hal. 5.
54. *Ibid*, hal. 6.
55. Djoemadi, *Loc cit.*
56. *Ibid.*
57. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *Op cit.* hal.81
58. Djoemadi, *Loc cit.*
59. Djawatan Penerangan daerah Istimewa Jogjakarta, 1953. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta kementerian penerangan,* hal. 309.
60. Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal, *Op cit.* hal.91
61. *Ibid.*, hal. 92.

BAB IV

PERANAN MASYARAKAT DESA SALATIGA DAN SEKITARNYA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Perjuangan

4.1.1 Lingkungan Geografis

Daerah menelitian ini maliputi dua wilayah, yaitu Kotamadya Salatiga ditambah beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu Bringin, Suruh, Susukan, Tengaran, Getasan dan Tuntang yang secara administratif saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang.

Daerah tersebut terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dari ibukota propinsi berjarak kurang lebih 50 km di arah Tenggara, yaitu antara titik koordinat 7°.16' .4" -- 7°.21' .48" garis Lintang Selatan dan 110°.29' .39" -- 110° .32' .79" garis Bujur Timur.[1] Secara morfologis daerah ini merupakan sebuah lembah, di kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil di sekitarnya seperti gunung Gajah Mungkur, Telomoyo dan pegunungan Payung Rong. Dikarenakan hawanya sejuk, maka sejak masa kolonial Salatiga selain sebagai pusat pemerintahan juga menjadi tempat peristirahatan bagi para pembesar dan penguasa onderneming.[2]

Adapun batas-batasnya, sebelah utara Kecamatan Bawen, sebelah timur Kabupaten Purwodadi, sebelah selatan kabupaten Boyolali dan sebelah barat Kabupaten Magelang dan Kecamatan Banyubiru

Wilayahnya berupa tanah dataran dan pegunungan, yang bisa dibedakan menjadi tiga bagian.

Dataran Tengaran, tanahnya subur meluas hampir meliputi bekas kewedanan Tengaran, kecuali daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali bagian Timur Laut (daerah Dadapayam). Tanah dataran Rawa Pening, keadaan tanahnya banyak mengandung air, sehingga Sangat subur dan baik untuk tananan padi dengan sistem pasang surut. Sedangkan tanah pegunungan terbentang diwilayah kecamatan Getasan.[3]

Jenis tanahnya sebagian besar terbentuk dari bahan vulkanis, terutama *tufa* dan abu vulkanis yang mudah lapuk. sehingga mudah meresapkan air. Jenis tanah ini cukup subur dan cocok untuk bertanam sayuran, bunga-bunga dan buah-buahan, sementara lereng-lereng pegunungan merupakan hutan lindung dengan pohon pinus, schima dan lain-lain. Daerah ini juga mempunyai potensi hidrologi yang cukup besar, yaitu dengan adanya tiga sumber air di Kalitaman, Kalisombo dan Benoyo yang menjadi sumber air bersih masyarakat sekitarnya.[4]

Dari segi klimatologi daerah ini bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 900 meter dari permukaan laut yang rata-rata hawanya dingin dan daerah yang berketinggian di bawah 900 hingga 500 meter dari permukaan laut yang rata-rata hawanya sejuk. Di musim panas udaranya juga tidak begitu panas, karena kadang-kadang diliputi kabut. Suhu rata-rata daerah ini adalah antara 17,5 hingga 28^0 Celcius.

Mengenai arah angin, pada garis besarnya jalannya ingin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada bulan April - September adalah dari Tenggara menuju Barat Laut, sedangkan pada bulan Oktober - Maret angin bergerek dari Barat Laut menuju Tenggara. Pada permulaan musim hujan angin bertiup kuat, seringkali diiringi hujan dan adakalanya badai (angin puyuh) bertiup di daerah Suruh dan Susukan. Dalaam pertengahan musim hujan, yaitu antara bulan Desember - Pebruari keadaan angin tidak tetap. Menjelang musim kemarau angin bertiup keras dan kadang berbolak-balik dari arah Barat Daya dan Timur Laut.

Melihat letak geografisnya. Wilayah Salatiga cukup strategis, di antara dua kota besar, yaitu kota Semarang yang merupakan bandar dan Sala yang sejak dulu tmenjadi pusat perdagangan dan industri. Di sana terdapat banyak perkebunan (onderneming) milik swasta Belanda. Walaupun kota Salatiga tidak dilalui jaringan KA yang waktu itu merupakan sarana transportasi vital, namun untuk pengangkutan barang dan hasil bumi ke kota lain tidak begitu sulit. Ini dikarenakan tidak jauh di sebelah utara kota (kira-kira 8 Km) terdapat jalur kereta api dari Magelang ke Kedungjati, Melalui Stasiun Secang-Ambarawa-Tuntang Bringin-Gogodalem terus bersambung dengan jalur KA ke Semarang dan Sala.

Di sana terdapat sebuah rawa, yaitu rawa Pening, yang airnya disalurkan melalui sungai Tuntang untuk membangkitkan PLTA di Jelok, yang merupakan satu-satunya pembangkit tenaga listrik di Jawa Tengah. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan Salatiga dalam bidang perekonomian daerah Jawa Tengah cukup potensial, baik karena letaknya yang strategis, potensi ekonomi, maupun tersedianya sarana-sarana penunjang yang lain.

4.1.2 Kehidupan Sosial Politik

4.1.2.1 Pemerintah Sipil

Salatiga ditetapkan menjadi kotamadya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jenderal Limburg van Stirum tanggal 25 Juni 1917 No. 1 dan dimuat dalam *Staatsblads* Tahun 1917 No. 226. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sejak tanggal 1 Juli 1917 berdirilah *Gemmente* Salatiga. Pada tahun 1926 pemerintah Hindia Belanda meningkatkan status *gemeente* menjadi *stadsgemeente* berdasarkan Undang-undang *Stadsgemeente* No. 79/ 1926. *Stadsgemeente* salatiga membawahi satu kewedanan yang terdiri atas satu kecamatan dengan wilayah delapan desa, yaitu desa Sidorejo Lor, Salatiga, Krajan, Kutowinangun, Kalicacing, Mangunsari, Gendongan, Tegalrejo dan Ledok.[5]

Roda pemerintahan di kota Salatiga dilaksankan oleh tiga lembaga yaitu *Burgermeester* sebagai kepala Pemerintah,

didampingi oleh College, yang manjalankan pemerintahan sehari-hari dan *Stadsgemeente Raad* (Dewan Rakyat), yang anggotanya terdiri dari 11 orang, yaitu 8 orang Belanda, 2 orang pribumi dan seorang Cina mewakili orang Timur Asing.[6] Yang jelas bahwa pemerinyahan waktu itu didominasi oleh orang-orang Belanda.

Pada masa pasukan Jepang, selain menjadi pergantian istilah, perubahan yang terlihat adalah mulai berperannya orang pribumi dalam pemerintahan. Waktu itu Walikota dijabat oleh R. Mudardjo, Wedana R. Sudjitman, Kepala Polisi R. Sudarmo, sedangkan kepala Pengadilan dipegang oleh R. Salatun.[7]

Setelah Indonesia merdeka terjadilah perubahan yang cukup mencolok. Nama-nama jawatan yang semula menggunakan istilah Jepang dihapus, diganti dengan nama Indonesia. Pemerintahan sipil disusun dengan mengaktifkan kembali pegawai Indonesia di masa Jepang. Sebelumnya mereka harus mengucapkan sumpah setia kepada pemerintah RI. Walikota dijabat oleh Sumitro, Wedena Sukrisno, Asisten Wedana Sudibyo, kepala Polisi Sudarno dan Asisten Wedana luar kota Abdullah.[8]

Untuk mengatasi permasalahan yang begitu mendesak di tengah Situasi revolusi, maka sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1745 segera disusun KNI Daerah Salatiga sampai dengan tingkat kecamatan. Tugasnya adalah membantu kelancaran jalannya pemerintahan di masa transisi. KNI Daerah Salatiga menempati bekas gedung Harmoni (di sebelah Hotel Kalitaman), dan sekretariatnya dipimpin oleh Suwondo.[9]

Beberapa waktu sebelum Belanda menduduki kota Semarang secara keseluruhan, staf pemerintahan yang adg di sana telah mengungsi meninggalkan kota. Gubernur Jawa Tengah Mr. Wangsoneaoro dan staf mengungsi ke Magelang, Residen Semarano S. Karna dan KNI Daerah Semarang kemudian menetap di Salatiga. Di sana Kantor karesidenan menempati bekas Hotel Berg en Dahl, KNI Karesidenan Semarang dan KNI Kabupaten Semarang di bekas Hotel Harmoni, *Gemeente* Semarang menjadi satu dengan Kantor Kehutanan, Kantor Kabupaten Semarang di Jalan Jangkungan, sementara Kantor Pos, Telegram dan Telepon (PTT) menjadi satu

dengan PTT Salatiga, Kantor Perekanomian di Jalan Kemiri, sedangkan Kantor Perburuhan dan RRI Semarang di Jalan Tuntang. Dengan adanya pengungsian tersebut maka 10 kota Salatiga menjadi semakin padat dan ramai

Pada masa Agresi Militer Belanda I, kota Salatiga diduduki Belanda dan seluruh instansi sipil mengungsi ke pedalaman. Pada masa Agresi Militer II, dangan dibentuknya instansi pemerintahan militer, pemerintahan sipil diintegrasikan di bawah PMK, PMKB dan PMKT, dan tetap melaksanakan fungsinya di daerah pedalaman.

4.1.2.2 Terbentuknya Organisasi di Daerah Salatiga

Sesuai keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan BKR, di Salatiga terbentuk satu batalyon BKR di bawah pimpinan Moehari Hardjosajoko, dibantu staf pimpinan bekas Shodantjo Peta, seperti Sutarno, Agus Prasnowo, Kusnowibowo, Sungkarso, Supono, Sudarsono, Harkim dan lain-lain. Anggotanya terdiri dari bekas Peta, *Heiho*, *Kaigun* dan organisasi semi militer lain di masa Jepang, juga bekas KNIL dan sukarelawan lainnya. Mereka ditempatkan untuk menjaga pos di dalam dan di batas kota, seperti di daerah Tingkir, Ngawen, Bancakan dan Domas, sedangkan markasnya berada di bekas gedung *Kweekschool* dan *Normalschocl* wanita.[11]

Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Komandan BKR Salatiga Moehari Hardjosarjoka bersama dr. Trenggana dan Soegali Hadiwibowo seagera berangkat ke Jogyakarta. Mereka menahadap Kepala Staf Umum TKR, Letjen. Oerip Soemohardjo untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah organisasi, anggaran dan lain-lain.[12]

Setiba di Salatiga, mereka segera membuka pendaftaran untuk calon anggota TKR sambil menyiapkan markas, asrama dan persenjataan. Akhirnya tersusun satu batalyon TKR dibawah pimpinan Mayor Sutarno dengan kekuatan sebanyak empat kompi. Masing-masing dipimpin oleh Kapten Sungkarso, Kapten Isdiyanto, Kapten A. Said dan Kapten A. Sajad.[13]

Menyusul kemudian berdirinya batalyan TKR Ambarawa pimpinan Mayor Sumarto, TKR Banyubiru pimpinan Mayor Ashari dan TKR Ungaran pimpinan Mayor Wahyu Rokhadi. Dari empat kesatuan tersebut. TKR Ambarawa merupakan kesatuan yang terkuat karena mendapat banyak senjata rampasan dari tangan Jepang.[14]

Di tengah kesibukan membentuk TKR. datang Kolonel Djatikusumo membawa perintah dari MBT tentang persiapan membentuk Divisi IV Jawa Tengah yang akan bermarkas di Salatiga. Dengan terbentuknya Divisi IV, maka empat batalyon TKR di Salatiga dan sekitarnya. direformasi masuk ke Resimen III Salatiga di bawah pimpinan Letkol. Sutejo Harjoko, dengan susunan sebagai berikut :

- Yon 1/Res. III pimpinan Mayor Sutarno di Salatiga
- Yon 2/Res. III pimpinan Mayor Ashari di Banyubiru
- Yon 3/Res. III pimpinan Mayor Sumarto di Ambarawa
- Yon 4/Res. III pimpinan Mayor Rokhadi di Ungaran.[15]

Di awal tahun 1946 Salatiga menjadi pusat militer. Di sana terdapat beberapa markas komando, yaitu Staf Divisi IV, Staf Resimen III, Staf MPP Jawa Tengah dan Markas Pertahanan TLRI II (MP-II) Jawa Tenga.h pimpinan Kolonel Akhmad Yadau dengan Kastaf Letkol. Suyoto. MP II TLRI membawahi 4 resimen, yang berkedudukan di Purwodadi. Solo, Jogya dan Magelang dengan kekuatan batalyon. Di antaranya adalah Yon II pimpinan Letkol. Sugeng di Salatiga dan Yon III pimpinan Mayor Sukardi di Banyubiru.[16]

Pada bulan Oktaber 1946 Divisi IV berubah menjadi Divisi V/Ronggolawe dan markas divisi didindahkan dari Salatiga ke Mantingan. Dengan terbentuknya TNI pada tanagal 3 Juni 1947 Resimen III/Divisi Ronggolawe yang berkedudukan di Salatiga, berubah menjadi Resimen 2/Divisi IV/Panembahan Senopati Surakarta, dengan susunan sebagai berikut :

- Komandan Res. 23/Div. IV. Letkol. Sutejo Haryoko Kastaf Mayor Darno (diganti Mayor Sutarno)
- Yon 1/Res. 23 Mayor Sutarno di Salatiga (kemudian diganti Mayor Sugiyono)

- Yon 2/Res. 23. Mayor Ashari Judopranoto di Banyubiru
- Yon 3/Res. 32. Mayor Sumarto di Ambarawa
- Yon 4/Res. 23. Mayor Wahyu Rochadi di Ungaran.[17]

Sejalan dengan perubahan tersebut, pasukan TLRI Divisi II Salatiga memindahkan markasnya ke Solo. Empat resimen yang semula tersebar kemudian diintegrasikan menjadi satu brigade, yaitu Brigade VII/Divisi II Surakarta di bawah pimpinan Letkol. A. Yadau. Selanjutnya batalyon TLRI di Banyubiru dan Salatiga digabungkan menjadi satu dalam Yon III pimpinan Mayor Sukiswo.[18]

Selain Resimen 23/Div.IV dan Yon III TLRI, di Salatiga terdapat batalyan Polisi Tentara (PT) pimpinan Mayor Sudjiman dan Resimen 5/Brigade XXIV TNI Masyarakat (ex BPRI Semarang) pimpinan Letkol. Mardjuki. Adapun formasi dari Brigade XXIV TNI Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Kamandan Brigade XXIV : Kolonel Iskandar
  Kepala Staf : Letkol. Tukimin
  Wk. Kepala Staf : Mayor Hendroprajoko
  - Kmd. Res. 5/Be. XXIV : Letkol. Mardjuki
    Kastaf : Mayor Maksum
  - Batalyon XV : Mayor Sunar
  - Batalyon XVI : Mayor Suharjo
  - Batalyon XVII : Mayor Jalimin.[19]

Ketika pecah Agresi Militer Belanda II dan keluar Instruksi Panglima MBKD (Markas Besar Komando Djawa) Kolonel AH. Nasution tanggal 25 Desember 1948 tentang pembentukan sistim pemerintah militer, daerah Salatiga berada di bawah komando STC Semarang pimpinan Major Widagdo. Adapun pasukan tempurnya adalah Yon Mayor Suradji, yang tergabung dalam Brigade V pimpinan Letkol. Slamet Riyadi

4.1.2.3 Pembentukan Partai Politik dan Badan Kelasykaran di Daerah Salatiga

Untuk mendukung perjuangan kemerdekaan, selama bulan Agustus hingga September 1945 rakyat secara spontan mendirikan

berbagai organisasi bersenjata, yang lebih dikenal sebagai badan kelaskaran. Di antara kelaskaran yang ada di Salatiga adalah :

1). Barisan Banteng, yang merupakan kelanjutan dari Barisan Pelopor di masa Jepang. Di Karesidenen Semarang terbentuk I resimen. di bawah pimpinan Supardjan dengan Kastaf Sudamora. Markas Resemen ada di Blauran, Salatiga. Resimen ini memiliki 5 markas gabungan di tingkat kabupaten, yaitu di Semarang Kota (S. Cipto), Kendal (Susatyo), Semarang (Tumiarso/Sumitro), Demak (Rasimin/Kuntodarsono) dan Purwadadi (Sanyoto/ Pramono). Di daerah Semarang ada empat markas cabang, yaitu Salatiga, Ungaran, Ambarawa dan rencaran. Di Bringin Barisan 21 Banteng dipimpin oleh Hardjo Karni.[21]

2). Laskar Hisbullah/Sabillilah, adalah merupakan laskar besar. Waktu itu Salatiga menjadi Markas Pimpinan Pertempuran Hisbullah/Sabillilah (MF:HS) Jawa Tengah, atau sebagai Perwakilan Markas Besar Hasbullah pimpinan Jupri Kartalegawa dan Munawir Sadzali. Di Salatiga terbentuk kekuatan I resimen beranggotakan sekitar 25.000 orang tersebar di berbagai kecamatan. Yang terbanyak dari daerah Bringin dan Suruh. Markas Resimen ada di Jl. Tuntang No.4 markas batalyon di Jl. Tuntang No. 76, sedangkan asrama pasukannya di Jl. Tuntang No. 81. Adapun formasi kelaskaran ini adalah : Komandan Resimen H.Daenuri/Muhdi, Komandan Yon Salatiga Sudianto, Komandan dan Yon Semarang Busrowi, sedangkan Komandan Hisbullah Bringin Sonhaji.[22]

3). Pesindo Salatiga lahir dipelopori oleh pemuda-pemuda dari kampung Kalioso, yang terletak di belakang pasar Salatiga. Secara politis maupun militer, mereka adalah yang terkuat. Jumlah anggotanya mencapai sekitar 25.000 orang, terbesar di berbagai wilayah. Mereka banyak menguasai gedung dan rumah bekas milik Jepang. Pesindo Salatiga dipimpin oleh Mashuri, Ambarawa di pimpin Usman dan di Bringin dipimpin oleh Sucitro.[23]

4). BPRI (barisan Pemberontak Republik Indonesia) Karesidenan Semarang dipimpin oleh Mardjuki, memiliki 5 cabang di Kendal, Demak, semarang, Ambarawa dan Salatiga. Di Salatiga,

pimpinan dipegang oleh Sastrosuhardjo. Pasukannya tersebar di dua wilayah, yaitu di sebelah timur jalan Semarang-Solo dipimpin oleh Cipto Sardju, dan di sebelah barat jalan di pimpin Mardjuki. Di Ambarawa BPRI dipegang oleh Jalimin. Di Boja BPRI dipimpin oleh Sosro, di Getas Sastro dan Haryo, sedangkan di Bringin Jumaeri.[24] BPRI tidak berafiliasi pada partai tertentu tetapi persenjataannya cukup lengkap bahkan memiliki pemancar radio, sehingga pengaruh politiknya cukup kuat

5). Lasykar rakyat, semula masih bersifat lokal tersebar di enam wilayah, yaitu Salatiga kota, Salatiga luar kota, Tengaran, Ambarawa, Ungaran dan Sumowona. Baru pada bulan Mei 1946 diintegrasikan dalam Laskar Pakyat MPD IV (Markas Pimpinan Daerah IV) dengan pusat di Salatiga, di bawah pimpinan Djiono, Kaslin dan Sudjud. Markasnva berada di Salatiga (di Jl. Solo No. 121 dan Tangsi Bambu). Anggotanya tersebar di berbagai wilayah. Di Tengaran dipimpin Harto Brewok dan Hardjo Djamal, Di Getasan dipimpin oleh Samsuri.[26]

6). Kelaskaran lain jumlahnya tidak begitu besar dan umumnya anggotanya juga tersebar di beberapa desa. Tercatat di sini AMRI/ AMD pimpinan Asyhari, Sugiono dan Sutejo. Di Kecamatan Suruh, AMRI dipimpin oleh Sudiro yang pada tahun 1946 bergabung pada Pesindo.[27] Pasukan lain adalah Barisan Pendem pimpinan Mashuri, Barisan Srikandi pimpinan Sugiono, Barisan Clurut (dari kelaskaran Islam) pimpinan Dulah Sadjadi,[28] juga Tentara Pelajar (IPI) pimpinan Kaswoto, Laskar Pelajar Yamadipati pimpinan Kyahi Hasyim, Laswi (Laskar Wanita Indonesia) dan lain-lain.[29]

Mereka itu ikut terjun di berbagai front pertempuran, di Ambarawa, MMS dan MMTA. Pada saat TNI disusun, mereka dilebur dalam TNI namun tidak seluruh anggotanya dapat tertampung. Ketika Salatiga diduduki Belanda dalam agresi militer Belanda I, mereka yang tidak masuk formasi TNI lalu membentuk pasukan gerilya dengan nama beraneka ragam.

Setelah pemerintah mengeluarkan Maklumat X tanggal 3 Nopember 1945 tentang berdirinya sejumlah partai politik, di Salatiga

berdiri sejumlah partai dengan pimpinan masing-masing : Masyumi pimpinan Supardi, PNI pimpinan Patah, Partai Sosialis pimpinan Surowikarto.[30] Dengan adanya partai-partai maka ada sebagian kelasykaran yang kemudian berafisiliasi ke partai, sementara yang lain tetap Independen.

4.1.3 Kehidupan Sosial Ekonomi

Mengenai jumlah penduduk Salatiga baru diketahui sejak tahun 1905 dengan perincian sebagai berikut :

PENDUDUK	1905	1937
- Pribumi	12.000	16.620
- Eropa	700	2.242
- Timur Asing	1.350	1.945
Jumlah	14.080	20.2407.[31]

Dengan pertambahan penduduk kurang lebih 2,6 %, sementara luas kotanya hanya 13,5 kilotmeter persegi, maka kota tersebut termasuk wilayah yang berpenduduk padat.

Dari segi mata pencaharian, hampir 70% dari orang pribumi adalah petani, 15 % pegawai pemerintah dan swasta dan 15 % lainnya pedagang. Dari kalangan Cina dan lain-lain 90 % bergerak dalam perdagangan, baik sebagai kolektor hasil bumi maupun distributor barang buatan pabrik.[32].

Munculnya perkebunan di sekitar Salatiga. pada akhir abad 19 dan awal abad 20 membuka lembaran kehidupan sosial ekonomi baru. Adanya perkebunan karet, kopi, teh. coklat dan tembakau di daerah Banaran, Getas, Bringin, Plaur, Ngasinan, Goli, Ketapang, Bakalrejo, Kesangan dan beberapa tempat lain membuka peluang kerja bagi kalangan pribumi dan Eropa. Banyak petani pribumi yang kemudian beralih profesi menjadi buruh onderneming, pedagang hasil bumi antar desa atau membuka usaha kecil di tempat-tempat tertentu.[33]

Kehidupan ekonomi ditahun tiga puluhan, rakyat menyebutnya sebagai "jaman normal". Waktu itu kehidupan rakyat sehari-hari dianggap normal. Inflasi tidak begitu tinggi dan nilai uang *gulden* relatif stabil. Walaupun harga barang buatan pabrik, seperti pakaian dan barang kelontong cukup mahal, namun karena harga pangan murah dan pola hidup rakyat masih sederhana sehingga tidak begitu menyulitkan rakyat kecil.

Memasuki masa pendudukan Jepang, situasi berbalik. Kehidupan ekonami bukannya membaik, sebaliknya menjadi makin sulit. Toko-toko milik Cina banyak yang ditutup, sementara yang diijinkan buka tidak luput dari pemerasan pihak Jepang. Barang kebutuhan hidup sehari-hari mulai langka dan menghilang dari pasaran, kalaupun ada harganya begitu tinggi sehingga tidak terjangkau.

Kurangnya bahan sandang membuat orang berjual beli pakaian bekas, bahkan akhirnya banyak yang berpakaian karung goni, karet, serat (brandil). Bahan pangan Sulit didapat karena diambil Jepang untuk keperluan perang. Kehidupan ekonomi yang buruk membuat berbagai macam penyakit seperti malaria, penyakit kulit dan busung lapar merajalela sehingga banyak orang yang tewas.

Sementara itu pemerintah pendudukan yang represif menindas rakyat dengan kejam. Rakyat diwajibkan menyerahkan perhiasan emas dan permata, logam besi (kecuali alat-alat pertanian), ternak, padi dan tenaga kerja untuk *kinrohosi* (keria bakti) dan *romosha.* Selain itu juga ada keharusan menanam pohon jarak, kapas dan bahan pangan lain yang hasilnya harus disetorkan kepada Jepang.

Jepang juga membuat peraturan baru yang langsung menyangkut kehidupan petani. Petani hanya diperbolehkan menyimpan 20 % hasil panen, sisanya 50% harus dijual pada pemerintah, 10 % untuk biaya pengangkutan dan 10 % lainnya untuk *kumiai* (koperasi). Adapun ketentuan pembelian padi/beras oleh penerintah adalah padi bulu Rp. 3,8/kw, padi cere Rp. 3,45/kw, gabah Rp. 4,15/Kw, beras No. I Rp. 6.5/Kw dan beras No. 2 Rp. 4/kw.[34]

Menurut ketentuan bahwa semua penyerahan barang milik rakyat akan diberikan ganti rugi. Dalam pelaksa.aannya, ternyata antara

daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama, tergantung pada penguasa setempat. Di daerah yang penguasanya begitu represif. Aturan diterapkan dengan ketat, bahkan cenderung memeras. Sebaliknya ada juga daerah yang penguasanya, bersikap lebih manusiawi.

Sebagai contoh adalah mengenai tanaman wajib. Ketentuannya tanaman itu seharusnya ditanam di pekarangan atau lahan yang kosong, sehinaga tidak merugikan petani. letapi, di Tengaran rakyat diperintahkan menebangi tanaman kopi yang ada dan menggantinya dengan tanaman kapas atau bahan pangan, yang hasilnya harus diserahkan kepada Jepang dengan cuma-cuma.[35]

Di Bringin penyerahan padi berdasarkan sistim target, sesuai luas areal pertanian. Hal ini jelas memberatkan rakyat karena sebagian besar tanahnya adalah lahan kering. Untuk mengurangi beban masyarakat di sekitarnya, Supardjan, Carik desa Gogodalem menghubungi kenalannya, seorang Cina pemilik perusahaan beras ABC di Magelang. Ia minta agar ABC membuka cabang di Bringin dan ia bersedia menjadi agennya. Melalui temannya seorang Perwira *Kenpetai* di Semarang, Supardjan mengajukan usul untuk menjadi agen beras bagi wilayah Bringin. Ternyata usulannya disetujui. Sejak itu semua setoran padi harus lewat agen dan Jepang tidak campur tangan lagi. Dengan kewenangannya Supardjan bisa membantu mengurangi beban masyarakat dalam hal wajib setor padi.[36]

Mengenai penyetoran logam besi penguasa di sini juga amat keterlaluan, sampai-sampai kawat untuk gantungan lampu juga tetap diambil. Yang lebih menyakitkan adalah wajib setor ternak. Banyak kejadian seekor sapi hanya diganti dengan kira-kira 2-3 kilogram ikan asin, bahkan kadang diambil begitu saja tanpa ganti rugi. Untuk menghindari penyerahan perhiasan emas, Supardjan menyarankan rakyatnya untuk membuat perhiasan imitasi, sementara yang asli disimpan. Pada waktu disetorkan, dengan sendirinya sebagian besar ditolak karena emasnya imitasi.[37]

Di Susukan, penguasanya ternyata lebih manusiawi. Untuk barang perhiasan, mereka lebih mengutamakan batu permata, sedangkan emasnya dikembalikan pada pemiliknya. Untuk logam besi mereka

juga pilih-pilih. Yang diambil hanya besi dengan ukuran dan kualitas tertentu. Demikian pula untuk ternak (sapi), hanya dipilih yang baik. Setoran padi jumlahnya juga tergantung hasil panen, penyetoran itu dicatat dan diberikan ganti rugi.[38]

Nampaknya. ini merupakan fenomena yang menarik, karena terbukti bahwa kebijakan penguasa militer Jepang dalam hal perekonomian begitu bervariasi. Mentalitas penguasa setempat ikut menentukan pola pelaksanaam. Tidak mustahil bahwa waktu itu korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang sudah berjangkit di antara mereka, sehingga ada oknom-oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menperkaya diri.

Masalah lain yang menarik adalah mengenai penyerahan tenaga, baik untuk *kinrohosi* atau kerja bakti (Jawa Gugur gunung) maupun *romusha*. Secara umum rakyat terkena wajib *kinrohosi*, baik di lingkungan sendiri tetapi dapat juga di desa lain. Di Tengaran rakyat diperintahkan meratakan sebuah bukit kecil untuk dibuat lapangan guna latihan kemiliteran.[39] Di Suruh dan Susukan rakyat dipe kerjakan membuat jalan tembus Tengaran-Getasan, yang di kalangan mereka dikenal sebagai "Gugur-gunung Kali-gandu". Di Bringin rakyat dikerahkan untuk menggarap proyek listrik di Jelok.[40]

Bagi rakyat, adanya *kinrohosi* waktu itu dirasa cukup memberatkan. Lebih-lebih jika proyeknya ada di luar desa yang jaraknya cukup jauh. Selain meninggalkan pekerjaan pokok sehari-hari, mereka harus berjalan kaki cukup jauh dan dipaksa kerja keras tanpa mendapat jaminan makan. Ditambah lagi perlakuan tentara Jepang juga sewenang-wenang dan main pukul. Malahan ada yang bertindak konyol, misalnya menyuruh orang untuk mengangkat sebatang kayu. Jika wereka tidak kuat, jumlah orang bukannya ditambah malahan dikurangi, dan tetap dipaksa untuk mengangkatnya sambil dipukuli.[41]

Namun dibandingkan yang terkena *romosha*, mereka merasa masih beruntung, sebab nasib *romusha* jauh lebih tragis. Para romosha biasanya dikirim jauh ke lain daerah atau ke luar Jawa, bahkan ada yang sampai di Birma dan Thailand. Perlakuan Jepang pada mereka di luar batas kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa

jaminan makan yang cukup. Akibatnya ribuan tenaga *romusha* meninggal karena sakit dibunuh atau hilang tidak kembali.

Pengerahan tenaga *romusha*, biasanya dilakukan degan kekerasan dan secara paksa. Di Susukan Jepang ternyata mengutamakan pendekatan lain. Mereka berusaha membujuk rakyat dengan menanamkan pengertian, semangat pengabdian dan rasa kebanggan. Rumah-rumah penduduk yang ikut *romusha*, ditempeli secarik kertas bergambar topi baja berlatar belakang gambar "Matahari Terbit", dengan tulisan "Korps Pekerja Sukarela". Kepada keluarga yang ditinggalkan, secara periodik Jepang memberi jatah kain sebanyak 1.5 meter. Untuk ukuran waktu itu nilainya begitu besar, karena bahan pakaian sulit didapat.

Jelaslah bahwa masa pendudukan Jepang benar-benar merupakan masa-masa yang paling pahit, yang harus dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka menderita lahir batin. Selama itu rakyat harus berkorban baik jiwa, harta benda juga mental psikologis.

Dengan terbentuknya garis demarkasi akibat agresi militer Belanda pertama, maka daerah Salatiga terpecah menjadi dua. Kehidupan ekonomi rakyat di daerah pendudukan Belanda relatif lebih stabil karena barang-barang pabrikan masih mudah diperoleh dan ada distribusi dari pemerintah federal. Sebaliknya kehidupan penduduk di daerah Republik agak mengalami kesulitan akibat blokade ekonomi Belanda.

Untuk memenuhi kebutuhan akan barang pabrik, peran pedagang lintas batas di sini begitu besar. Baik pihak Belanda maupun RI tidak bisa melarang kegiatan mereka karena adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi. Di satu pihak daerah Republik membutuhkan barang-barang pabrik, sebaliknya daerah pendudukan butuh hasil pertanian. Oleh sebab itu walaupun harus melalui banyak pos pemeriksaan dengan resiko barang disita, namun perdagangan lintas batas tetap berjalan.

Berkenaan dengan banyaknya pelintas batas, TNI kemudian membentuk instansi CADT (Corps Administrasi Daerah Tentara). Setiap pelintas batas diwajibkan meminta surat pas dari instansi

tersebut. Instansi ini melahirkan kecemburuan sosial di kalangan aparat, karena umumnya kesejahteraan mereka lebih baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, antara petugas dan para pedagang biasanya saling ada pengertian. Petugas tidak mempersulit perijinan, sebaliknya pedagang mencukupi kebutuhan petugas seperti sabun, rokok, makanan dan lain-lain.[43]

Untuk menghindari resiko dituduh sebagai mata-mata, para pedagang itu tidak membawa uang tetapi barang. Di daerah Republik mereka menerima penbayaran dengan uang kemudian dibelanjakan barang yang laku di daerah pendudukan, seperti kain batik, lurik, beras, gula, sayuran buah-buahan, telur, ayam, kambing, sapi dan lain-lain. Sebaliknya, di daerah pendudukan transaksi berlangsung dengan uang federal. Uang tersebut sedapat mungkin dihabiskan untuk berbelanja barang yang laku dijual di pedalaman, seperti bahan pakaian, barang kelontong dan barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah barang yang dibawa juga terbatas, karena kalau berlebihan akan dicurigai dikira membantu pejuang. Adakalanya mereka bernasib sial dan menderita kerugian, karena barangnya disita Belanda. Ini biasanya dilakukan sebagai tindakan balas karena TNI menyita barang-barang Belanda.[44]

Selain perdagangan secara legal, banyak juga terjadi penyelundupan. Salah satu mata dagangan ilegal adalah candu. Biasanya candu dibawa dari daerah Sala dan pedagang menyembunyikannya dalam rangka sepeda (Jawa : *dalangan*), di bawah sadel. Setiba di perbatasan, sepeda dititipkan dan mereka masuk daerah pendudukan dengan berjalan kaki. Mereka sengaja melintasi perbatasan pada dini-hari. Sesuai ketentuan jam malam bahwa semua orang harus membawa alat penerangan, meraka lalu membawa obor dari batang bambu yang di dalamnya sudah diisi dengan candu. Untuk kamuflase mereka juga membawa barang dagangan lain dan berbaur dengan pelintas batas lainnya. Di daerah pendudukan candu itu ditampung oleh pedagang Cina dari Semarang dan daerah yang lain.[45]

Sejak berlakunya uang ORI, secara berangsur-angsur uang Belanda ditarik dari peredaran sementara uang Jepang masih tetap

berlaku. Pada tahun 1946 uang Jepang dinyatakan tidak berlaku dan sebagai gantinya setiap penduduk mendapat distribusi sebanyak Rp. 1,7,. Keputusan itu banyak merugikan rakyat terutama kalangan pedagang. Orang-orang yang kecewa, kemudian membakar atau membuangnya di Semarang tempat sehingga menjadi mainan anak-anak.[46]

Pada masa Perang Kemerdekaan kehidupan ekonomi rakyat semakin berat. Sistim moneter RI menjadi kacau akibat blokade ekonomi Belanda. Selain melarang peredaran uang ORI di pendudukan, Belanda juga mengedarkan ORI Palsu pecahan Rp. 100.. Akibatnya nilai tukar ORI terus merosot, orang meragukan nilai ORI, inflasi terus membumbung dan pedagang sulit mendapatkan barang di daerah pendudukan karena harganya nenjadi tinggi.

Dengan jatuhnya Jogyakarta, maka droping uang dari Pemerintah Pusat terhenti. Dari waktu ke waktu peredaran ORI terus menyusut. Untuk mengatasi kesulitan akan mata uang, pada pertengahan tahun 1949 PMKB Pemerintah Militer kabupaten Semarang mengeluarkan cek sebegai alat pembayaran yang sah dan berlaku di daerah setempat. Cek tersebut dibuat dari kertas payung, kemudian dicap dalam bentuk dan tata warna sederhana. Ukurannya kira-kira setengah dari lebar uang ORI. Cek, yang rakyat menyebutnya "duit cek" itu digunakan untuk berbagai transaksi dan membayar belanja pagawai di wilayah PMKB Semarang. Setelah berlaku selama kurang lebih empat bulan. menjelang pemulihan kedaulatan Bupati Semarang Sumardjito memerintahkan untuk mengumpulkannya lewat para kepala desa dan dijanjikan akan mendapat ganti. Namun hal itu tidak pernah terealisasikan.[47]

4.1.4 Kehidupan Sosial Budaya

Setelah ditetapkan menjadi daerah otonom kota Salatiga mulai berbenah diri. Jalan utama diperlebar dan diaspal. Di kanan-kiri jalan ditanami pohon kenari dan mahoni sebagai pelindung. Pagar-pagar halaman rumah dan perkantoran juga saluran air diperbaiki dan jaringan air ledeng dibangun. Jalan-jalan masuk kampung juga

diperkeras agar tidak becek di musim hujan. Untuk menambah keindahan, rakyat disarankan menanami halaman rumahnya dengan bunga-bungaan.

Selain itu Salatiga dilengkapi juga dengan sarana rekreasi untuk kalangan atas Eropa, antara lain Sociteit Harmoni (sekarang gedung Pertemuan Daerah), pemandian Kalitaman, lapangan tenis di Tamansari. Untuk menginap disediakan hotel-hotel yang cukup mewah untuk ukuran saat itu, seperti misalnya Hotel Kalitaman (sekarang Hotel Kaloka), Hotel Berg en Dahl (sekarang Gedung Pertunjukan Daerah) dan Hotel Bloomenstein (sekarang Kodim).[48]

Mengenai pemukiman penduduk, terlihat adanya pemisahan berdasarkan perbedaan etnik. Orang-orang Belanda dan Eropa yang kebanyakan pejabat pemerintah kolonial dan penguasa perkebunan, cenderung untuk bermukim di pusat kota. Mereka menempati jalur utama di sepanjang jalan Tuntang, di kalurahan Salatiga Krajan. Kawasan ini merupakan daerah perkantoran dan eksklusif. Selain orang Eropa dilarang bermukim di daerah ini, dan pemerintah mengawasinya dengan ketat. Tokoh pribumi yang terkena larangan masalah pemukiman ini adalah RA Kardinah, saudara kandung pahlawan nasional RA Kartini. Orang Cina biasanya bermukim di daerah perdagangan, yaitu di sekitar pasar besar dan sepanjang jalan Solo, yang termasuk daerah Kalicacing. Sedangkan orang Timur Asing lainnya berbaur dengan penduduk pribumi di perkampungan.[49]

Pada masa kolonial stratifikasi masyarakat bersifat kolonialistis. Bangsa Belanda menempati strata tertinggi, disusul bangsa Eropa dan Indo-Erapa, kemudian Timur Asing, sementara orang pribumi menempati strata yang paling bawah. Dengan masuknya Jepang, terjadilah perubahan besar. Orang pribumi memperoleh status yang jauh lebih baik dibanding di masa kolonial Belanda. Lebih-lebih dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, stratifikasi dan struktur masyarakat berubah drastis. Nilai-nilai lama dijungkir balikkan, digantikan nilai-nilai baru sesuai dengan perubahan suasana di masa revolusi.

Sejak jaman Jepang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin meluas, menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Bahasa yang lajim dipakai dalam pergaulan

sehari-hari di kalangan penduduk Salatiga dan sekitarnya adalah bahasa Jawa, sedangkan untuk kepentingan yang bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Di kalangan minoritas masih ada yang menggunakan bahasa ibu, namun jumlahnya terbatas.

Dalam bidang agama, mayoritas penduduk adalah beragama Islam. yang lain beragama Kristen Katolik dan Protestan, dan sebagian kecil beragama Budha, Hindu atau penganut aliran kepercayaan.

Dari segi adat istiadat, sebagian besar penduduk masih mengikuti tradisi sinkretisme Hindu-Jawa dan Islam, khususnya yang berkaitan dengan upacara daur hidup, yaitu tata upacara sejak dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Di sementara pedesaan pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme ternyata masih cukup kuat, ini terbukti dari adanya berbagai tradisi/upacara yang berkaitan dengan penghormatan terhadap nenek moyang, pendiri desa, tempat-tempat dan benda yang dikeramatkan, juga selamatan yang berkaitan dengan hajat bersih desa, penggarapan tanah, pembuatan rumah, ruwatan, di samping 50 kepercayaan *gugon tuhon* (*bijgeloof*) dan lain-lain.[50]

Dalam hal pendidikan di kota Salatiga, maju dengan pesat sejak awal abad 20. Berbagai macam sekolah baik negeri maupun swasta didirikan di kota itu. ELS (*Eropeesche Lagere School*) atau sekolah dasar berbahasa Belanda ada 3 buah, MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) atau sekolah menengah umum pertama ada satu buah, dan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) atau sekolah dasar berbahasa Belanda untuk pribumi ada satu buah. Sekolah Angka 2 atau *De Tweede Klasse School* ada lima buah, tersebar di desa-desa. Untuk orang Cina tersedia sebuah HCS (*Hollandsche Chinesche School*). Sekolah swasta bersubsidi ada satu, diusahakan oleh Zending Salatiga, bernama *Inlandsche School* terletak di desa Wonorejo. Sedangkan sekolah swasta ada tiga buah, yaitu HIS Zending, HIS Katolik dan THHK, bernama *Tiong Hoa Chu Tio*.[51]

Yang jelas, bahwa pada masa itu baik sekolah maupun jumlah muridnya amat terbatas, karena kebijakan politik kolonial yang diskriminatif. Sampai dengan masa kemerdekaan keadaan pendidikan

di Salatiga belum banyak mengalami perubahan. Di setiap kecamatan hanya ada satu atau dua sekolah dasar atau Sekolah Rakyat (SR), bahkan ada desa-desa yang memiliki sekolah baru sampai klas tiga atau empat.

Selama perang kemerdekaan berlangsung, banyak sekolah di pedalaman yang terhenti karena ditinggalkan guru-gurunya mengungsi. Hanya di beberapa daerah sekolah masih terus berjalan walaupun dengan sarana terbatas. Di Tengaran dan Suruh kegiatan sekolah terhenti sama sekali, sedangkan di Getasan masih berjalan seperti biasa. Di Bringin, yang menjadi daerah pendudukan Belanda, sekolah tetap berjalan di bawah perlindungan tentara. TNI sengaja tidak mengganggu kegiatan mereka, bahkan memanfaatkannya untuk kegiatan mata-mata.

Di Gogodalem yang waktu itu hanya sampai klas empat, untuk sementara waktu sekolah terhenti karena sekolah dibumi hangus dan gurunya ikut mengungsi. Berkat jasa Marsaid, guru SR Bringin sekolah di Gogodalem bisa dibuka kembali dengan meminjam rumah-rumah penduduk. Ia mengkoordinir pemuda tamatan Klas 3 HIS jaman Belanda untuk membantu mengajar. Sulitnya mendapatkan kertas dan alat tulis ternyata tidak mematahkan semangat belajar murid-muridnya. Mereka terpaksa menulis di atas daun pisang dengan nenggunakan lidi.[52]

Dalam bidang keagamaan, daerah ini memiliki tradisi pendidikan agama yang kuat. Sejak lama banyak pemuda daerah ini yang belajar mengaji ke pesantren-pesantren terkenal di luar daerah di Solo, Jawa Timur dan lain-lain. Tidaklah mengherankan jika kemudian hampir di setiap wilayah Salatiga muncul pesantren-pesantren, yang cukup terkenal.

4.2 Peranan Masyarakat Desa Salatiga pada Awal Kemerdekaan

4.2.1 Rakyat Salatiga Menyambut Proklamasi

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diterima di daerah Salatiga dua hari kemudian. Melalui berbagai cara, baik lewat

radio, pengumuman lewat pamong desa, komandan barisan, tokoh masyarakat dan berita dari mulut ke mulut berita itupun menyebar luas hingga ke pelosok desa. Rakyat menyambutnya dengan suka cita dan meluapkan kegembiraannya dengan berbagai cara dan bersifat spontanitas. Kalangan masyarakat Jawa umumnya yakin bahwa hari bahagia itu akan tiba, karena jauh sebelumnya sudah dimuat dalam ramalan Jayabaya, yang mereka yakini kebenarannya.

Walaupun, sebenarnya banyak di antara mereka yang sama sekali belum mengerti akan arti kemerdekaan, namun tidak mengurangi makna kegembiraan mereka. Ada yang melakukan sujud syukur., selamatan dan tindakan spontan yang lain. Di Tengaran, penduduk menyambutnya dengan mengadakan upacara pengibaran bendera di tanah lapang. Di Getasan, rakyat bekerja bakti membersihkan makam korban di masa Jepang. Ada pula yang kemudian iuran membeli kain merah dan putih untuk dibuat bendera atau lencana untuk ditempelkan di dada atau di topi. Di sanasini orang berkumpul membicarakan masalah kemerdekaan. Pekik dan salam "merdeka" dengan mengangkat tangan terkepal ke atas, juga panggilan "bung" yang berkesan demokratis dan akrab terdengar di mana-mana.[53]

4.2.2 Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat

Saat itu pengertian dan kesadaran rakyat akan arti kemerdekaan dan bernegara belum merata, masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, yaitu para pemuka masyarakat dan ulama. Oleh sebab itu peran mereka begitu besar. Melalui berbagai kesempatan seperti saat kotbah di mesjid dan pertemuan yang lain, mereka berusaha menjelaskannya sekaligus membangkitkan semangat dan keberanian rakyat untuk berjuang mempertahankannya.

Kecuali pemuda yang telah dilatih Jepang, di saat-saat awal proklamasi pada umumnya keberanian rakyat untuk berjuang mengangkat senjata masih rendah. Sikap represif penguasa kolonial, membuat rakyat trauma dan dihinggapi rasa takut. Semangat dan keberanian mereka mulai muncul berkat gemblengan para pemuka. Para ulama tidak henti-hentinya menyadarkan para santrinya akan kewajiban untuk berjihad membela tanah air, negara. dan agama dan

melawan penjajah. Untuk mempertebal keyakinan dan meningkatkan moril muncul fenomena baru di masyarakat yang berkenaan dengan adanya *ajian*, jimat, sipat kandel dan lain-lain. Banyak tokoh spiritual, kyahi dan "orang-orang sakti" muncul di sana-sini dengan karomah dan laku masing-masing. Masyarakatpun berbondong-bondong meminta berkah ke Kyahi Parakan, Kraton Solo dan tempat-tempat terkenal yang lain.

Walaupun sulit dibuktikan kebenarannya, namun hal itu terbukti berhasil membangkitkan keberanian rakyat untuk berjuang melawan musuh. Dalam manifestasinya ada perbedaan antara masyarakat awam dan pesantren. Motivasi masyarakat awam., umumnya dilandasi kerelaan berkorban demi kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Sementara di kalangan santri, selain kecintaan pada tanah air dan bangsa motivasi mereka juga dilandasi keyakinan agama yang begitu kuat., seperti mati syahid dan jihad. Oleh sebab itu keberanian mereka sering berlebihan bahkan kadang tidak masuk akal. Kematian nampaknya bukan lagi sesuatu yang ditakutkan, karena dambaan mereka adalah mati syahid dengan sorga sebagai imbalannya.

Para ulama mengartikan kata NU (Nahdlatul Ulama) sebagai Kebangkitan Ulama (*Nahdlatul* = *gemregah* (Jawa) atau bangkit), yang disambut pengikutnya dengan penuh antusias. Mereka kemudian menggabungkan diri pada kelaskaran Islam. Beberapa pondok pesantren terkenal yang nantinya menjadi basis perjuangan antara lain Pondok Popongan, desa Poncol, Bringin pimpinan KH Achmad, Pondok Tingkir pimpinan KH Zubair (alumnus Al Azhar Mesir), Pondak Metak di Susukan ditambah pondok-pondok kecil lainnya yang tersebar di hampir seluruh pelosok daerah Salatiga.[54]

Selama bulan Agustus hingga September rakyat Salatiga dibakar gelora semangat revolusi. Selain membentuk KNI, SKR dan badan-badan perjuangan, juga terjadi gelombang aksi corat-coret, pengambil-alihan gedung dan pembongkaran gudang logistik milik Jepang. Isi gudang dijarah, sebagian dibagikan pada penduduk yang telah lama menderita kekurangan bahan sandang dan pangan dan sebagian lainnya digunakan untuk mendirikan dapur umum bagi tentara dan laskar.

Tindakan anarkhispun terjadi di sana-sini. Di Suruh, rakyat bertindak nekad dan menjarah toko-toko milik Cina.[55] Di Ambarawa, pemuda AMRI berhasil menyita berpuluh-puluh buah mobil milik Jepang yang kemudian dibagikan ke kota-kota lain untuk membantu perjuangan. Mereka juga membentuk organisasi Persama (Persatuan Sopir dan Montir Angkatan Muda Ambarawa) guna mengurus kendaraan hasil rampasan.[56] Hingga sedemikian jauh Jepang tidak mengadakan reaksi terhadap aksi-aksi pemuda, selain mempertahankan markasnya.

Dalam pada itu keberadaan tentara Jepang dan beredarnya isu bahwa kehadiran Sekutu adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, membuat rakyat bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Latihan militer dan perlindungan sipil terus digiatkan. Di Salatiga, rakyat mulai membangun lubang-lubang perlindungan (*loopgraaf*). Di Susukan, begitu kentongan tanda siap" berbunyi, penduduk desa laki-laki perempuan, besar kecil segera turun ke jalan, memasang barikade dan berjaga-jaga dengan senjata seadanya

Sejak akhir September, situasi menjadi semakin genting. Aksi perlucutan senjata dan pengambil alihan markas tentara Jepang di Salatiga berlangsung tanpa insiden. Tentara Jepang yang jumlahnya kecil, tidak berkeberatan untuk menyerahkan senjata dan markasnya asalkan keselamatan mereka dijamin. Pertempuran melawan Jepang justeru terjadi di beberapa kata besar, seperti Jogyakarta, Magelang, Solo dan Semarang.

4.2.3 Ekses-ekses Revolusi di Salatiga

Di tengah kesibukan menghadapi Sekutu, di Salatiga terjadi ekses revolusi akibat berkobarnya semangat heroisme dan menonjolnya kepentingan pribadi serta kelompok. Gelombang aksi yang dipelopori Pesindo Salatiga, makin hari tambah meluas. Sasaran tidak lagi terbatas pada Jepang, tetapi juga merambah orang-orang sipil Belanda, Eropa dan Cina. Orangnya ditangkap dan dikonsentrasikan di Hotel Kalitaman, rumahnya diduduki dan harta bendanya habis dijarah massa rakyat.

Situasi kota Salatiga saat itu begitu kacau dan mencekam. Siang malam, pemuda-pemuda bersenjata berkeliaran di jalan-jalan melakukan pemeriksaan. Ancaman, teror, intimidasi, dan pemerasan merajalela. Seorang Cina melapor sambil membawa bukti bahwa dia dimintai uang sebanyak Rp. 90.000,- disertai ancaman jika tidak membayar rumahnya akan disita.[58] Massa rakyat yang jumlahnya ribuan membuat aparat pemerintahan sipil dan polisi tidak berdaya. Oleh sebab itu mereka bisa bertindak leluasa. Kesulitan makin bertambah ketika banyak oknum polisi yang bisa diperalat. Begitu kuatnya pengaruh mereka, sehingga bisa mendikte bahkan menonaktifkan aparat. Krisis pemerintahanpun terjadi. Rakyat menganggap bahwa kota Salatiga saat itu berada di bawah pemerintahan Pesindo.

Dalam situasi tersebut posisi Residen S. Karna yang juga tokoh Pesindo menjadi terjepit. Di satu pihak dia mengemban tugas pemerintah, di sisi lain pihak Pesindo berusaha memanfaatkan dirinya sementara dia juga mendapat tekanan dari lawan-lawan politiknya. Saat itu muncul berbagai reaksi melawan Residen S. Karna. Markas gabungan yang mewakili PT, polisi, MPP, ALFI, Kedokteran, Barisan Banteng, Lasykar Rakyat. SPRI, Masyumi, Pesindo dan Badan Pekeria KNI Daerah Salatiga melontarkan mosi tidak percaya. Mereka menggugat masalah keuangan, pembagian beras, penggunaan kendaraan, penyelenggaraan pasar malam amal untuk dana perjuangan dan lain-lain. Begitu beratnya tekanan mereka, sehingga pada pertengahan April 1946 Residen S. Karna mengajukan surat permahonan berhenti, namun ditolak oleh Pemerintah Pusat.[59]

Baru pada pertengahan Nopember 1946 kemelut di Salatiga bisa diatasi setelah PT turun tangan. Delapan orang tokoh Pesinda, yaitu Cipto Kriyip, Martadhi, Marzuki, Rushan, Sarban, Suleman, Min Baung dan Martosi ditangkap. Orang-orang Cina yang ditahan dibebaskan, sedangkan orang Belanda dan Eropa diserahkan pada pemerintah untuk diinternir. Rumah-rumah yang diserobot dan diduduki secara liar diambil alih pemerintah (Kantor Oeroesan Roemah-roemah) atau dikembalikan pada pemiliknya yang sah.[60]

Di tengah kesibukan menghadapi front Semarang, di Salatiga terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu kunjungan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk bertatap muka langsung dengan rakyat, peringatan Hari Kartini dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Kedua peringatan ini merupakan kejadian pertama di alam kemerdekaan, yang dimeriahkan dengan malam kesenian dan pameran. Peristiwa penting lain adalah berkaitan dengan Perjanjian Linggarjati. Semuanya itu disambut rakyat dengan meriah dan sangat besar artinya bagi perjuangan kemerdekaan.

4.3 Peranan Masyarakat Desa Salatiga pada Perang Kemerdekaan I

4.3.1 Belanda Menyerbu Salatiga dan Pengungsian Orang-orang Cina

Ketika pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I, saat itu kota Salatiga dapat dikatakan dalam keadaan kosong. Sebagian besar pasukan ditugaskan untuk memperkuat pertahanan di front MMTG, Ungaran, Klepu (Birisonta) dan Delik. Tidak seimbangnya kekuatan senjata membuat pertahanan TNI dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Pada siang hari itu juga tentara Belanda berhasil mencapai Salatiga.

Di saat pertempuran sengit terjadi di sekitar di Jalan Tuntang dan Jalan Solo, tiba-tiba pasukan TNI diserang dari belakang, sehingga pertahanan menjadi kocar-kacir. Setelah berhasil merebut Salatiga, Belanda ternyata tidak terus mendudukinya. Agaknya tujuan mereka hanya membebaskankan tawanan Belanda di Hotel Kalitaman. Selanjutnya mereka kembali lagi ke Tuntang.

Dengan mundurnya Belanda, maka TNI berkesempatan masuk kota dah berkonsolidasi kembali. TNI kemudian menyelidiki asal tembakan yang membokong mereka dan berkesimpulan bahwa tembakan berasal dari rumah orang-orang Cina di sepanjang Jalan Solo. Apapun motifnya, kejadian itu telah mengundang kecurigaan terhadap mereka. Sore hari itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang Cina di sepanjang Jalan Solo untuk mencari senjata dan

menangkap pelakunya. Berhubung pelakunya tidak ditemukan akhirnya semua orang Cina di Salatiga dibawa ke markas PT untuk diperiksa. Sebagian diangkut dengan truk, namun kebanyakan digiring berjalan kaki.

Mereka terdiri dari orang-orang dewasa laki-laki, perempuan dan anak-anak. Untuk menghindari resiko kehilangan,.mereka diijinkan membawa barang-barang berharga miliknya. Setelah diperiksa, barang-barang itu diserahkan kepada pihak PT dan mereka menerima kwitansi tanda penitipan dengan maksud jika keadaan sudah aman barang bisa diambil kembali. Dikarenakan jumlah mereka begitu banyak, sehingga tidak semua orang diperiksa.[61]

Di tengah kesibukan tersebut, terjadilah peristiwa di luar dugaan. rumah-rumah orang Cina yang kosong diserbu massa dan isinya dijarah. Kejadiannya berlangsung begitu cepat, seolah-olah ada yang mengkomando. Situasi begitu kacau dan TNI yang berjaga dibuat tidak berdaya. Hal ini dapat dimaklumi. TNI saat itu tengah berkonsolidasi setelah kocar kacir akibat gempuran musuh. Moril mereka begitu rendah akibat kekalahan dalam pertempuran siang harinya. Saat itu perhatian TNI dikonsentrasikan untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda, sehingga tidak siap, ketika tiba-tiba dihadapkan pada kejadian yang di luar dugaan. Lain dari pada itu jumlah personil TNI yang berjaga di dalam kota waktu itu, tidak ada artinya dibanding dengan ribuan massa rakyat yang beringas dan di antara mereka juga bersenjata api.

Adanya tanda khusus dan tulisan "*SOEDAH*" di rumah-rumah yang habis dirampok, jelas bahwa aksi tersebut ada yang mengatur. Jika melihat rentetan kejadian dan aksi-aksi Pesindo di Salatiga, dengan mudah orang bisa menduga siapakah penggerak tindakan anarkhistis tersebut.[62]

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar orang-orang Cina tidak diperalat oleh pihak Belanda, maka dengan persetujuan Residen pada malam hari itu juga kira-kira 3.000. orang Cina diungsikan ke luar kota. Rombongan dipecah menjadi dua, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok wanita serta anak-anak.

Pada kira-kira jam 20.00. rombongan pertama yang terdiri dari orang laki-laki diberangkatkan terlebih dahulu berjalan kaki menuju Tengaran, sementara orang-orang yang dicurigai diangkut naik truk dan dikawal ketat oleh PT. Jam 02.00 rombongan ini tiba di Tengaran. Setelah beristirahat sekitar satu jam, mereka meneruskan perjalanan ke Susukan dan tiba di sana jam 09.00. Di sini sekali lagi rombongan digeledah dan kemudian dipecah menjadi beberapa kelampok. Kelompok pertama, terdiri dari kurang lebih 259 orang diantaranya 3 wanita yang memaksa untuk mengikuti suaminya dikirim ke onderneming Goli; kelompok kedua, sebanyak 425 orang dibawa ke onderneming genteng, sedang sisanya dipecah dalam kelompok-kelompok kecil disebarkan ke beberapa tempat. Sebelum berangkat mereka mendapat ransum, masing-masing sebungkus nasi sayur dan bekal uang sebanyak Rp. 25,-[63]

Dari Tengaran, rombongan Goli menuju desa Tawang dan bermalam di sana selama empat hari. Tanggal 26 Juli mereka berjalan lagi ke Kradenan dan tinggal disini selama enam hari. Mereka baru tiba di Solo pada tanggal 15 Agustus. Akan halnya kelompok Genteng, sebelum diberangkatkan ke Solo mereka sempat bermalam beberapa hari di Mancung.

Rombangan kedua yang terdiri dari wanita dan anak-anak berjumlah sekitar 1.400 orang dan 100 orang laki-laki, baru pada jam 23.00. diberangkatkan dari Salatiga menuju Tengaran. Dibanding rombongan sebelumnya, jaminan makan untuk mereka nampaknya lebih baik. Dari Tengaran mereka dibawa ke onderneming Plaur dan beristirahat di sana selama enam hari. Dari Plaur mereka berjalan menuju Ampel terus ke Boyolali. Di sini rombongan di pecah menjadi dua kelompok dan rencananya akan diangkut dengan KA menuju Solo.

Pencana tersebut ternyata mengalami kesulitan, karena saat itu KA diprioritaskan untuk mengangkut tentara yang sedang ditarik mundur dari front depan. Keadaan menjadi semakin tidak menentu ketika ribuan arus pengungsi dari berbagai daerah mengalir ke pedalaman. Akhirnya, rombongan pengungsi Cina itu baru bisa diberangkatkan pada tanggal 10 Agustus dengan dua kali angkut.[64]

Keterlambatan itu ternyata membuat rombongan pengungsi yang telah lebih dulu tiba di Solo menjadi gelisah dan cemas menunggu kedatangan keluarganya. Kecemasan mereka makin bertambah dengan tersebarnya isu ada 30 orang gadis Cina yang sengaja dipisahkan dari rombongan dan tidak ketahuan nasibnya. Menghadapi situasi tersebut pengurus organisasi CHTH (*Cung Hua Tsung Hui*) Sala melancarkan protes terhadap pemerintah RI. Berkat kerja keras Ketua CHTH Salatiga, Oei Kie Hok dan pihak TNI, akhirnya semuanya bisa dijernihkan. Mereka tiba di Solo dengan selamat pada tanggal 10 Agustus sore hari. Seluruh pengungsi Cina itu ada 2.283 orang, yang kemudian diserahkan pada CHTH Solo. Sebagian dari mereka lalu bergabung dengan keluarga atau kenalan mereka, sementara yang lain ditampung oleh CHTH Solo.[65]

Walaupun semua permasalahan akhirnya menjadi jelas dan dapat diselesaikan, namun kejadian itu sempat menjadi isu internasional dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang anti Republik. Masalah pengungsi Cina Salatiga tersebut baru terselesaikan setelah tercapainya persetujuan Renville.

4.3.2 Jatuhnya Salatiga hingga Terbentuknya Garis Demarkasi

Berdasarkan pertimbangan taktis dan pengalaman sebelumnya, pimpinan TNI kemudian mengambil keputusan untuk melepaskan kota Salatiga setelah dilakukan bumi hangus. Malam itu juga dilakukan bumi hangus terhadap gedung Sositeit Harmoni di Jalan Taman Sari, Hotel Berg en Dahl, gedung NISVO (*Nederlandsch Indische Spoorweg Vrouwen Versnipping*) dan beberapa tempat lain yang dianggap vital agar tidak dimanfaatkan musuh.[66]

Selain itu ada juga rumah penduduk yang menjadi sasaran, misalnya rumah keluarga Oei Tiong Ham di jalan Tuntang juga rumah di sepanjang jalan Solo, Pecinan dan Tumenggungan. Daerah ini menjadi lautan api dan sasaran perampokan. Bumi hangus berlangsung sepanjang malam dan baru terhenti ketika Belanda masuk kota. Api segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke tempat lain. Kota Salatiga menjadi lengang karena ditinggalkan penghuninya mengungsi. Rumah orang-orang Cina dapat dikatakan

kosong, yang tertinggal hanya orang-orang tua, yang penyakitan atau lumpuh dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.[67]

Bumi hangus juga terjadi di kota-kota kecamatan, antara lain terhadap pasar Suruh, Kantor Asisten Wedana Bringin, rumah onderneming, sekolah dan stasiun Gogodalem. Kecuali itu sejumlah jembatan yang menghubungkan dengan kota Salatiga juga dihancurkan.[68]

Keesokan harinya, tanggal 23 Juli 1947 Belanda masuk kota Salatiga tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Rencananya mereka akan meneruskan gerakan ke Solo, tetapi terbentur pertahanan TNI di Tengaran. Sebelum Belanda bergerak lebih jauh, datang mosi Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan adanya gencatan senjata yang berlaku sejak tangggal Agustus 1947. Selanjutnya terjadi perundingan antara militer Belanda dan Republik. Di Jawa Tengah perundingan berlangsung di tiga tempat, yaitu di Gombong, Parakan dan Tengaran.

Dalam perundingan di Tengaran, delegasi RI diketuai oleh Letkol. Mursito, didampingi Residen Semarang dan Residen Surakarta, pihak Belanda dipimpin oleh Letkol. AJP-Brummer, dengan anggota Mayor FA. Semit, Kapten A.v. Vosveld dan Residen Salatiga Emanuel. Sedangkan KTN diwakili oleh Kolonel Survy dari Belgia dan Mayor Mackie dari AS. Akhirnya dicapai kesepakatan tentang garis demarkasi berikut ketentuan persyaratannya.[69]

Sesuai dengan instruksi Panglima Besar Sudirman, dengan pecahnya agresi maka secara otomatis instansi MPP Jawa Tengah dibubarkan. Sebagai gantinya di sepanjang garis demarkasi di wilayah Divisi IV dan Divisi V dibentuk komando operasi Pimpinan Pertempuran (PP), yang terbagi menjadi enam sektor dengan kode PP4A sampai dengan PP4F. Di wilayah Divisi II disusun Markas Komando (MK) yang terbagi menjadi sepuluh sektor dengan kode A sampai J. Semua sektor tersebut berada di bawah komando Panglima Divisi masing-masing.[70]

Melihat letak geografisnya, maka daerah Republik yang langsung berhadapan dengan daerah pendudukan Belanda di Salatiga adalah

daerah PP4A dan PP4B. Garis demarkasi di sektor ini berupa batas alam, yaitu aliran Kali Ketanggi atau Kali Bayarama, yang merupakan anak Sungai Serang. Di sepanjang garis demarkasi tersebut TNI menyusun pos-pos penjagaan sebagai berikut :

- Di sektor PP4A, karena letaknya strategis dan untuk menjaga penerobosan musuh ke arah Solo, pertahanan disusun dua lapis. Pos pertahanan di linie pertama terdapat di Ngaglik-Soka-Kembang-Jamblang-Tengaran Durensawit-Jembangan-Putatan-Karangwuni-Gentan. Di linie kedua, pos pertahanan tersebar di desa Pentur-Gondang-Ngadircio-Karangboyo-Sembung-Tegalrejo Sruwen-Sugihan dan Gondangwedelan. Markas komando sektor ini ada di desa Kalicacing, Ngampel, di rumah Sinderan (rumah Hardjosuwarto) di bawah pimpinan Letkol. Slamet Riyadi.
- Di sektor PP4B berhubung tidak menghadapi tekanan seberat di sektor PP4A, pos pertahanan hanya disusun satu lapis yaitu di desa Deresan-Karangtanggung-Klego-Pentur-Kacangan-Susukan-Karanggede dan Wonosegoro. Markas komando berada di Klego dipimpin oleh Letkol. Suyoto.

Selanjutnya, masing-masing sektor dibagi dalam COP (Comando Operasi Perempuran). Di antara para komandan COP di sektor PP4A adalah : daerah Tengaran Kapten Sarsono, Susukan Mayor Setyoko, Bringin Mayor Supardian. Pos-pos TNI tersebut berhadapan dengan pos Belanda yang tersebar di Ngaglik, Tengaran (rumah Haji Nakhrowi), Ngrandon, Karang Duren (rumah pertanian), pos Tingkir, Setugur, Bawangan, Dadapayam., Tempuran, Wiru, Getas, Bringin dan pos polisi Sumber Rejo.[71]

Secara resmi pada awal Juni 1947 laskar sudah dilebur dalam TNI, namun karena pelaksanaan di daerah terlambat maka sampai saat terbentuknya garis demarkasi masih ada kelompok laskar. Untuk menghindari benturan di antara mereka, masing-masing diserahi daerah tanggung jawab tertentu secara permanen di bawah komando pihak TNI. Aplosan diatur oleh komandan masing-masing dan dapur umum diselenggarakan oleh kesatuan setempat.

Sebagai penghubung antara pihak RI dengan Belanda dibentuk Polisi Keamanan (PK) dari kesatuan Mobrig. Mereka mengenakan

tanda ban lengan warna merah dengan huruf putih PK. Sebaliknya VIP *(Veiligheid Politie)* Belanda mengenakan ban lengan warna oranye dengan tulisan VP. Keduanya dipersenjatai secara khusus agar tidak dikacaukan dengan kesatuan lain.[72] Hanya VP dan PK inilah yang dibenarkan melintasi batas demarkasi untuk mengadakan kontak dengan pihak lawan guna menyelesaikan permasalahan di antara kedua belah pihak.

Adanya garis demarkasi, ternyata menimbulkan ekses di kalangan pejuang Republik. Sebagian bisa menerima sikap pemerintah, namun ada juga kesatuan yang kecewa sehingga tidak mematuhi perintah atasan. kehadiran PK dari kesatuan polisi Solo, dengan seragam dan persenjataan baru, ditambah jaminan logistik yang lebih baik dibanding kesatuan lain, telah melahirkan kecemburuan dikalangan pejuang. Umumnya mereka berpendapat bahwa senjata itu lebih mereka butuhkan untuk terjun di front daripada untuk PK yang sekeder berjaga-jaga dalam keadaan damai.

Puncak kejadian itu adalah pecahnya insiden di Bringin. PK dilucuti kemudian dipaksa meninggalkan pos dan patok-patok tanda batas demarkasi dicabuti. Kejadian ini sempat menggegerkan induk kesatuan. Untuk menghindari benturan diupayakan jalan damai. Akhirnya pejuang yang diwakili Mayor Supardjan bersedia mengembalikan senjata yang dirampas. Dari 36 pucuk seniata, hanya 13 yang diserahkan kembali dan sisanya dianggap hilang.[73]

4.3.3 Situasi di Daerah Pendudukan Belanda

Pada saat TNI mundur dari Salatiga, banyak aparat pemerintah RI dan penduduk yang mengungsi mencari tempat yang aman di luar kota. Residen Semarang S. Karna mengungsi ke Purwodadi, Bupati Semarang Sumardjito dan stafnya ke Boyolali, Walikota Salatiga Soemitro dan stafnya mundur ke Sulursari, Kabupaten Grobogan. Komunikasi di kalangan pemerintahan sipil dilakukan dengan sistim kurir. Salah seorang yang cukup dikenal sebagai kurir untuk informasi yang sangat rahasia adalah MS. Handjojo, Patih Kabupaten Semarang.[74]

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Belanda membentuk pemerintahan *Recomba* (*Regerings Commisie voor Bestuurs Angelegenheden*) atau pangreh praja, dengan memanfaatkan pagawai-pegawai Indonesia yang tidak ikut mengungsi. Asisten Residen dijabat oleh Emanuel kemudian digantikan oleh Husen. Wedana Salatiga R. Iskandar Notosoegondo, sedanakan Kepala Polisi adalah Soen Kie dan De Groen.[75] Untuk mengurusi bantuan kepada pribumi, Belanda menunjuk Haji Ismail.[76]

Selain itu Belanda juga mendirikan beberapa dinas dan jawatan, antara lain Kantor *Voor Rachtshestel dan Algemene Distributis Dienst* (ADD). Dalam ADD terdapat dua bagian, yaitu *Plattelands Distributie* yang mengurusi bantuan untuk para pegawai atau pekerja. Adapun bantuaan yang diberikan atau dijual dengan harga murah adalah susu, keju, roti, mentega dan hampir semua bahan kebutuhan sehari-hari. Adanya ADD tersebut selalu dijadikan alat propaganda bagi Belanda untuk menarik simpati orang-orang Republik agar mau menyeberang.[77]

Melalui Jawatan Penerangan atau RVD (*Regerings Voorlichting Dienst*) Belanda berusaha menyiarkan propaganda untuk menanamkan kepercayaan rakyat. Sedangkan DLC (*Dienst der Leger Contacten*) setiap saat memberikan indoktrinasi kepada tentara KL dan KNIL tentang misi suci Belanda di Indonesia. Waktu itu Radio Semarang selain sebagai alat propaganda juga menjadi media penyebaran kebudayaan Barat.

Di daerah pendudukan Belanda memberlakukan uang NICA untuk menagantikan uang Jepang dan ORI. Walaupun resikonya amat besar karena bisa dituduh mata-mata Republik, namun banyak juga yang secara diam-diam menyimpan uang ORI sebagai kebanggaan maupun untuk kepentingan berbelanja di daerah Republik. Secara berangsur-angsur banyak orang yang tadinya mengungsi kemudian kembali masuk kota karena tidak tahan dengan penderitaan di daerah pengungsian. Pasar-pasar dibuka kembali sehingga kehidupan ekonomi berjalan normal. Selain itu sekolah-sekolah juga dibuka kembali. Buku-buku paket dicetak jauh sebelumnya, yaitu sewaktu Van Mook masih berada di Australia. Bahasa Belanda kembali

menjadi bahasa pengantar dan diskriminasi terhadap sekolah pribumi diterapkan kembali.[78]

Bagi rakyat yang tinggal di daerah pendudukan, posisi mereka amat sulit dan hidup mereka banyak yang menderita. Selain di curigai kedua belah pihak, mereka juga dianggap kurang Republiken. padahal tidak sedikit dari mereka yang tetap berjiwa republik dan anti Belanda. Ada yang keberadaannya di daerah pendudukan justeru ditangan pihak Republik agar bisa membantu perjuangan, dengan cara mengkoordinir bantuan/suplai ataupun memberi informasi, perlindungan dan tempat bersembunyi bagi pejuang yang menyusup ke dalam kota. Sebagai contoh adalah Mantri Kesehatan Binoso, Secara diam-diam, dia selalu mengadakan kontak dengan pejuang melalui Darma Kiyat, Lurah Noborejo. Obat-obatan dikirim lewat seorang kurir bernama Maryam, yang menyamar sebagai pedagang.[79]

Selain membentuk pemerintahan tingkat kabupaten, Belanda juga mengangkat pegawai di tingkat kecamatan dan pamong desa yang kasong karena ditinggal mengungsi. Posisi pejabat federalis ini juga terjepit, karena selalu dicurigai oleh kedua belah pihak. Agar selamat mereka harus pandai-pandai berkepala dua dengan segala resikonya. Banyak di antara mereka yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbongkar rahasianya, seperti misalnya Jayus, Lurah Klero. Di kalangan pejuang dia dikenal sebagai lurah federalism yang republiken. Bantuannya terhadap perjuangan begitu besar.[80]

Sebaliknya, banyak juga pejabat federalis yang benar-benar pro Belanda. Mereka amat berbahaya dan banyak memakan korban di kalangan pejuang. Untuk menyingkirkan mereka, pejuang menempuh berbagai cara seperti diculik kemudian dieksekusi, sebagaimana dialami Camat Bringin dan Lurah Desa Sumberejo, Sugiri. Cara lain adalah memfitnah mereka sebagai mata-mata Republik agar ditangkap Belanda. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak pamong desa, baik yang pro maupun yang anti Belanda kemudian bertemu di penjara Belanda.[81]

Untuk menjaring informasi lawan, Belanda menyebar mata-mata, yang dikoordinasikan oleh IVG (*Inlichtingen Veiligheids Groep*)

ataupun Nefis. Kekejaman mereka tidak kalah dari *Kenpetai* di jaman Jepang. Adapun susunan staf IVG Salatiga adalah :

Komandan	:	Lettu. Draaisma
Wakil Komandan	:	De Liezer (ex Administrator ondernemina kopi)
Anggota tim Screening	:	Van Beeks, Hiks, Sutayo, Saban Purnamo. Temu, Sunaryo Holan Sumodilogo, Sunawan, Parwoto dan Tan Soen Am
Kepala Staf I	:	Sersan Michael alias Djajusman, digantikan Tommy Suryadi alias Tommy Tondolong
Anggata penyelidik	:	Sersan Swart (Kepala), Sastra Suratman (Wakil Kepala) dan anggata Diaenur. Rasmal Slamet dan Gito

Tawanan IVG Salatiga biasanya mengalami siksaan fisik yang berat. Di sini mereka dihadapkan pada empat kemungkinan, yaitu dieksekusi di Kedayon, dikirim ke Nusakambangan, penjara Ambarawa atau dibebaskan. Untuk mengeksekusi pejuang yang tertangkap, pihak IVG telah menyiapkan satu peleton algojo dari *Tiger Brigade.* Tempat eksekusi lain adalah di Kedungringin.[82]

Untuk menghadapi gerilyawan Belanda juga membentuk pasukan bersenjata di kalangan orang Cina, yang diberi nama *Po An Tui.* Untuk memojokkan penerintah RI di percaturan politik internasional Belanda memanfaatkan masalah pengungsi Cina dan masalah rasial yang terjadi di beberapa daerah. Dalam hal ini Belanda mendapat dukungan dari sejumlah harian Cina, seperti *Kenapo, Sin Mi-n, Sin Po* dan lain-lain yang terbit di daerah pendudukan.

Selama itu Belanda dibuat kewalahan oleh munculnya aksi-aksi gerilya berupa pencegatan patroli, serangan gelap, sabotase, penyusupan, pendirian di markas dan di rumah dinas Belanda, juga penyelundupan. Untuk memudahkan pengawasan, setiap orang

diharuskan memiliki surat penduduk. Orang yang bepergian ke daerah lain harus memiliki surat pas jalan. Razia dan penggeledahan dilakukan di pos-pos Belanda di batas kota.[83] Walaupun patroli, jam malam dan razia diperketat namun aksi gerilya terus berjalan. Untuk menekan aksi tersebut, dalam Perjanjian Renville Belanda menuntut penarikan pasukan TNI dari daerah kantong-kantong gerilya.

4.3.4 Situasi di Daerah Republik

Walaupun menghadapi tekanan politik dan Militer Belanda, namun roda pemerintahan dan kehidupan rakyat sehari-hari di daerah Republik diusahakan tetap berjalan. Blokade ekonomi Belanda dan mengalirnya arus pengungsi, membuat situasi ekonomi dan sosial di wilayah Republik yang sempit menjadi bertambah berat.

Di beberapa tempat, pasar tetap berjalan seperti biasa. Kadang-kadang kegiatan terhenti sementara waktu jika ada gangguan pihak Belanda. Setelah gangguan lewat pasar kembali seperti sediakala. Untuk daerah Tengaran pasarnya ada di dua tempat, yaitu di Tugu dan Tengaran. Getasan pasarnya di Sribadak. Sedangkan untuk daerah Bringin, setelah diduduki Belanda pasarnya lalu pindah ke Gogodalem. Demikian juga halnya dengan pasar Suruh dan Susukan. Berhubung situasi perang barang dagangan di pasar pedalaman biasanya kurang lengkap sehingga banyak orang yang terpaksa pergi ke daerah pendudukan.

Selama perang berlangsung peran masyarakat begitu besar. Secara untuk peran mereka dapat dipilahkan pada, beberapa kegiatan, yaitu yang menyangkut pertempuran, kegiatan mata-mata, dukungan logistik, komunikasi dan kesehatan.

4.3.4.1 Pembentukan Pasukan Gerilya Rakyat

Sejalan dencan reorganisasi APRI, walaupun agak terlambat namun program itu tetap dilaksanakan. Adanya ketentuan perbandingan jumlah personil dan senjata 3 : 1 membuat banyak anggota lasykar yang tidak masuk dalam formasi TNI. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok gerilya rakyat di bawah

komando TNI Masyarakat dan diurus oleh Bagian V Kementerian Pertahanan.

Di daerah Salatiga pasukan gerilya rakyat tersebar di beberapa daerah antara lain di sektor PP4A ada tiga kelompok, yaitu MPR (Markas Pertahanan Rakyat), Pasukan Merbabu I dan Pasukan Merbabu II. Pasukan MPR bergerak di daerah Tuntang, Bringin sampai Kedungjati, dipimpin aleh Mulyono, Saerodji dan Akhmad. Pasukan Merbabu I pimpinan Samsuri bergerak di daerah Getasan, sedangkan Pasukan Merbabu II atau Barisan Tahan Udji (BATU) bergerak di Tengaran sebelah barat jalan, dipimpin oleh Sastra Sadjat dan Ruslan.

Di sektor PP4B terdapat tiga kelompok gerilya, yaitu Pasukan Merbabu III, Pasukan MKB/SS dan MSAP Betas. Pasukan Merbabu III pimpinan Suntoro, bergerak di Tengaran di sebelah Timur jalan. Pasukan MKB/SS (Markas Kuda Besi/Sabotase Service) berasal dari kesatuan ALRI dipimpin oleh Mayor Sukiswo. Markasnya ada di Karanggede dan daerah operasinya sampai ke daerah Suruh.[84]

MGAP (Markas Babungan Angkatan Perang) adalah merupakan gabungan kelompok gerilya di daerah Bringin. Markasnya berada di Wonosegoro di bawah pimpinan Mayor Supardian. Di dalamnya tergabung Pasukan Djelata pimpinan Surya mentaram, Barisan Banteng pimpinan Harya, pasukan Bintang Hitam pimpinan Mayor Haryoto, Pasukan Pringgodani pimpinan Karno yang anggotanya adalah para pegawai Jawatan Penerangan Kabupaten Semarang, pasukan Macan Putih (dari Hisbullah) pimpinan Sonhadji, Gerilya Hisbullah pimpinan M. Taha, juga Barisan Maling pimpinan Saerodji dan lain-lain.[85] Di samping itu masih banyak kelompok gerilya seperti Barisan Clurut, Berisan Pendem dan lain-lain.

Berbeda dengan TNI yang terikat pada ketentuan perjanjian dan formalitas, gerilyawan merupakan kelompok bebas. Mereka aktif dalam aksi pencegatan patroli musuh, sabotase, penyusupan, terar, penculikan, juga mata-mata. Taktis kamando mereka berada di bawah Komandan COP atau Komandan Sektor. Dalam operasinya mereka bisa menentukan opzet gerakan sendiri, kemudian melaparkan hasilnya dengan menyetorkan barang bukti hasil gerakan.

Serangan terhadap pos-pos Belanda biasanya dilakukan malam hari. Untuk menghindari saling serang dengan sesama kawan, maka baik sasaran, rute perjalanan, tempat konsolidasi, kode sandi dan lain-lain sudah ditentukan sebelumnya. Berbagai aksi besar mereka antara lain sabotase terhadap PLTA Jelok oleh pasukan MPR di bulan Juni 1948 disusul aksi sabotase pasukan MKB/SS atas instalasi air minum Senjoyo. Pada bulan Juli terjadi demonstrasi massa menggeser patok tanda batas demarkasi di Tengaran dan beberapa tempat lain. Walaupun aksi ini gagal dan dibubarkan oleh tembakan tentara Belanda, namun perlu dicatat sebagai satu tindakan yang heroik.[86]

Belanda benar-benar dibuat kewalahan menghadapi aksi-aksi gerilya yang melelahkan dan banyak menimbulkan kerugian. Biasanya mereka melakukan pembalasan pada siang hari dengan bombardemen, tembakan kanon ataupun pembersihan secara membabi buta dan rakyatlah yang menjadi sasaran.

4.3.4.2 Kegiatan Mata-mata

Selain mengadakan aksi militer, gerilyawan juga membentuk jaringan gerakan bawah tanah. Pos-pas gerilya disusun baik di dalam maupun di luar kota dan berfungsi sebagai markas ataupun tempat persembunyian. Di Salatiga pas gerilya terdapat di Sambetan dan Karangmulyo.

Kelompok gerilyawan yang mengkhususkan diri pada kegiatan mata-mata adalah Barisan Pendem (barisan terpendam). Anggotanya tersebar dan membentuk jaringan luas, dengan menyamar sebagai pencari kayu, penyabit rumput, penggembala ternak. Ada juga yang bekerja menjadi jongos, pembantu, tukang kebun, sopir atau pegawai di markas ataupun rumah orang Belanda, bahkan ada yang menyamar sebagai pasien di rumah sakit. Informasi tentang situasi daerah pendudukan maupun gerakan lawan dikirim melalui jaringan khusus.[87]

Seperti kita ketahui bahwa di daerah Salatiga terdapat banyak pos pertahanan TNI yang berhadapan langsung dengan pos Belanda. Untuk memudahkan pengawasan, TNI hanya membuka pos-pos tertentu sebagai daerah perlintasan. Sehubungan dengan adanya pelintas batas khususnya para pedagang, TNI justeru berkepentingan

terhadap mereka untuk kegiatan mata-mata. Mereka kebanyakan adalah wanita yang tidak begitu dicurigai musuh. Hampir setiap hari mereka ke luar masuk daerah pendudukan, sehingga paham betul situasi di sana, bahkan ada yang bisa ke luar masuk markas Belanda dengan agak leluasa kerena melayani kebutuhan suplai dapur umum. Dari mereka inilah TNI memperoleh banyak informasi tentang situasi di kota, letak pos pertahanan, jumlah kekuatan musuh dan lain-lain.

Untuk mengimbangi aksi gerilya. Belanda menyebarkan jaringan mata-mata yang direkrut dari berbagai lapisan. Mereka ini amat berbahaya karena sering memfitnah, sehingga banyak rakyat yang menjadi korban. Mereka menjadi musuh utama dan masuk target operasi gerilyawan untuk diculik dan dibunuh. Pejuang tak kenal ampun pada mereka. Jika seseorang terbukti menjadi mata-mata Belanda, mereka tak luput dari hukuman mati. Mereka yang tertangkap rakyat, nasibnya lebih tragis. Sebelum dibunuh mereka disiksa beramai-ramai. Dalam situasi demikian, tidak sedikit orang menjadi korban fitnah dan dendam pribadi.[88]

4.3.4.3 Peranan Pamong Desa

Sejak perang melanda kota Semarang, Ungaran, Ambarawa dan Salatiga di bagian utara, maka daerah perbatasan seperti Tengaran dan lain-lain ramai dilewati ribuan pengungsi. Ada yang sekedar lewat kemudian meneruskan perjalanan ke daerah lain, namun banyak pula yang kemudian menetap. Dalam hal ini peran pamong desa menjadi begitu penting. Di desa-desa yang dilalui atau ditempati pengungsi, para pamong desa mengkoordinir rakyat untuk menyediakan tempat penampungan dan jamunan sekedarnya. Umumnya rakyat menerima kehadiran pengungsi dengan tangan terbuka dan memberikan bantuan. Sebaliknya, sebagai imbalan para pengungsi membantu pekerjaan penduduk sesuai kemampuan dan keahliannya. Gejala yang muncul dengan membanjirnya arus pengungsi ke pedalaman ialah munculnya pasar tiban.

Begitu strategisnya peranan pamong desa, maka mereka menjadi rebutan kedua belah pihak. Masing-masing menyadari bahwa dengan menguasai pamong desa berarti menguasai sebagian massa rakyat.

Ketika Salatiga jatuh ke tangan Belanda, banyak pamong desa yang pergi meninggalkan desanya mengungsi ke tempat lain. Untuk mengisi kekosongan tersebut Belanda kemudian mengangkat pamong desa baru yang diharapkan loyal pada pemerintah federal. Di sini kedudukan pamong desa menjadi terjepit. Di satu pihak dia harus loyal pada Belanda, sementara di sisi lain dia ditekan oleh pihak Republik. Demi keselamatan diri, banyak di antaranya yang terpaksa berkepala dua. Sebelum diangkat oleh Belanda secara diam-diam menghubungi pihak pejuang dan minta persetujuan. Dengan cara demikian, mereka akan selamat dari incaran gerilyawan tetapi sebagai konsekwensinya harus membantu, perjuangan. Melalui kurir khusus mereka harus selalu kontak dengan pejuang dan secara diam-diam mengkoordinir rakyatnya untuk membantu bahan pangan, pakaian, uang, obat-obatan. bahkan senjata bagi perjuangan.

Dalam kenyataan pada umumnya mereka masih berjiwa republik. Dari 25 desa di daerah Bringin hanya ada empat desa yang pamong desanya benar-benar pro Belanda, yaitu Ngrembes, Nglebak, Bringin dan Sumber.[92] Di Kecamatan Tengaran, dari 20 desa hanya empat yang pro Belanda, yaitu pamong desa Karangduren, Bener, Regunung dan Cukil. Jiwa republik para pamong desa Tengaran itu nampaknya didukung oleh W edana, Wiryo dan Camat, Siswo. Secara diam-diam mereka sering mengadakan pertemuan rahasia. Rumah dinas Wedana dan Camat Tengaran waktu itu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi pejuang.[93]

4.3.4.4 Dukungan Logistik

Dengan terbentuknya garis demarkasi, kesibukan rakyat di desa-desa yang menjadi pos pertahanan TNI meningkat. Mereka harus merelakan rumahnya untuk dijadikan markas, asrama, pos PMI maupun dapur umum pasukan. Di bawah pimpinan pamong desa mereka membantu keamanan dengan melakukan ronda dan jaga malam. Kecuali itu juga menyelenggarakan dapur umum, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu dapur umum besar dan dapur umum kecil.

Dapur umum besar adalah dapur umum yang diselenggarakan oleh COP setempat atas biaya divisi untuk melayani pasukan resmi dalam jumlah besar. Berhubung bahan yang dimasak begitu banyak, untuk menasaknya sampai-sampai menggunakan drum. Petugas masak di sini dibantu sejumlah tentara dan lasykar putri. Rakyat yang membantu mendapat imbalan setengah liter beras sehari. Dapur umum kecil diadakan, atas inisiatif penduduk setempat di bawah koordinasi para pamong desa. Dapur umum ini sifatnya insidentil. Mereka bekerja secara sukarela dan tampa mendapat imbalan. Bahan makanan dikumpulkan dari rakyat kemudian dimasak dan diserahkan pada pejuang yang kebetulan lewat atau singgah di desanya. Bahan yang dimasak juga tidak begitu banyak, hanya untuk sekitar dua atau tiga regu pasukan. Di samping itu, ada pula penduduk yang secara pribadi memberi makan para pejuang sebagai tanda simpati.[89]

Akan halnya pasukan gerilya rakyat, karena tidak masuk dalam formasi pasukan resmi, maka kebutuhan logistik mereka sepenuhnya tergantung dari bantuan rakyat. Biasanya hubungan gerilyawan dan rakyat cukup dekat, bahkan ada yang mengganggapnya seperti anak sendiri sehingga tidak sampai hati untuk menelantarkannya. Kesadaran rakyat yang cukup tinggi, membuat mereka tidak sampai kekurangan perbekalan. Untuk memenuhi kebutuhansuplai pasukan juga ditempuh sistim "*inkwartering*". Di Suruh, para komandan pasukan bekerjasema dengan para pamong desa. Anggota pasukan yang lepas tugas kemudian dititipkan pada keluarga petani yang ditunjuk pamong desa setempat. Selama *inkwartering*, mereka harus bekerja membantu pekerjaan petani dan sebagai imbalan mendapat jaminan makan.

Walaupun Pasukan gerilya tidak masuk dalam formasi tentara resmi, namun secara periodik mereka masih mendapat bantuan dana dari pusat. Sebagaimana dialami pasukan MGAP Getas, bantuannya berupa candu (opium), yang kemudian dijual secara gelap guna biaya pasukan. Mereka mendapat jatah kiriman candu sebanyak 20 butir kemudian dijual kepada pedagang gelap seharga 20 *gulden* per butir, yang menjualnya lagi ke daerah Merapi. Sebagai gambaran betapa tingginya harga candu, harga beras waktu itu hanya 3,5 sen per kilogram. Sumber dana perjuangan yang lain adalah bekerjasama dengan pedagang pelintas batas

4.3.4.5 Jaringan Komunikasi

Dikarenakan terbatasnya sarana komunikasi, maka hubungan antar pasukan dan antar daerah dilakukan lewat kurir, secara berantai dari satu pos ke pos yang lain.

Kelompok gerilya yang berperan besar dalam kegiatan komunikasi adalah Barisan Clurut. Dalam bahasa Jawa clurut adalah nama binatang sejenis tikus. Sedangkan kata clurut bagi nama pasukan tersebut, diambil dari kata *"clurat-clurut"*, yang artinya bergerak melayang atau meluncur, sesuai dengan kegiatan mereka yang menuntut mobilitas tinggi. Mereka harus bergerak cepat, meluncur (Jawa clurat-clurut) dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan informasi. Anggota Barisan Clurut kebanyakan berasal dari Kelasykaran Islam. Mereka memiliki keahlian dalam gerakan penyusupan. Sebagaimana halnya anggata Barisan Maling, mereka juga menguasai ilmu magic seperti "ilmu sirep" dan lain-lain. Dengan ilmunya mereka bisa membuat orang tertidur lelap, sehingga memudahkan manyusup ke markas musuh.

Kelompok lain yana berperan besar dalam hal komunikasi adalah para pedagang lintas batas. Selain sebagai mata-mata, mereka ternyata juga kurir yang efektif. Tugasnya banyak menempuh bahaya, karena harus menyelundupkan dokumen penting, obat-obatan, juga senjata melewati pos-pos pemeriksaan musuh yang penuh resiko. Lewat mereka berbagai informasi dan keperluan perjuangan yang lain bisa sampai di tangan para pejuang. Mereka menjadi mata rantai penghubung antara gerakan bawah tanah di kota pendudukan dengan pejuang di daerah Republik. Dengan demikian sumbangan mereka terhadap perjuangan cukup besar. Tanpa peran mereka kiranya sulit bagi para pejuang untuk menyusun strategi perlawanan.

4.4 Situasi Salatiga di masa Perjanjian Renville

Sampai dengan berlakunya persetujuan Renville, pola perjuangan rakyat di daerah Salatiga tidak banyak mengalami perubahan. Untuk melemahkan ekonomi musuh TNI juga melakukan blokade dengan melarang/membatasi penduduk membawa masuk barang jenis tertentu

ke daerah pendudukan. Nampaknya waktu situ tidak ada koordinasi antar sektor, terbukti antara pos yang satu dengan yang lain ketentuannya tidak sama. Akibatnya blokade tidak berjalan efektif. Di Bringin yang menjadi barang larangan adalah garam, di Susukan gula pasir, di Getasan ternak dan beras, di Guruh ternak dan gula, sementara di Tengaran nampaknya lebih longgar. Kelemahan tersebut agaknya telah dimanfaatkan Belanda dalam mencukupi kebutuhannya, sehingga blokade tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perekonomian musuh.[94]

Dengan adanya Renville Belanda berhasil membulatkan wilayah kekuasaannya, sebaliknya kedudukan RI semakin terjepit. Di sini Belanda sengaja melakukan berbagai provokasi dan memancing-mancing pertikaian agar mempunyai alasan untuk melancarkan agresi. Misalnya, pada tanggal 16 Pebruari 1948 mereka mengadakan latihan perang di desa Tolokan, yang terletak kira-kira 3 Km dari Kopeng. Latihan perang tersebut diikuti oleh 40 orang serdadu Belanda dan 400 orang eks *Heiho*, didukung sejumlah tank, meriam dan senjata berat lainnya. Walaupun hanya latihan, namun hal itu jelas marupakan pelanggaran karena dilakukan di daerah demiliterisasi.[95]

TNI sebagai tentara resmi, dalam hal ini tidak bisa bertindak bebas karena terikat norma international. TNI terpaksa menahan diri agar tidak terpancing taktik lawan. Sebaliknya, kelompok gerilyawan yang tidak terikat pada formalitas secara spontan bisa membalas manuver Belanda. Aksi-aksi gerilya rakyat selama ini ternyata sangat menguntungkan Republik. Selain membatasi gerakah musuh, membuat mereka resah dan merasa tidak aman, yang lebih penting adalah memelihara moril dan kepercayaan rakyat bahwa tentara Republik masih ada.

Di tengah berlakuknya perjanjian Renville, RI berkesempatan untuk menyelesaikan masalah penglingsi Cina. Setelah kira-kira tujuh bulan berada di pengungsi pada bulan Pebruari 1948 gelombang pertama pengungsi Cina sebanyak 548 orang mulai dikirim kembali ke Salatiga. Mereka diberangkatkan dari Solo dengan KA, didampingi petugas PMI yang akan menyerahannya pada Palang Merah Internasional di Semarang. Dari Semarang mereka diangkut dengan

truk ke Salatiga. Pada bulan Maret dilakukan evakuasi gelombang kedua sebanyak 600 orang, disusul gelombang ketiga di bulan April sebanyak 982 orang. Sampai dengan akhir Mei 1943 ada 2.166 orang pengunasi Cina yang telah kembali ke Salatiga, sedangkan sisanya memilih tinggal di daerah Republik.[96]

Sewaktu akan berangkat dari Solo pemerintah RI memberi mereka uang ORI untuk keperluan belanja. Setiba di daerah pendudukan ternyata uang tersebut tidak bisa digunakan, karena yang berlaku adalah uang "merah" atau uang NICA. Atas usaha CHTH Salatiga, mereka mendapat bantuan sebanyak 15 gulden per orang. Berhubung rumah mereka banyak yang rusak berat dan tidak bisa ditempati, untuk sementara waktu mereka harus tinggal di kamp-kamp penampungan yang didirikan oleh CHTH Salatiga dan pemerintah pendudukan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi yang tinggal di kamp, CHTH Salatiga mendirikan dapur umum. Sedangkan mereka yang tinggal di luar diberi jatah beras sebanyak 200 gram per jiwa selama tiga hari. Sementara itu bantuan dari CHTH daerah lain berupa pakaian, pangan, obat-obatan dan bahan bangunan berdatangan dan mereka mulai membangun lagi kehidupannya.[97]

Dalam pada itu perjanjian Renville ternyata juga berdampak politis. Berawal dari sikap pro dan kontra suhu politik dalam negeri RI makin hari semakin panas, disusul pecahnya insiden bersenjata di kota Solo. Untunglah kejadian itu tidak merambat ke Salatiga. Pertentangan di sini masih terbatas pada saling ejek di antara kelompok yang bertikai, belum sampai pada konflik fisik.

Menjelang pecah gerakan PKI Madiun, di Salatiga terjadi beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah perpecahan di kalangan Pasukan TLRI mereka yang tetap setia pada RI memisahkan diri ke sebelah Barat jalan di bawah pimpinan Kasban, sedang kompi Tembong yang pro Komunis mengikuti jejak Kolonel Yadau bergerak ke Pati terus ke Madiun. Kejadian lain ialah tertangkapnya seorang pelarian Komunis di daerah Susukan. Sewaktu ditangkap ia membawa satu kantong besar berisi uang ORI pecahan Rp. 400, yang ternyata belum beredar di masyarakat.[98]

Sementara itu gejala Belanda akan mengingkari Renville mulai nampak. Pembicaraan antara RI dan Belanda selalu menemui jalan buntu. Insiden dan pelangaaran di sepanjang garis demarkasi sering terjadi. Sejak bulan Nopember agaknya Belanda mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan invasi terhadap RI.

4.5 Peranan Masyarakat Desa Salatiga pada Perang Kemerdekaan II

4.5.1 Jalannya Pertempuran

Bersamaan dengan serangan terhadap ibukota RI, Jogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda di Salatiga juga bergerak ke Solo. Beberapa hari sebelumnya kesibukan mereka tampak meningkat. Hampir setiap hari pesawat capung Belanda terbang berputar-putar mengadakan pengintaian. Sore hari menjelang gerakan, kota Salatiga diliputi kesibukan dan suara hingar bingar. Sejumlah truk bertuliskan "Naar Solo" berikut persenjataan berat persenjataan berat disiapkan. Keesakan harinya sebelum pasukan mulai bergerak, dari markas artileri di Ngebul Belanda melancarkan serangan kanon ke berbagai penjuru. Akibatnya pertahanan TNI kocar-kacir, banyak desa hancur dan rakyat menjadi karban.[99]

Dari Salatiga konvooi pasukan Belanda bergerak menuju Solo dikawal sejumlah senjata berat dan pesawat udara. Walaupun TNI berhasil menghancurkan jembatan Kali Ketanggi, namun tidak banyak menghambat gerak maju musuh. Dengan cepat mereka memasang jembatan bailley sehingga pasukan dapat terus bergerak maju.[100]

Di Tengaran mereka dihadang TNI dan pertempuran sengitpun terjadi. Dalam pertempuran tersebut gugur lima orang anggota Parisan Kyahi, yaitu Kyahi Mawardi (Ketua NU Tengaran), Kyahi Zahrodji. Kyahi Badjuri, Kyahi Amri dan Kyahi Dulbari, yang terjebak dalam kepungan musuh sewaktu TNI bergerak mundur. Mereka menolak untuk menyerah dan terus melawan dengan gagah berani hingga akhirnya gugur. Akibat cegatan itu, Belanda lalu menumpahkan kemarahannya pada rakyat desa di sekitarnya. Banyak rumah dibakar dan penduduknya ditangkap. Mereka yang ketahuan rumahnya

dijadikan markas atau dapur umum, tanpa ampun langsung ditembak mati. Korban di kalangan penduduk Tengaran waktu itu cukup banyak.[101]

Sesuai dengan strategi baru, TNI sengaja tidak mempertahankan kota-kota. Oleh sebab itu gerak maju tentara Belanda dapat dikatakan berjalan lancar, tidak menjumpai banyak rintangan yang berat. Dalam hal ini TNI hanya sekedar melakukan serangan hambatan untuk memberi kesempatan pada pengungsian dan bumi hangus. Konvooi Belanda tersebut baru menjumpai perlawanan TNI yang benar-benar kuat di daerah Pajang. Kota Solo baru dapat mereka duduki pada tanggal 21 Desember 1948, dalam keadaan sudah dibumi hangus.[102]

Setelah berhasil menduduki Solo Belanda berusaha mempertahankan jalur jalan Solo-Semarang, yang merupakan urat nadi penguasaan wilayah pedalaman Jawa Tengah bagian timur. Untuk melemahkan potensi kaum Republik, di daerah Sala Belanda berusaha membentuk Dewan Islam dan mendirikan Negara Mataram namun gagal. TNI berusaha mengimbangi ofensif Belanda tersebut dengan menggeser pasukan dari daerah Lawu ke utara mendekati Semarang.[103]

Sesuai dengan rencana pasukan Brigade V lalu dipecah menjadi dua, yaitu kelompok *wingate* dan *wehrkreise*. Yon I Mayor Sunitiyoso, Yon 2 Mayor Suradji dan Yon 3 Mayor Sudigdo berwingate. Mereka bergerak sesuai instruksi sambil melakukan *field preparation* pada sel-sel gerilya di daerah pendudukan. Sedangkan Yon 4 Mayor Suharto melaksanakan *wehrkreise*, yaitu gerakan mengikat dan melakukan kontak pada instansi teritorial setempat. Sementara itu Letkol. Slamet Riyadi yang dikawal dua kompi gabungan dari Yon 1 dan-Yon 3 akan berwingate di daerah Salatiga dan Semarang.

Pelaksanaan rencana tersebut ternyata mengalami banyak rintangan. Cuaca buruk di musim penghujan membuat gerakan terhambat dan banyak jatuh korban di saat-saat menyeberangi Bengawan Solo yang sedang meluap. Akhirnya Yon Sunitiyoso tetap berada di daerah Klaten, Yon Suradji tertahan di sekitar Merbabu dan Yon Sudigdo tertahan di Wonosegoro. Akan halnya Staf Brigade V,

setiba di Kaliyoso pasukan dipecah menjadi dua. Mereka yang bersenjata dijadikan pasukan mobiel atau Comando Groep Ko. PPS. dan terus mengikuti Komandan Brigade berwingate, sedangkan kelompok yang lain diperintahkan kembali ke daerah Lawun.[106]

4.5.2 Situasi di Daerah Pendudukan Belanda

Selama Agresi Militer Kedua, situasi kehidupan di daerah pendudukan tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintah Recomba dengan dinas dan jawatannya tetap melaksanakan fungsinya. Kegiatan ekonomi dan pendidikan tetap berjalan biasa, tetapi pengawasan, razia dan jam malam makin diperketat. Kedudukan arang-orang Cina di daerah pendudukan juga dalam posisi sulit. Sikap mereka terpecah. Ada yang terang-terangan membantu Belanda, ada pula yang secara diam-diam menyokong Republik dengan memberi bantuan dan perlindungan pada perlindungan, namtun umumnya bersikap netral.

Yang jelas Belanda semakin menghadapi banyak kesulitan karena yang dihadapi bukan lagi pasukan gerilya rakyat, tetapi TNI yang seluruh terlatih. Untuk mengamankan posisinya, Belanda membentuk pas-pos baru di Kedayon, Salib Putih, Ampel dan Sunggingan.[107] Sekali waktu mereka menyerang posisi TNI, tetapi tidak pernah mendudukinya secara permanen. Meskipun patroli dan aksi pembersihan diperluas hingga ke pelosok desa, namun hasilnya tidak memadai. Sedemikian jauh pola operasi tentara Belanda mudah dibaca. Mereka biasa bergerak dalam kesatuan besar, setingkat peleton atau kompi di bawah perlindungan kesenjataan bantuan atau udara. Patroli terbatas pada radius sekitar 10 Km atau sejauh tembakan kanon. Mereka berangkat pagi hari dan sore hari diusahakan sudah kembali ke pos untuk menghindari resiko pencegatan. Dalam hal ini TNI justeru memanfaatkan kebiasaan mereka dengan menghindari gerakan mobiel besar dan serangan frontal. Pencegatan dilakukan sore hari saat mereka pulang dalam kondisi fisik yang sudah menurun.

Dapat dikatakan Salatiga tidak pernah sepi dari serangan gerilya. Bunyi letusan senjata selalu terdengar hampir setiap malam. Menurut para informan, sebenarnya yang banyak terjadi hanyalah serangan kamuflase dengan membunyikan mercon atau sekedar

lecutan cambuk sebagai usaha menekan musuh secara psikis. Adapun serangan yang sesungguhnya prosentasenya kecil karena mereka harus menghemat peluru. Titik berat gerakan TNI adalah aksi pencegatan, penyergapan dan sabotase yang ternyata banyak menimbulkan kerugian besar di pihak musuh.[108]

Untuk mengimbanginya Belanda meningkatkan kegiatan patroli, aksi pembersihan, penggerebekan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai.Di sini peran mata-mata IVS begitu besar. Selain sebagai mata-mata, dalam aksi militer mereka juga berperan sebagai penunjuk jalan. Jaringan mereka begitu rapi sehingga berhasil menyusup ke berbagai lapisan masyarakat termasuk TNI.

Terungkapnya kasus Rivo, anggota Yon 2, Mantri Polisi Jayabagus, Lurah Sugiri, Lurah Dimhari, Musman, Rentang dan banyak nama lain yang diduga kuat menjadi mata-mata IVG, menunjukkan luasnya jaringan mereka.

Mereka mendapat latihan khusus dan dilengkapi secara khusus pula. Waktu itu beredar isu bahwa selain dilengkapi pistol "dames", cermin dan lain-lain, mata-mata IVG wanita memiliki tanda khusus semacam cap atau tatto pada bagian badan yang tersembunyi. Misalnya, di langit-langit rongga mulut, pangkal lengan, payudara atau di selangkangan. Akibatnya banyak terjadi tindakan kurang etis, seperti menelanjangi seseorang yang dicurigai guna membuktikan dirinya mata-mata atau bukan.[109]

Nampaknya, situasi revolusi membuat kecurigaan terhadap orang di luar kelompok begitu besar. Kelalaian atau kesalahan kecil yang mungkin tidak disengaja dan tanpa motif apapun dapat mengundang malapetaka. Sebagai contoh, seseorang yang kebetulan membawa cermin, mengenakan sesuatu berwarna merah-putih-biru atau sikapnya dianggap mencurigakan, bisa-bisa dituduh sebagai mata-mata musuh.

Kecurigaan yang berlebihan itu kiranya cukup beralasan karena faktor keamanan. Saat itu status IVS Salatiga telah meningkat menjadi tim skrining tingkat akhir bagi seluruh tawanan di Jawa Tengah, sehingga intensitas kegiatan merekapun meningkat. Kehadirannya

menjadi momok bagi pejuang yang tertangkap Belanda. Selama Sersan Michael alias Djajusman menjadi Kastaf I, lebih dari 200 orang pejuang. dikirim ke Kedayon untuk dieksekusi, sementara Tommy Muryadi, penggantinya mengirimkan 63 orang.[110]

4.5.3 Situasi di daerah Republik

Selama perang berlangsung kehidupan rakyat sehari-hari tetap berjalan seperti biasa walaupun rakyat selalu diliputi rasa cemas. Lebih-lebih bagi penduduk yang tinggal di desa-desa yang masuk dalam jangkauan patroli Belanda. Tidak jarang di saat kesibukan orang bekerja, di tengah ramainya pasar dan anak bersekolah, secara tiba-tiba Belanda menyerang secara membabi buta dan melakukan aksi pembersihan. Akibatnya orang tidak bisa bekerja dengan tenang. Banyak tanah-tanah pertanian yang terlantar dan produktivitasnya rendah.

Walaupun sedang dalam suasana perang, kehidupan sosial budaya masyarakat masih tetap berjalan. Tradisi bersih desa dan sebagainya tetap berjalan biasa, terutama di desa-desa yang jauh di pedalaman. Demikian juga halnya dengan mereka yang mempunyai hajat perkawinan, khitanan dan lain-lain. Bagian Urusan Moril (URIL) TNI yang salah satu fungsinya menyelenggarakan hiburan bagi pasukan juga tetap berlatih kesenian. Dengan perlengkapan seadanya, mereka tetap melaksanakan tugasnya. Secara periodik pentas kesenian untuk hiburan prajurit dan rakyat tetap diadakan. Di sisi lain, adanya URIL juga sering dimanfaatkan rakyat yang punya hajat untuk mementaskan wayang arang, sandiwara atau ketoprak dengan imbalan sekedarnya. Kurangnya hiburan membuat setiap URIL mengadakan pentas selalu dibanjiri penonton.[111]

Demikian juga halnya dengan pihak Belanda. Pada hari-hari tertentu, biasanya sore hari mereka bermain sepak bola di lapangan Tengaran dan ditonton penduduk di sekitarnya. Secara diam-diam ada juga anggota TNI yang ikut bergabung tanpa dicuirigai. Rakyat yang menonton dan tahu persis bahwa. mereka gerilyawan, tetap bumkam. Hal demikian itu seringkali terjadi, sehingga membuktikan bahwa umumnya rakyat banyak tetap berjiwa Republik dan

melindungi tentaranya. Penyamaran mereka akhirnya terbongkar akibat ulah mata-mata IVG. Uniknya, sewaktu digerebek oleh MP Belanda, mereka yang tengah bermain di lapangan hanya terdiam bengong, tidak membantu MP menangkap para pemuda. Dalam kejadian itu pemuda. Djono tertangkap, sedangkan empat orang lainnya berhasil lolos.[112]

4.5.3.1 Pembentukan Sistim Pemerintahan Militer

Selama bulan Desember sampai dengan Pebruari, Panglima MBKD telah mengeluarkan sejumlah Maklumat dan Perintah Siasat tentang strategi perlawanan gerilya, pemerintahan militer, logistik dan lain-lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut, wilayah GM.II/DMI.II dibagi menjadi 4 daerah *wehrkreise* (WK). Masing-masing WK dibagi menjadi beberapa sub *wehrkreise* (SWK) dan setiap SWK dipecah menjadi rayon. Dalam susunan baru ini Karesidenan Semarang menjadi wilayah WK III di bawah pimpinan Letkol. Sudiarto.[113]

Dengan adanya perubahan formasi tersebut, terjadi pergeseran tanggung jawab atas daerah Salatiga dan sekitarnya dari Brigade V ke Brigade VI. Yon Suradji dan Yon Sudigdo dilepaskan dari Ko. PPS kemudian dimasukkan ke WK. III. Untuk menghindari sergapan musuh, markas TNI mundur ke pedalaman dan tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pantaran, Gubuk, Seboto, Karangtalun, Kradenan, Canggal dan Pager.[114]

Sesuai dengan Maklumat Panglima MBKD No. 2 tanggal 22 Desember 1948 tentang pembentukan Sistim Pemerintahan Militer, disusun instansi mulai dari PMK, PMKB hingga PMKT. Selanjutnya aparat pemerintahan sipil diintegrasikan pada pemerintahan militer setempat. Dengan demikian terdapat tiga instansi, yaitu instansi operatif (pasukan tempur), teritoral (penerintahan militer) dan administratif (pemerintahan sipil). Masing-masing tetap melaksanakan fungsinya, tetapi harus saling koordinasi.

Dalam formasi baru ini Bupati Semarang Sumardjito diintegrasikan ke PMKB Semarang pimpinan Kapten Ashari

dan Walikota Salatiga bergabung ke PMKB Salatiga pimpinan Lettu. Ngaspin. Keduanya, bermarkas di desa Kradenan, Kecamatan Susukan. Komandan PMKT Susukan dipegang Letnan Imam Suhardjo didampingi Camat Suharno dengan markas di Klari, Komandan PMKT Bringin dipegang oleh Letda. Wardoyo dan markas PMKT Tengaran berada di Pager.[115]

4.5.3.2 Perlawanan Gerilya

Setelah perang gerilya berlangsung beberapa lama, nampaknya rakyat semakin berpengalaman. Aksi penyusupan, penembakan gelap dan sabotase semakin sering dan tambah berani. Penyergapan pos Belanda yang lemah dan terpencil, patroli polisi atau serdadu yang lengah untuk mendapatkan senjata dan pakaian merupakan kejadian sehari-hari tidak terbatas pada malam namun juga siang hari. Dalam aksi penyergapan, biasanya pejuang memperlakukan polisi (CP) pribumi (Jawa) dengan baik. Setelah senjata dan pakaian dilucuti, mereka lalu disuruh pergi. Untuk mendapat pakaian ada juga pejuang yang mencegat dan menakut-nakuti babu-babu keluarga Belanda yang sedang mencuci pakaian di sungai.[116]

Dikarenakan kalah dalam persenjataan, maka titik berat aksi TNI adalah pencegatan konvooi musuh dengar memasang landmijn. Aksi tersebut biasanya berhasil baik. Dalam pencegatan di dukuh Sugihwaras, desa Watugede TNI berhasil melumpuhkan sebuah tank. Akibat kejadian itu, Belanda membalasnya dengan tembakan kanan dari Ngebul secara membabi buta. Landmijn lain yang dipasang di dukuh Klampean gagal karena ada penduduk desa yang melapor pada Belanda. Dalam kejadian lain di akhir Januari 1949, Letda. CPM Sudarkoco memerintahkan enam pemuda, yaitu Sugianto, Tulus, Jupri, Sukijan, Kusdi dan Amat memasang *landmijn* di desa Krakal. Hasilnya, sebuah truk konvooi tentara Belanda dari Solo hancur dan lainnya rusak berat. Jumlah korban di pihak musuh tidak diketahui dengan pasti, namun melihat ceceran darah dan bekas di tempat kejadian nampaknya musuh menderita kerugian besar.

Berhubung jumlah *landmijn* terbatas, sering terjadi aksi pencegatan dilakukan dengan lebah. Mereka menempatkan sarang

lebah yang dibungkus kain di tengah jalan agar dilanggar kendaraan atau dengan melemparkannya ke atas truk. Hasilnya ternyata cukup efektif, karena lebah yang merasa diganggu itu kemudian mengamuk. Di saat musuh kalang kabut akibat amukan lebah, pasukan TNI ikut menyerbu, sehingga berhasil merampas senjata atau peralatan lain. Dalam hal ini peran barisan clurut maupun Barisan Pendem, begitu besar. Biasanya merekalah yang memberi informasi tentang gerak-gerik musuh.[117]

Pada tanggal 1 Maret 1949 di Salatiga terjadi serangan umum terhadap pas-pos Belanda di Dadapayam, Banyubiru, Tengaran dan Bawangan. Serangan dilakukan segera besar-besaran dan serentak pada malam hari. Penduduk desa di sekitarnya memukul kentongan dan lain-lain sehingga suasana menjadi hiruk pikuk. Berapa besar kerugian pihak musuh tidak diketahui, namun peristiwa itu berhasil meningkatkan moril pasukan dan menambah kepercayaan rakyat. Pertempuran kecil secara sporadis terjadi di sana-sini, seperti misalnya di desa Mongkrong, Jatirejo, Tajuk, Tengaran, Gunung Tumpeng, Kalik-rumpung dan beberapa tempat lainnya.[118]

Selama terjadi perang, korban jiwa dan harta di pihak Republik tidak terhitung banyaknya. Korban terbanyak adalah kalangan rakyat desa, karena mereka selalu menjadi sasaran pembalasan. Beberapa pejuang yang gugur di antaranya adalah : lima orang anggota Barisan Kyai dalam pertempuran di Tengaran, Sapuan (dari Laskar Rakyat) akibat serangan kanon di Jembangang Yanis Ambon ditembak mati saat memutus kabel tilpon di Klero, Muhadi dari TLRI akibat serangan cocor merah di Tajuk, juga Supoyo dari Heiho dan Ruslan dari Polisi. Pemuda Kamto, Marmin, Rakiman dan Narto gugur dalam pertempuran di Mongkrong. Sedangkan mereka yang dieksekusi saat bertugas mata-mata antara lain pemuda Bandri, juga Suparno dan Sastrowondo yang masing-masing tertangkap di Salatiga dan Nobo Kulan kemudian dieksekusi di Kedayon.[119]

Mereka hanyalah sebagian kecil dari pejuang yang tercatat, di luar itu masih banyak nama lain yang merupakan pahlawan tak dikenal baik, yang gugur dalam pertempuran ataupun dieksekusi di Kedayon, Kedungringin dan di tempat-tempat lain.

4.5.3.3 Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat

Selama perang berlangsung, ikatan sosial masyarakat ternyata memberi andil yang tidak kecil. Peran ulama dan pemuka masyarakat menjadi faktor penentu dukungan massa. Masyarakat yang masih sederhana pola pikir dan tindakannya, dalam berbagai hal selalu mengikuti tokoh panutan mereka. Apa kata tokoh panutan, itulah yang mereka ikuti dengan penuh hormat dan patuh.

Pada dasarnya pihak Belanda, menganggap bahwa ulama dengan pondak pesantren sebagai pusat perlawanan. Kenyataannya memang banyak pesantren yang secara diam-diam menjadi markas perjuangan. Sejumlah ulama terkenal, seperti Kyahi Ngamar dari Getasan, Kyahi Damsiri, Kyahi Zainudin dari Ngresosari dan Kyahi Maisur dari Suruh pimpinan pondok Petak, Kyahi Ma'ruf pimpinan Barisan Kyahi, juga Kyahi Gojali, Kyahi Mawardi pimpinan NU dari Tengaran, Kyahi Jalal Sayuti pendiri kesatuan Hisbullah, Kyahi Zubair dam Kyahi Khumaidi dari pondok Tingkir Lor, Kyahi Nobo, Kyahi Cabean dan banyak yang lain, selama ini tercatat sebagai takoh-tokoh yang berjiwa Republik dan mempelopori perjuangan.[120]

Sejak proklamasi kemerdekaan mereka selalu konsekwen pada prinsip perjuangan anti penjajah. Dukungan pada perjuangan diberikan melalui berbagai cara, seperti pemberian amalan-amalan, doa, fatwa-fatwa untuk mengobarkan semangat jihad demi kenerdekaan dan menanamkan rasa cinta tanah air, juga memberi perlindungan dan jaminan logistik kepada para pejuang. Ada pula yang terjun langsung di pertempuran memimpin para santrinya. Tidak sedikit di antara mereka itu gugur, seperti misalnya Kyahi Mawardi dan kawan-kawannya yang gugur dalam pertempuran di Tengaran. Selama perang berlangsung, tidak sedikit pesantren dihancurkan Belanda, karena dicurigai sebagai sarang gerilya. Sebagai contoh adalah pesantren Petak di Suruh yang rusak berat dihantam tembakan kanon.

Demikian juga halnya para pemuka masyarakat baik formal maupun non formal. Ketauladanan mereka ternyata melahirkan kepatuhan dan kesetiaan rakyat, sehingga rakyat mau dimobilisasi, menyumbangkan harta benda dan tenaga untuk mendukung perjuangan. Dalam hal penyelenggaraan dapur umum misalnya,

mulai dari pengunpulan bahan, mengolah sampai mendistribusikannya di front pertempuran. Juga masalah penampungan pengungsi, perlindungan bagi pejuang, pengadaan markas, pos PMI dan lain-lain, semuanya itu hanya dapat berlangsung berkat kerja keras para pamong desa dan tokoh masyarakat setempat.

Demikian patuhnya masyarakat pada tokoh panutan, lebih-lebih jika dia dianggap memiliki kemampuan dalam hal supranatural. Di sementara desa, bahkan untuk mengungsipun rakyat tergantung pada mereka. Jika dia menyarankan penduduk mengungsi, secara spontan mereka segera berangkat. Sebaliknya, walaupun pertempuran hampir mendekati desanya jika tokoh panutannya tidak memerintahkan untuk mengungsi rakyat masih tenang-tenang meneruskan pekerjaannya. Di sini masyarakat selalu mengikuti jejak tokoh panutan, karena mereka yakin bahwa dia bisa dipercaya dan akan melindungi mereka.

4.5.3.4 Dukungan Logistik

Dengan terhentinya anggaran rutin dari pemerintah pusat pada semua kesatuan, jawatan dan instansi, maka sesuai dengan Instruksi Panglima MBKD Nomer 4/MBKD/49 tanggal 1 Januari 1949, suplai diselenggarakan oleh daerah setempat dengan sistim *wehrkreise*. Pemerintah pusat memberi wewenang kepada para Komandan PMKB untuk meminjam atas nama negara dan menggunakan semua bahan kekayaan negara, persediaan uang dan barang dari *intendans*.[121] Selanjutnya setiap daerah diharapkan mampu memobilisasi suplai, baik melalui pengumpulan dari rakyat, merampas dari musuh, kegiatan usaha/ekonomi. dan penghematan anggaran.[122]

Dengan demikian jelas bahwa sumber utama dukungan logistik untuk kepentingan militer dan membiayai perjuangan adalah dari rakyat. Mobilisasi suplai dikoordinir oleh Kepala Desa kemudian disetorkan ke PMKT (Kecamatan atau KODM). Di KODM, masalah administrasi keuangan dan bantuan lain diurus oleh Staf Keuangan yang kemudian mendistribusikannya untuk biaya perjuangan, mendirikan dapur umum dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya antara PMKT yang satu dengan yang lain dapat terjadi perbedaan kebijakan sesuai kondisi dan situasi setempat.

Di beberapa daerah pungutan bersifat sukarela dan insidentil. Di Bringin, misalnya bantuan rakyat berlaku spontan dan jumlahnya tidak ditentukan. Rakyat tidak menganggapnya sebagai beban, karena selama perang berlangsung mereka tidak dipungut pajak. Ada pula daerah yang pungutan bersifat rutin dalam jumlah tertentu. Di Susukan, besarnya pungutan adalah seperenam dari hasil panen (padi), tetapi tidak perlu disetorkan karena kesulitan masalah gudang dan untuk menghindari resiko dirampas musuh. PMKI, lalu menitipkannya pada petani dan akan diambil jika dibutuhkan.[123]

Dalam penyelenggaraan dapur umum, karena tidak ada droping anggaran sehingga tidak dibedakan antara dapur umum untuk pasukan regular dan pasukan di luar formasi. Dapur umum untuk pasukan di sebelah timur jalan diadakan di Urutan dikoordinir oleh Sumadi Bentung, sedangkan untuk sebelah barat jalan berada di Karangboyo diurus aleh Sanyoto.[124] Semua kebutuhan dapur umum sepenuhnya tergantung bantuan rakyat di bawah koordinasi PMKt dan instansi sipil. Bantuan rakyat seluruhnya bersifat sukarela dan tanpa imbalan. Di luar itu kadang-kadang rakyat juga menyediakan makan bagi pasukan yang kebetulan lewat di desanya.

4.5.4 Akhir Pertempuran

Setelah bertempur selamg kurang lebih enam bulan, terlihat bahwa Belanda mulai mengalami kebuntuan. Kekuatan pasukannya terpaku di kota-kota besar. Itupun hanya terbatas pada radius antara 10 - 15 Km. Di luar itu Belanda tidak lagi berkuasa. Inisiatif pertempuran telah bergeser ke tangan TNI yang berada dalam posisi ofensif dan strategis. Rencana Belanda untuk tetap mempertahankan jalur utama penghubung antar kota merupakan usaha yang berat dan banyak memakan korban, karena TNI justeru menjadikannya sebagai *killing ground.* Walaupun korban di pihak TNI dan rakyat juga begitu besar, namun bagaimana akhir dari peperangan mulai terlihat.

Secara politis maupun ekonomi sebenarnya Belanda mulai terdesak. Di forum internasional mereka mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, sementara tekanan ekonomi di dalam negerinya juga semakin berat karena anggaran biaya perang di Indonesia begitu

besar. Di lain pihak Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan bantuan *Marshall Plan* jika masalah Indonesia tidak segera terselesaikan.

Jadi sebenarnya saat itu Belanda benar-benar dalam posisi terdesak, baik di dalam maupun di luar negeri. Hanya saja dia ingin mundur secara terhormat. Adanya instruksi Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata sebenarnya merupakan sesuatu yang diharapkan Belanda, karena dengan demikian dia bisa mundur dari Indonesia tanpa kehilangan muka.

Setelah melalui proses persetujuan Rum-Royen, pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia, pengembalian Ibukota RI Jogyakarta dan lain-lain pada tanggal 3 Agustus 1949 tercapailah persetujuan gencatan senjata. Dengan adanya perintah penghentian tembak menembak, maka kedudukan masing-masing dalam statusquo menyusul kemudian perundingan antara kedua belah pihak. Terhentinya pertempuran membuat suasana kehidupan secara berangsur-angsur mulai normal kembali. Walaupun di sana-sini masih ada insiden kecil antara tentara Belanda dan pejuang, namun selalu bisa diselesaikan secara damai.

Pada bulan Nopember 1949 aparat pemerintah RI yang mengungsi ke daerah Susukan Selatan mulai bergeser mendekati kota, yaitu di desa Sruwen dan Bener. Pada tanggal 19 Desember pasukan Yon Suradji dan PT (CPM) sudah berada di Tingkir dan Ngaglik, sementara Bupati Semarang Sumardjito dan Kepala Polisi Sutardjo sudah masuk kota untuk membicarakan maslah penyerahan kota Salatiga.

Dengan ditandatanganinya persetujuan KMB pada tanggal 27 Desember 1949, maka secara resmi kedaulatan RI dipulihkan kembali. Serah terima di Salatiga berlangsung pada tanggal 29 Desember dan Sejak itu secara berangsur-angsur seluruh aparat kembali ke posnya. Pasukan YOn Suradji menempati markas di Tangsi Bambu, sedangkan kesatuan CPM di Sinoman. Selanjutnya bserlangsung penyerahan jabatan dari pegawai Belanda ke pegawai RI, dan susunan pegawaipun ditinjau kembali. Semua bekas pegawai Belanda yang tidak memegang jabatan diperbantukan ke insatnsi RI, sehingga di kantor Gubernuran waktu itu banyak bekas bupati Belanda yang diperbantukan.

Sumardjito menggantikan bupati Semarang Condronegoro. Sutardjo merangkap jabatan Kepala Polisi Semarang dan Salatiga. Atas perintah Residen Semarang Milono, ia lalu diangkat menjadi Walikota Salatiga dan ditugaskan menyusun kembali pemerintahan kotapraja yang sudah dibubarkan oleh Belanda. Pada tanggal 1 Juni 1950 Kotapraja Salatiga dengan resmi berdiri kembali.

Daftar Cacatan Samping

1. Kodam,. VII/Diponegoro, 1970, *Buku Petundjuk Territorial*. II, hal. 209.
2. Kantor Statistik Kodya Salatiga, 1893, *Monografi Kotamadya Salatiga 1983*, hal 3-4
3. Kodam VII/Diponegoro, 1970. *op. cit.* hal 212.
4. Kantor Statistik Kodya Salatig. *op. cit.*, hal 4.
5. Handjojo, MS., 1975, *Riwajat Kota Salatiga*, (naskah arsip Bintaldam VII/Dip.), hal. 14.
6. The Liang Gie, 1977, *Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jogya : Karya Kencana, hal. 23.
7. Handjojo, MS., *op. cit.* hal. 26
8. Paryanti Setyorini, 1992, *Peranan Rakyat Salatiga pada Masa Revolusi Fisik 1945-1949*, Semarang, (skripsi S-1), hal.20.
9. *ibid.* hal. 29.
10. Handjojo, MS., *op. cit.* hal. 31.
11. Sedjarah Militer Kodam VTI/Diponegoro, tt., *Sedjarah Tentara Nasional Indonesia : Kodam VII/Diponegoro (Jawa Tengah)*-, hal. 25.
12. *ibid.* hal. 83

13. Dinas Sejarah Militer Kcdam VII/Dip., 1979, *Palagan Ambarawa* hal. 33.

14. *ibid.*

i5. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., tt., *op cit.* hal 41.

16. *ibid.*-

17. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip, tt., *op. cit.*, 133.

18. *ibid.* hal. 89.

19. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., 1968., *Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro Sirnaning Yakso katon Gapuraning, Ratu,* Semarang Jajasan Penerbit Diponegaro, hal. 277.

20. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip. tt., *Op. Cit.* hal. 83.

21 Supardjan, *wawancara* tanggal 30 Januari 1995

22. Sudianto, *wawancara* tanggal 29 Januari 1995

23. Sedjarah Militer Kodam VII/Dio., tt., *op. cit.* hal.

24. *ibid.* hal. 290.

25. Tulis Suhardjo, *wawancara* tanggal 29 Januari 1995

26. Paryanti, *op. cit.* hal.27.

27. Sunoto, *wawancara* tanggal 30 Januari 1995

28. Suwoto, *wawancara* tanggal 29 Januari 1995

29. Tulus Suhardio, *loc. cit.*

30. Handicia, MS., *loc. cit.*

31. Stibbe, DG., 1919, *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie,* Leiden : Brill, hal. 672.

32. Kodam VII/Dip., 1970, *loc. cit.*

33. ANRI, 1976, *Memori Serah Jabatan 19'-71-1930 Jawa Tengah,* Jakarta : ANRI, hal XLIV.

34. *Sk. Berita Buana,* tanggal 14 September 1977

35. Tulus Suhardio, *loc. cit.*
36. Supardian, *wawancara* tanggal 30 Januari 1995
37. Suyitno, *wawancara* tanggal 30 Januari 1995
38. Sudianto, *wawancara* tanggal 29 Jenuari 1995
39. Tulus Suhardjo, *loc. cit*
40. Suwoto, *loc. cit.*
41. Sugianto, *wawancara* tanggal 31 Januari 1995
42. Sudianto, *loc. cit.*
43. Sugianto, *loc. cit.*
44. Ny. Djupri, *wawancara* tanggal 28 Januari 1995
45. Sudianto, *loc. cit.*
46. *ibid.*
47. Sugianto, loc. cit.
46. Chanisfu Nizami, 1994. *Peristiwa Penangkanan Orang-orang Tionghoa di. Salatiga Masa Agresi Militer Belanda Pertama Tahun 1937*, Semarang (skripsi S-1), hal 25.
49. *ibid.* hal. 26.
50. Kodam VII/Diponegoro, 1970, *op. cit.* hal. 215--216.
51. ANRI, 1976, *op cit.* hal. XLV--XLVI.
52. Sujitno, *loc. cit.*
53. Tulis Suhardjo, Sugianto, Sudianta, Sunoto, Suwoto, Supardian, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)
54. Sudjud, *wawancara* tanggal 28 Januari 1995
55. Supardjan, *wawancara* tanggal 15 April 1995
56. Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Dip., 1979, *op. cit.* hal. 24.
57. Suwoto, *loc. cit.*.

58. ANRI, No. 72, *Perslag Keadaan Karesidenan Semarang teristimewa Kota Solotigo*, tangggal 12-4-46, ttd. Residen Semaramng S. Karno.

59. ANRI No. B.III.44 hal *Mosi Markas Gabungan Salatiga*, tanggal 8 November 1946, ttd. Suyitno (Pesindo) dan Sukri Barnawi (BP.KNI), periksa juga dokumen ANRI No. 82, surat Residen Semarang tanggal 15-4-46

60. ANRI, No. 72, *loc. cit.*

61. Sartono Kartodirdio, 1988, *Suasana Situasi Salatiga Semasa Revolusi : Dari Masa Bersiap sampai Clash Pertama,* (makalah seminar., hal. 14--15.

62. *Sk. Sin Min*, tanggal 29 Djuli 1947

63. *ibid.*

64. *Sk. Sin Min*, tanggal 9 September 1947..

65. Ko Sick Hie "Badan Panitia Persiapan Chung Hua Tsung Hui Poesat Selceroeh Djawa dan Madoera di Jogjakarta", tanggal 20 September 46 (*Arsip Kempen No. 206*)

66. Sk. Sin Min, tanggal 6 Agustus 1947.

67. Handjojo, MS.,*op. cit.* hal. 4.

68. Suwoto, *loc. cit.*

69. *Sk. Sin Min*, tanggal 29 Juli 1947, *loc. cit.*

70. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., 1968. *op. cit.* hal 113.

71. *ibid.* hal. 95-96.

72. Kusdi H., wawancara tanggal 28 Januari 1995, juga Tulus Suhardjo dan Sugianto (dalam wawancara terpisah)

73. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., tt., *op. cit.* hal'. 196.

74. Supardjan, *wawancara* tanggal 15 April 1995.

75. Paryanti, *op. cit.* hal. 59.

76. *Sk. Sin Min*, tanggal 29 Djuli 1947, *loc. cit.*

77. Tulus Suhardia, *loc. cit.*
78. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., 1968, *op. cit.* hal. 117.
79. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip.., 1968, *loc. cit.*
80. Sugianto, *loc. cit.*
81. Suyitno, *loc. cit.*
82. Sedjarah Milter Kodam VII/Dip.,..1968, *op. cit.* hal. 182
83. *ibid.* 118.
84. *ibid.* 108
85. Supardian, *loc. cit.*
86. Suwato, *loc. cit.*
87. Dawam Badarudin, KH., *wawancara* tanggal 27 Januari 1995, juga Hardjosutrisno, *loc. cit.* 181
88. Sugianto.. *loc. cit.*
89. Ny. Supinah, *wawancara* tanggal 27 Januari 1995
90. Suwotoy *loc. cit.*
91. Supardian, *wawancara* tanagal 15 April 1995, *loc. cit.*
92. *ibid.*
93. Sudjadi, *wawancara* tanggal 17 April 1995 dan Tulus Suhardjo, wawancara tanggal 17 April 1995 (dalam wawancara terpisah)
94. Tulus Suhardjo, Sunoto, Suwoto, Sudianto, Supardian. *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)
95. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., 1968, *op. cit.* hal. 127
96. Emanuel PA., *"Kort Verslaa Over de Maand April 1948 Algemene Bescheswingen"*, (Arsip Algemene Secretarie 1945--1949, No. 47, tanggal 15 Mei 1948)
97. *Sk. Sin Min*, tanggal 9 Maret 1948
98. Sugianto, Sudianto, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

99. Supardian, *loc. cit.*

100. Sudjadi, Kusdi H.g Tulus Suhardjo, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

101. *ibid.*

102. Sugianto, *loc. cit.*

103. Dokumen Perintah Siasat Panglima MBKD No. II/MBKD/1949 tanggal 3 Pebruari 1949

104. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegorc, 1968, *op. cit.* hal. 175

105. Supardian, *loc. cit.*

106. Sedjarah Militer Kodam VII/Dip., tt., *op. cit.*.hal. 203--204.

107. Tulus Suhardjo, Sudjadi, Sugianto, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

108. *ibid.*

109. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponeacro, 1968, *op. cit.* hal. 182.

110. Tulus Suhardjo, Sudjadi, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

111. Sutjipto, *loc. cit.*

112. Tulus Suhardjo, *loc. cit.*

113. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968, *op. cit.* hal. 175.

114. Tulus Muhardjo, Suwoto, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

115. Paryanti, *op. cit.* hal. 64. Sudianta, Supardian, *loc. cit.* dalam wawancara terpisah)

116. *Dokumen Instruksi Panglima MBF:D No. 4/r.BKD/49* tanggal 1 Djanuari 1949

117. Nasution, AH., 1953, *Pokok-pokok Gerilya,* Djakarta Pembimbing, hal. 148.

118. Sudianto, Suwoto dan Sugianto, *loc. cit.* (dalam wawancara terpisah)

119. Tulus Suhardio, *loc. cit.*

120. *ibid.*

121. Tulus Suhardjo., Sutjipto, Sudjadi, *loc. cit.* dalam wawancara terpisah)

122. Sudjadi, Sunoto, Supardian, Tulus Suhardjo, *loc.cit.* (dalam wawancara terpisah)

123. *ibid.*

124. Supardjan, Sudjadi, Tulus Suhardja, Suwotog *loc. cit.* dalam wawancara terpisah)

125. Paryanti, *op. cit.* hal. 68--69.

BAB V

KESIMPULAN

Perjuangan kemerdekaan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat yang bervariasi antara daerah yang satu dengan lainnya. Kondisi geoarafis dan ekologis menentukan kondisi ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi pula potensi terhadap partisipasi akan kebutuhan logistik. Meskipun terdapat beberapa daerah yang kurang subur di Jawa Tengah, tetapi terdapat mekanisme akumulasi dan distribusi kebutuhan pangan, baik untuk daerah pertempuran maupun untuk kebutuhan masayarakat. Daerah yang subur dan potensial secara ekonomis mensuplai daerah pertempuran dan daerah minus. Bahkan hasil-hasil pertanian tidak hanya disumbanakan untuk kepentingan perjuangan saja, tetapi juga dijual secara gelap ke daerah pendudukan.

Berbagai kelompok sosial ikut mendukung mekanisme akumulasi dan distribusi bahan logistik. Pengumpulan hasil pertanian dari petani dilakukan lewat saluran kepemimpinan masyarakat desa dengan bantuan para pemuda desa dan pejuang. Demikian pula pengangkutan ke daerah pos pertahanan pasukan RI juga dilakukan secara gotong-royong oleh berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, kaum wanita memegang peranan penting dalam proses pengolahan bahan pangan untuk konsumsi bagi pasukan dan berbagai badan perjuangan di daerah pertempuran. Dalam hal ini tampak betapa kuatnya sistem gotong-royong masyarakat desa untuk mendukung tercapainya perjuangan kemerdekaan selama tahun 1945-1949.

Kondisi sosial masyarakat desa diwarnai dengan perubahan-perubahan sosial politik yang adakalanya bersifat radikal. Krisis sosial politik dan konflik antara golongan Masataka terjadi sebagai akibat dari revolusi. Golongan pemuda yang menghendaki perubahan politik untuk segera merealisasikan amanat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berhadapan dengan para pemimpin formal yang diragukan loyalitasnya atau kurang tanggap menangkap makna proklamasi. Akibatnya terjadilah aksi menentang atau aksi pendaulatan terhadap beberapa kepala desa dan aparat desa lainnya yang merugikan masyarakat, turut menindas rakyat pada masa Jepang, membela Belanda, korupsi, serta menakhianati rakyat dan perjuangan kemerdekaan. Para pemuda revolusioner mengintimidasi, menculik, dan kadang-kadang membunuh kepala-kepala desa yang kesetiaannya disangsikan. Meskipun tidak sampai terjadi revolusi sosial seperti di Surakarta, Pemalang, Tegal, dan Brebes, tetapi aksi pendaulatan sangat mewarnai kondisi masyarakat di beberapa desa Jawa Tengah.

Peranan pemimpin formal maupun informal menjadi semakin penting selama masa perjuangan kemerdekaan. Kepemimpinan. memainkan peranan yang menentukan dalam pembinaan dan pembentukan moral masyarakat. Para pemimpin menjadi faktor yang strategis untuk mengadakan komunikasi, mengerahkan massa, memberikan semangat perjuangan, serta mengintegrasikan hubungan sosial antar berbagai golongan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.- Para ulama telah memainkan peranan penting terutama dalam bidang pembinaan ideologi perang jihad.

Sementara itu, pemuda telah memegang peranan paling penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa jika tidak karena tenaga dan pikiran pemuda maka perjuangan kemerdekaan tidak akan tercapai. Selain sebagai barisan terdepan dalam perjuangan fisik, mereka juga memainkan peranan penting dalam berbagai kehidupan sosial dan politik di desa. Mereka telah menumbuhkan semangat kebangsaan yang kuat dan semangat politik yang berkobar-kobar dalam jiwa masyarakat pedesaan.

Ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial telah menimbulkan kegelisahan masyarakat, sehingga perlawanan bersenjata

sangat luas. Terjadilah krisis politik yang berlangsung lama yang mendorong lahirnya badan-badan perjuangan. Tekanan emosional telah memberi dorongan terhadap solidaritas sosial, serta membangkitkan semangat rakyat siap untuk menggabungkan diri dengan badan perjuangan. Badan-badan perjuangan menjadi tempat penyaluran dinamika jiwa merdeka. Perekrutan dalam badan perjuangan cenderung mendasarkan pada hubungan sosial. Terdapat kelompok-kelompok badan perjuangan yang anggotanya berasal dari lingkungan yang relatif sama. Semangat revolusi mampu membangkitkan harapan-harapan politik sehingga mempertinggi partisipasi masyarakat untuk berjuang. Perasaan kuat bahwa seseorang termasuk dalam suatu golongan tertentu memberikan stimulus untuk ikut berperan serta dalam perjuangan kemerdekaan.

Daftar bacaan :

BUKU/KARYA TULIS

Almanak Angkatan Perang. 1956. Djakarta PT Upeni.

Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944--1946.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Berkhofer, Robert F. Jr. 1971. *A Behavioral Approach to Historical Analysis.* London : Collier-Macmillan Limited.

Chaniago, J.R. dan kawan-kawan. 1986. *Ditugaskan Sejarah Perjuangan Merdeka 1945-1985.* Jakarta : Pustaka Merdeka.

Dinas Sejarah Militer KODAM VII/Diponegoro. 1979. *Palagan Ambarawa.*

Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta. 1953. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta.* Kementerian Penerangan.

Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah. 1952. *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah.* Semarang.

Djoemadi, *Sejarah Berilya Para. Prajurit Kita Tahun 1949.* Suatu kesaksian tertulis.

Firth, R. 1966. *Tjiri-Tjiri dan Alam Hidup Manusia.* : Bandung Sumur Bandung.

Geertz. Clifford. 1976. *Involusi Pertanian.* Jakarta : Bhratara.

Hayati, Chusnul dan kawan-kawan, 1995. *Situasi Moneter di Semarang dan Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945--1950.* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Sastra UNDIP, Semarang.

Handjojo MS. 1975. *Riwayat Kota Salatiga.* Naskah Arsip Bintaldam VII/Diponegoro.

Harton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi.* Jakarta : Erlangga.

Helman, Cecil. 1984. *Culture, Health, and Illness.* Bristol John Wright & Sons Ltd.

Kahin. George Mc. Turnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terjemahan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kantor Statistik Kodya Salatiga. 1983. *Monografi Kotamadya Salatiga 1983.*

Kartodirdio, Sartono. 1994. *Pembangunan Bangsa.* Yogyakarta Aditya Media.

----------1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. *Suatu Alternatif.* Jakarta : PT Gramedia.

----------1988. *Suasana Situasi Salatiga Semasa Revolusi : Dari Masa Bersiap Sampai Clash Pertama,* Makalah dalam seminar Sejarah Revolusi di Yogyakarta. 1988.

----------1977. *Sajarah Nasional Indonesia Jilid VI.* Jakarta Balai Pustaka.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa.* Jakarta : PN Balai Pustaka.

Ko Siok Hie. 1946. *Badan Panitia Persiapan Chunci Hua Tsung Hui Poesat Seloeroh Djawa dan Madoera di Jogjakarta.* Kemen terian Penerangan.

Kodam VII/Diponegoro. 1970. *Buku Petunjuk Teritorial II.*

Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta : Tiara Wacana

Kusnodiprodio. 1948. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Penetapan Pemerintah RI.* Djakarta : Seno.

Lapian. A.B. & P.J. Drooglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linagarjati.* Jakarta : Grafiti.

Larson, George D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi : Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912--1942.* Yogyakarta Gadjah Mada University Press.

Lucas, Anton E. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi.* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Naqazumi, Akira. 1988. *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Nasroen, M. 1951. *Masalah Sekitar Otonomi.- Broningin.* Djakarta J.B.Wolters.

Nasution, A.H. 1980. *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Repulik Indonesia di Masa Yang Lalu dan Masa Yang Akan Datang.* Bandung angkasa.1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IV. Bandung : Penerbit Angkasa.

----------1978, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid V. Bandung : Penerbit Disjarah AD.

Nizami, Chanisfu. 1994. *Peristiwa Penangkapan Orang-Orang Tionghoa di Salatiga Masa Agresi Militer Belanda Pertama Tahun 1947.* Skripsi Sarjana S-1 Jurusan sejarah Fakultas sastra UNDIP, Semarang.

Oemar, Moh. 1976. *Pahlawan Nasional Gatot Soebroto.* Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Biografi Pahlawan Nasional.

Ohorella, G.A. dan kawan-kawan. 1990. *Peta Sejarah Jawa Tengah.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direkto rat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Olsen, Marvin E. 1968. *The Process of Social Organization.* New Delhi : Oxford & IBH Publising Co.

Paryanti Setyorini. 1992. *Peranan Rakyat Salatiga pada Masa Revolusi Fisik 1945--1949.* Skripsi S-1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang.

Paul B. Hartan & Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi.* terjemahan. Jakarta : Erlangga.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, 1988. *Aspek-aspek Budaya di Kabupaten Daerah Tinakat II Kendal.*

Pringgodigdo. A.G. 1952. *Tata Negara di Djawa pada Waktu Pendu dukan Jepang Dari Bulan Maret Sampai Bulan Desember 1942* Jogja.

Rocher, Buy. 1972. *A General Introduction to Sociologi A Theorithical Perspective.* Toronto : Macmillan Company of Canada.

Sedjarah Militer V:ODAM VII/Diponegoro. *Sedjarah TNI-AD KODAM VII/Diponegoro.*

Sedjarah Militer KODAM VII/Diponegoro. 1968. *Sedjarah Militer KODAM VII/Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu.* Semarang : Jajasan Penerbit Diponeaoro.

Simatupang, T.B. 1980. *Laporan dari Banaran : Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan.* Jakarta Sinar Harapan.

Soekirna. 1956. *Semarang.* Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang.

Sasrodihardio, Sudjita. 1968. *Perubahan Struktur, Masjarakat Djawa.* Jogjakarta : Karja.

Suroyo, Djuliati A.M. "Revolusi dan Mentalitas (Cepu Siktar Masa Revolusi Kemerdekaan 1945--1949)." Makalah pada Seminar Sejarah Lokal Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945--1949, yang diselenggarakan di Bandungan, Semarang tanggal 13--15 Oktober 1994.

S. Sutrisna. 1955. *Riwajat Singkat PDM Kendal Territorial IV/ Div. Diponegoro.*

Sutherland. Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi.* Jakarta : Sinar Harapan.

Stibe. D.G. 1919. *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie.* Leiden EJ Brill.

Syamsuharto, M. *Kisah Singkat Aksi dan Rute Serilya Batalyon 8 "Tjakrayuda" di Daerah Kabunaten Kendal.* Suatu kesaksian tertulis.

Team Monumen Perjuangan Kabupaten Kendal. 1976. *Sejarah Perjuangan Kabupaten Kendal.*

The Liang Gie. 1975. *Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerin tahan Daerah Indonesia.* Yogyakarta : Karya Kencana.

Thohir, Mudjahirin. 1995. *Upacara Lingkaran Hidup dan pacara Komunal di Kalangan Masyarakat Krajan Kulon, Kaliwungu, Kendal.* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Sastra UNDIP, Semarang.

Tim Penyusun Monografi Jawa Tengah. 1981. *Monografi Daerah Jawa Tengah.* Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud RI.

Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati.* Jakarta : Gunung Agung.

ARSIP/DOKUMEN

ANRI. 1976. *Memori Serah Jabatan 1921--1930 Jawa Tengah.*

ANRI. No 72. *Verslag Keadaan Karesidenan Semarang teristimewa Salatiga.* Tanggal 12-4-1946. Residen S. Karna.

ANRI No B. III.44. *Mosi Markas Babungan Salatiga.* Tanggal 8 November 1946.

Arsip Kempen No 206. Ko Siok Hie. "Badan Panitia Persiapan Chung Hua Tsung Hui Poesat Soeloeroeh Djawa dan Madoera di Jogjakarta". Tanggal 26 September 1946.

Arsip Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan No. 4 tanggal 8 November 1947.

Arsip Algemeen Secretarie 1945-1949 No. 47 tanggal 15 Mei 1948. Emanuel PA. *Kort Verslact Over de Maand April 1948 Algemene Beschouwingen.*

Dokumen Panglima Instruksi Panglima MBKD No. 4/MBKD/49 tanggal I Djanuari 1949.

SURAT KABAR

Bintang Merah. 31 Djolei 1948.

Berita Buana. 14 September 1977.

Baerceh. No. 162. 20 Djoeli 1948.

Kedaoelatan Rakjat. 1 Djoeli 1946.

----------, 13 Dioeli 1947.

----------, 19 Djoeli 1946.

Nasional. No. 78. 3 April 1948.

Sin Min. 29 Djeli 1947.

----------, 2 Agoestoes 1947.

----------, 6 September 1947.

----------, 9 Maret 1948.

DAFTAR INFORMAN

Nama	UMUR	JABATAN	JABATAN DULU	ALAMAT SEKARANG
A. Moesafak	68	K.R.Hisbullah	Purn.	Weleri Kendal
Ach. Rondhi	69	Hisbullah	Mantan Kades	Rowosari Kendal
H. Chafudh	67	Hisbullah	Swasta	Kaliwungu Kendal
Chamim	69	K.R.Hisbullah	Pamong	Rowosari Kendal
Dawam Badarudin. KH	75	Angg. Laskar Clurut	Mantan Guru	Tengaran Smg.
Domo	78	Pemuda	Pamong	Pojoksari Kdl
Djupri NY.	68	ex LASWI	Swasta	Tengaran Smg.
Hardjono Sutrisno	72	ex BKR	Mantan	Tengaran Smg.
Kusdi H.	64	Anggo Yon 446	Purn.	Tengaran Smg.
Lim Kiam Him	74	Wiraswasta	-	Weleri Kendal
Mat Royi	71	Hisbullah	Veteran	Gempolsewu Kdl
M. Moeslich	67	K.R. BKR	Purn.	Cepiring Kdl
Ngadi	68	Pemuda	Mantan Pamong	Sendangkulon Kendal
Rachmat Sutaman	64	Carik desa 46-64	Mantan Kades	Pojoksari Kdl
Rochmat	73	AMRI	Pensiunan	Nawangsari
Sabar	76	Seinendan	Tani	Pojoksari Kdl
S. Sastro Admodjo	73	Lurah, 45-47. 49-88.	Mantan	Cepiring Kdl
Sofani	74	Angg. Kuda	Purn.	Sedayu Kendal Putih
Sudarman	68	Lurah, 36-45.	Veteran	Sendangdawung Kendal
Sudianto	67	Dan Yon 9 Hisbullah	Purn.	Gentan Susukan Kab. Semarang
Sudjadi	68	ex TLRI	Purn.	Tengaran Smg
Sudjud	66	ex AMRI BKR	Purn.	Cabean Kr. Duren Smg
Sueb	75	Angk. Muda Kehutanan	Tani	Sojomerto Kdl
Sugianto	67	ex Heiho	Purn.	Kr. Duren Smg

Suhartono	73	TNI Masya.	Pensiunan	DH'45 Kendal
Suyitno	66	ex Hisbullah	Swasta	Gogodalem Bringin Smg
Sunoto	67	angg. Laskar	Swasta	Slumut Kumpul rejo Kab. Smg
Suparlan	68	Polisi	Purn.	Kendal
Supardjan Wiryo Prayitno.Ki	87	Kmd. Res. Bar. Banteng	Purn.	Gogodalem Bringin Smg
Supratikno	72	Laskar Rakyat	Mantan Kades	Triharjo Kendal
Supinah, NY.	67	ex. LASWI	Swasta	Tengaran Smg
Sutikno,R	72	BKR	Ketua PMI	PMI Kendal
sutjipto	71	Komd. Laskar	Purn. MKBSS	Kembangsari Tengaran Smg
Suwito Mulyono	76	ex TLRI	Purn.	Nyamat Tengaran Smg
Suwoto	66	ex AMRI	Mantan DPR II	Suruh Smg Smg
Tulussudardjo	68	ex BKR	Purn.	Tengaran Smg

PETA PENDARATAN SEKUTU DI DJATENG

SEKALA 1 : 500 000

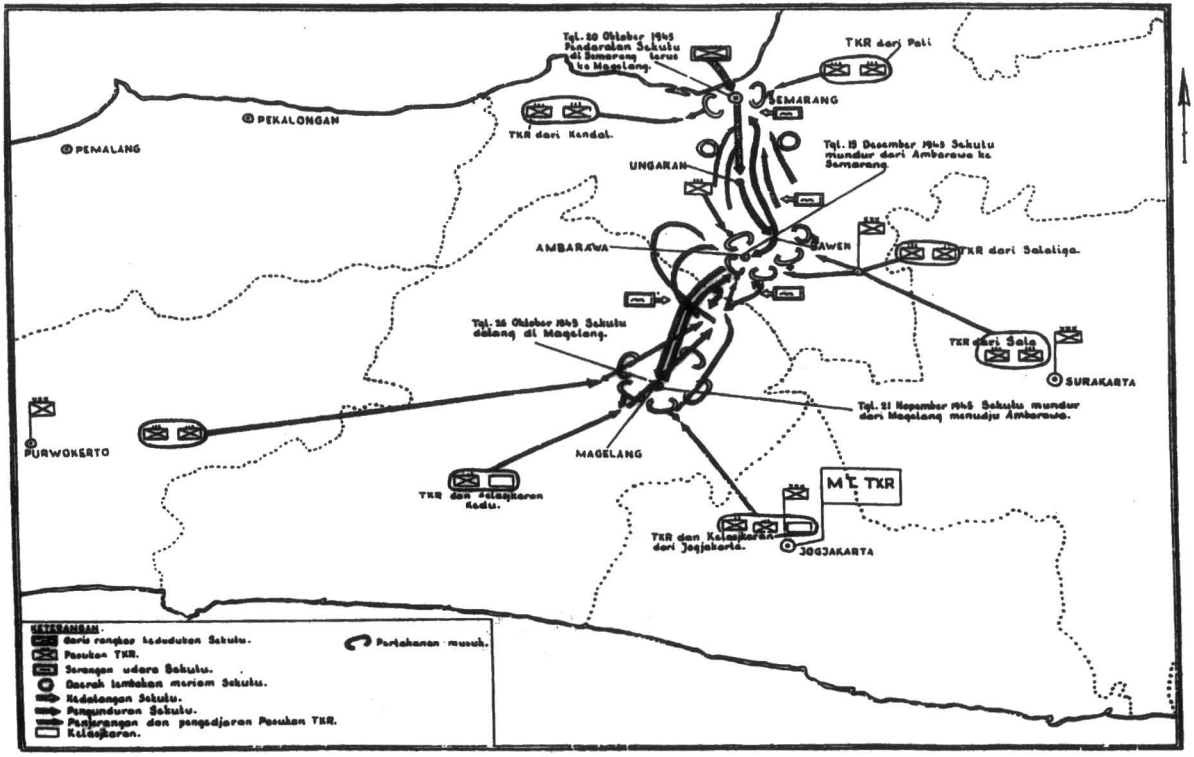

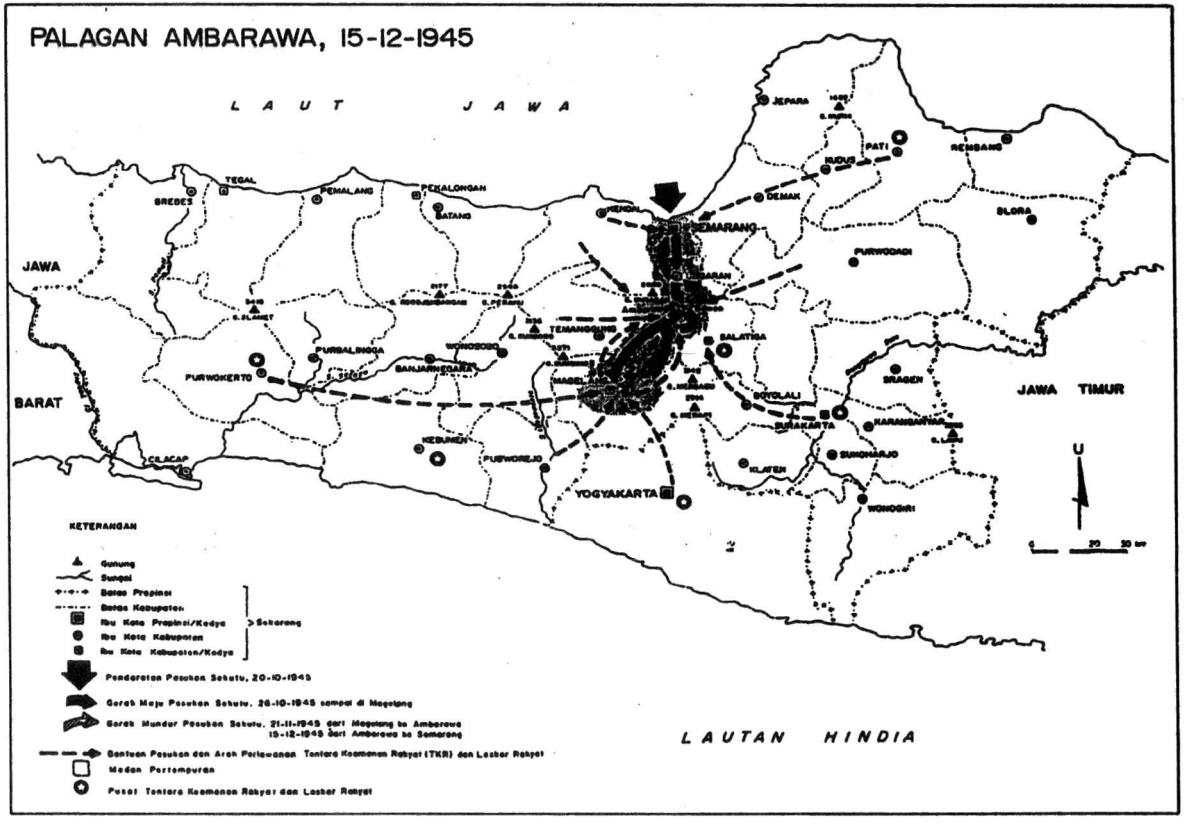
PALAGAN AMBARAWA, 15-12-1945
LAUT JAWA
JAWA BARAT
JAWA TIMUR
LAUTAN HINDIA
JEPARA
PATI
REMBANG
TEGAL
BREBES
PEMALANG
PEKALONGAN
BATANG
KENDAL
DEMAK
SEMARANG
PURWODADI
BLORA
PURWOKERTO
PURBALINGGA
WONOSOBO
TEMANGGUNG
SALATIGA
BANJARNEGARA
MAGELANG
BOYOLALI
SRAGEN
SURAKARTA
KARANGANYAR
CILACAP
KEBUMEN
PURWOREJO
KLATEN
SUKOHARJO
YOGYAKARTA
WONOGIRI
KETERANGAN
Gunung
Sungai
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Ibu Kota Propinsi/Kodya
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kabupaten/Kodya
Sekarang
Pendaratan Pasukan Sekutu, 20-10-1945
Gerak Maju Pasukan Sekutu, 26-10-1945 sampai di Magelang
Gerak Mundur Pasukan Sekutu, 21-11-1945 dari Magelang ke Ambarawa
15-12-1945 dari Ambarawa ke Semarang
Bantuan Pasukan dan Arah Perlawanan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Laskar Rakyat
Medan Pertempuran
Pusat Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar Rakyat
U
0
20
30 km

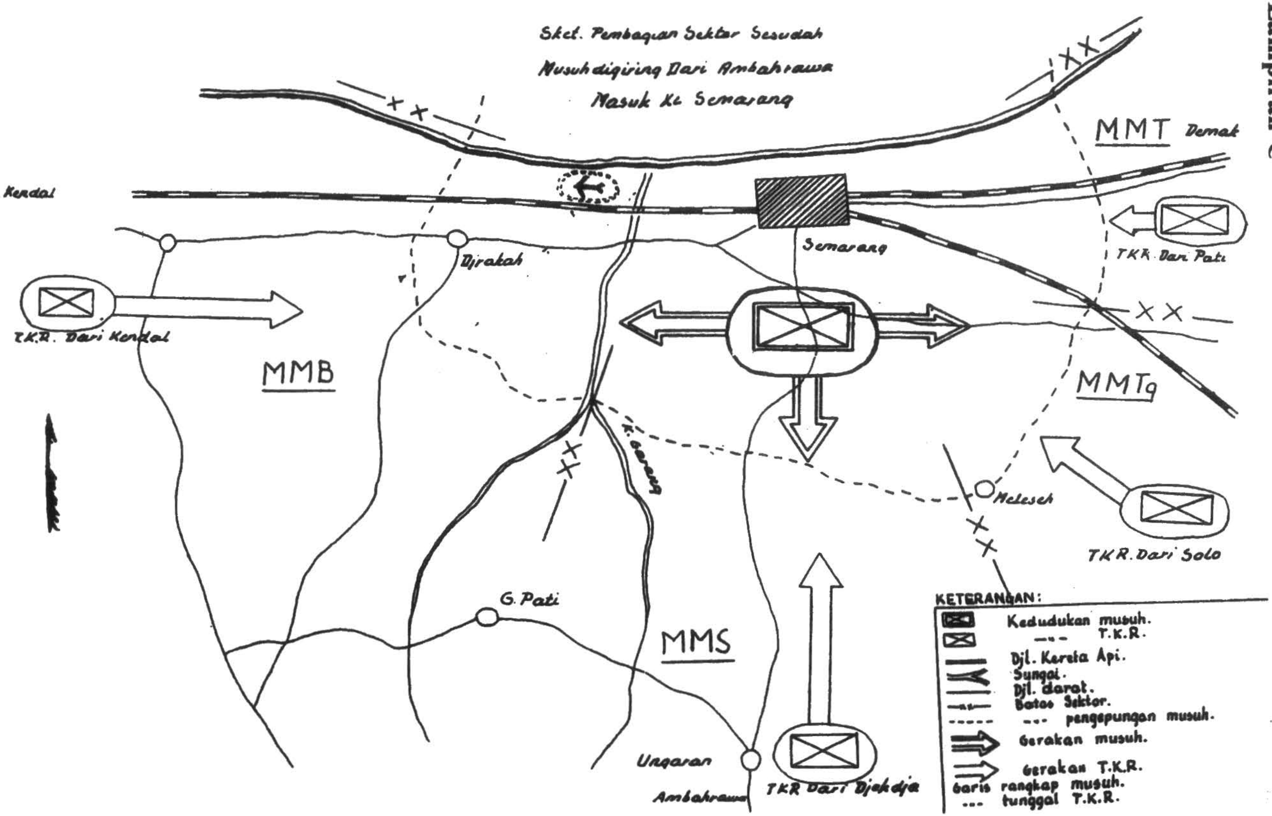
Sket. Pembagian Sektor Sesudah
Musuh digiring Dari Ambahrawa
Masuk Ke Semarang
Kendal
MMT
Demak
Djrakah
Semarang
T.K.R. Dari Pati
T.K.R. Dari Kendal
MMB
MMTg
K. Garang
Meleseh
TKR. Dari Solo
G. Pati
MMS
Ungaran
Ambahrawa
TKR Dari Djokdja
KETERANGAN:
Kedudukan musuh.
--- T.K.R.
Djl. Kereta Api.
Sungai.
Djl. darat.
Batas Sektor.
--- pengepungan musuh.
Gerakan musuh.
Gerakan T.K.R.
Garis rangkap musuh.
--- tunggal T.K.R.

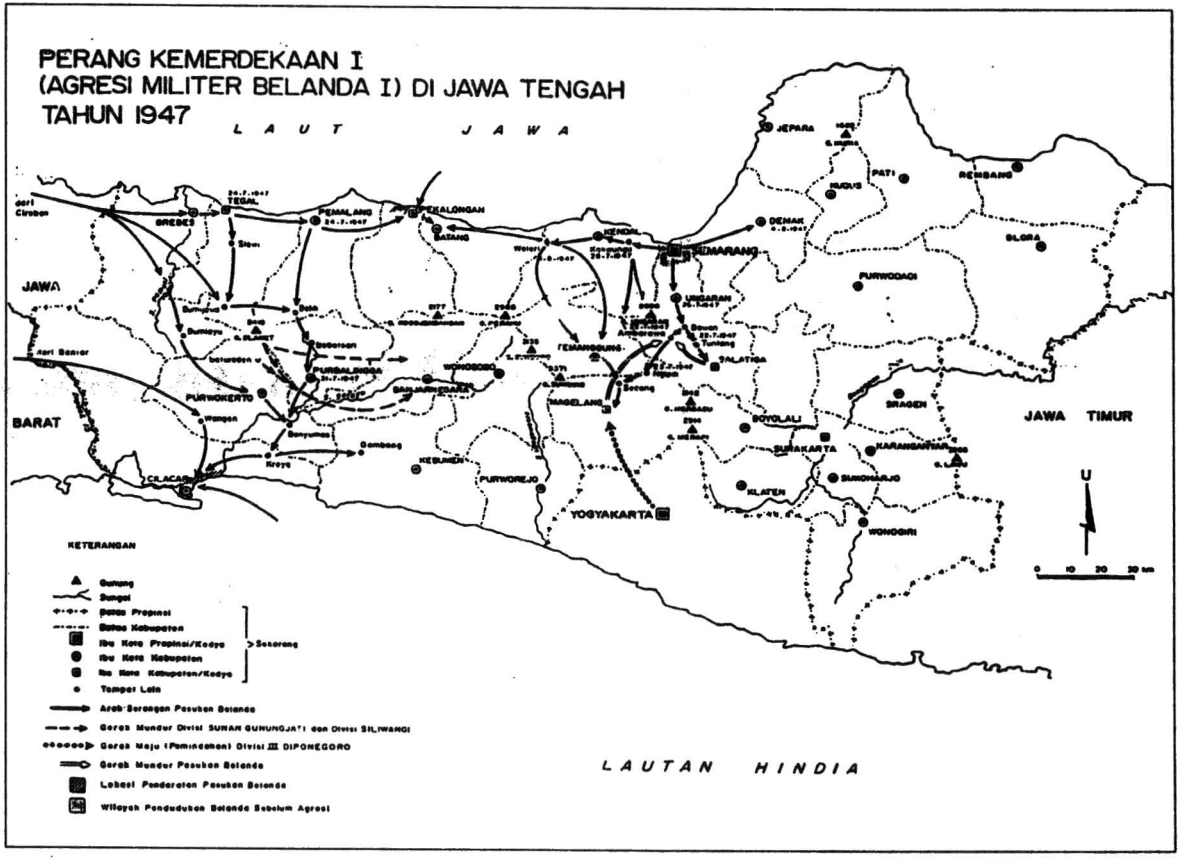
PERANG KEMERDEKAAN I
(AGRESI MILITER BELANDA I) DI JAWA TENGAH
TAHUN 1947
LAUT JAWA
JAWA BARAT
JAWA TIMUR
LAUTAN HINDIA
JEPARA
PATI
REMBANG
BLORA
PURWODADI
DEMAK
SEMARANG
PEKALONGAN
PEMALANG
TEGAL
BREBES
BANYUMAS
PURWOKERTO
CILACAP
KEBUMEN
PURWOREJO
YOGYAKARTA
MAGELANG
TEMANGGUNG
SALATIGA
BOYOLALI
SURAKARTA
KLATEN
SRAGEN
KARANGANYAR
SUKOHARJO
WONOGIRI
KETERANGAN
Gunung
Sungai
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Ibu Kota Provinsi/Kodya
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kabupaten/Kodya
Tempat Lain
Sasaran
Arah Serangan Pasukan Belanda
Garis Mundur Divisi SUNAN GUNUNGJATI dan Divisi SILIWANGI
Garis Maju (Pemindahan) Divisi III DIPONEGORO
Garis Mundur Pasukan Belanda
Lokasi Pendaratan Pasukan Belanda
Wilayah Pendudukan Belanda Sebelum Agresi
U
0 10 20 30 km

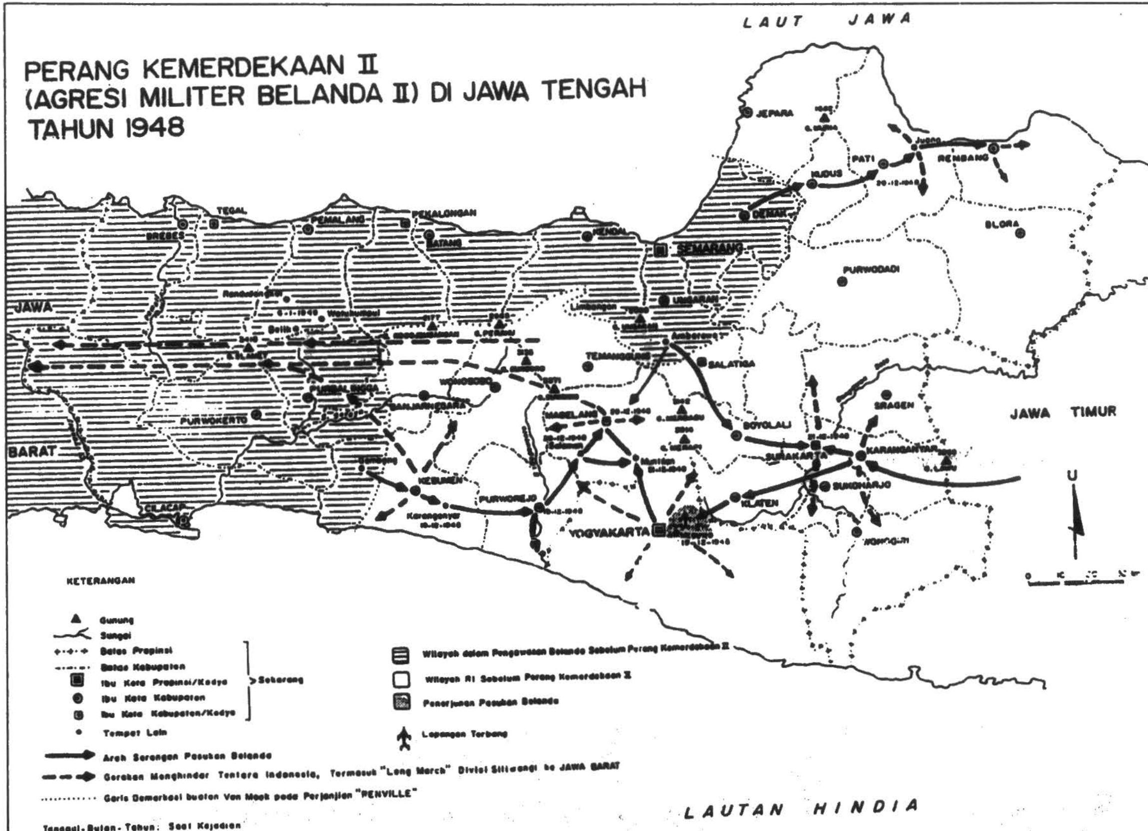
PERANG KEMERDEKAAN II
(AGRESI MILITER BELANDA II) DI JAWA TENGAH
TAHUN 1948
LAUT JAWA
JEPARA
PATI
KUDUS
REMBANG
DEMAK
BLORA
SEMARANG
KENDAL
BATANG
PEKALONGAN
PEMALANG
TEGAL
BREBES
PURWODADI
UNGARAN
Ambarawa
TEMANGGUNG
SALATIGA
WONOSOBO
BANJARNEGARA
PURBALINGGA
PURWOKERTO
JAWA BARAT
MAGELANG
BOYOLALI
SRAGEN
SURAKARTA
KARANGANYAR
SUKOHARJO
KLATEN
WONOGIRI
JAWA TIMUR
KEBUMEN
Karanganyar
PURWOREJO
CILACAP
YOGYAKARTA
Muntilan
U
KETERANGAN
Gunung
Sungai
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Ibu Kota Propinsi/Kodya
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kabupaten/Kodya
Sekarang
Tempat Lain
Wilayah dalam Pengawasan Belanda Sebelum Perang Kemerdekaan II
Wilayah RI Sebelum Perang Kemerdekaan II
Penerjunan Pasukan Belanda
Lapangan Terbang
Arah Serangan Pasukan Belanda
Gerakan Menghindar Tentara Indonesia, Termasuk "Long March" Divisi Siliwangi ke JAWA BARAT
Garis Demarkasi buatan Van Mook pada Perjanjian "RENVILLE"
Tanggal-Bulan-Tahun: Saat Kejadian
LAUTAN HINDIA

Lampiran F

PETA SITUASI DAERAH KENDEL PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II

skala, 1:260.000

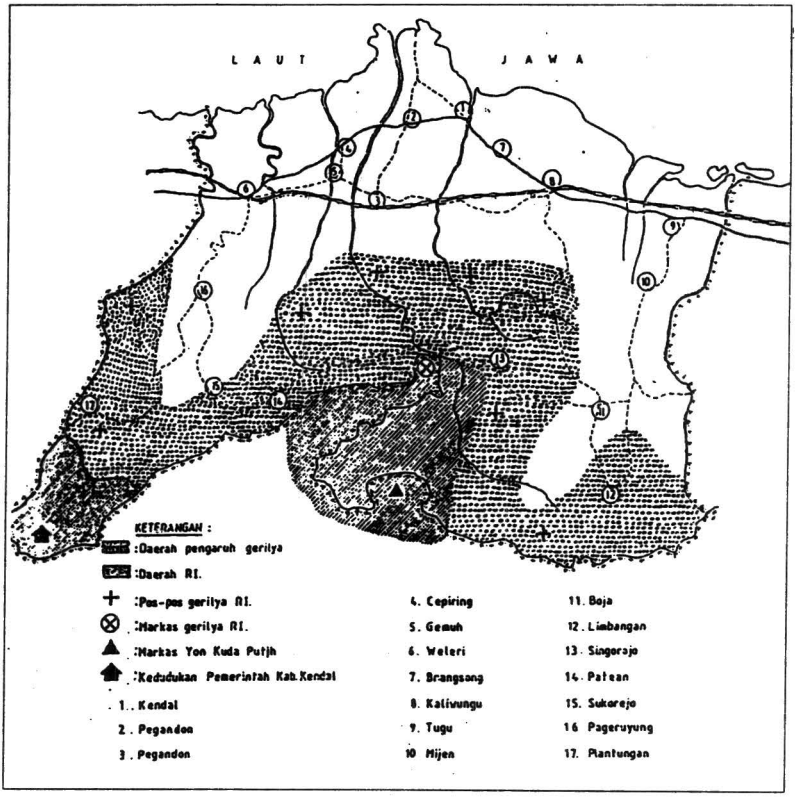

Lampiran G

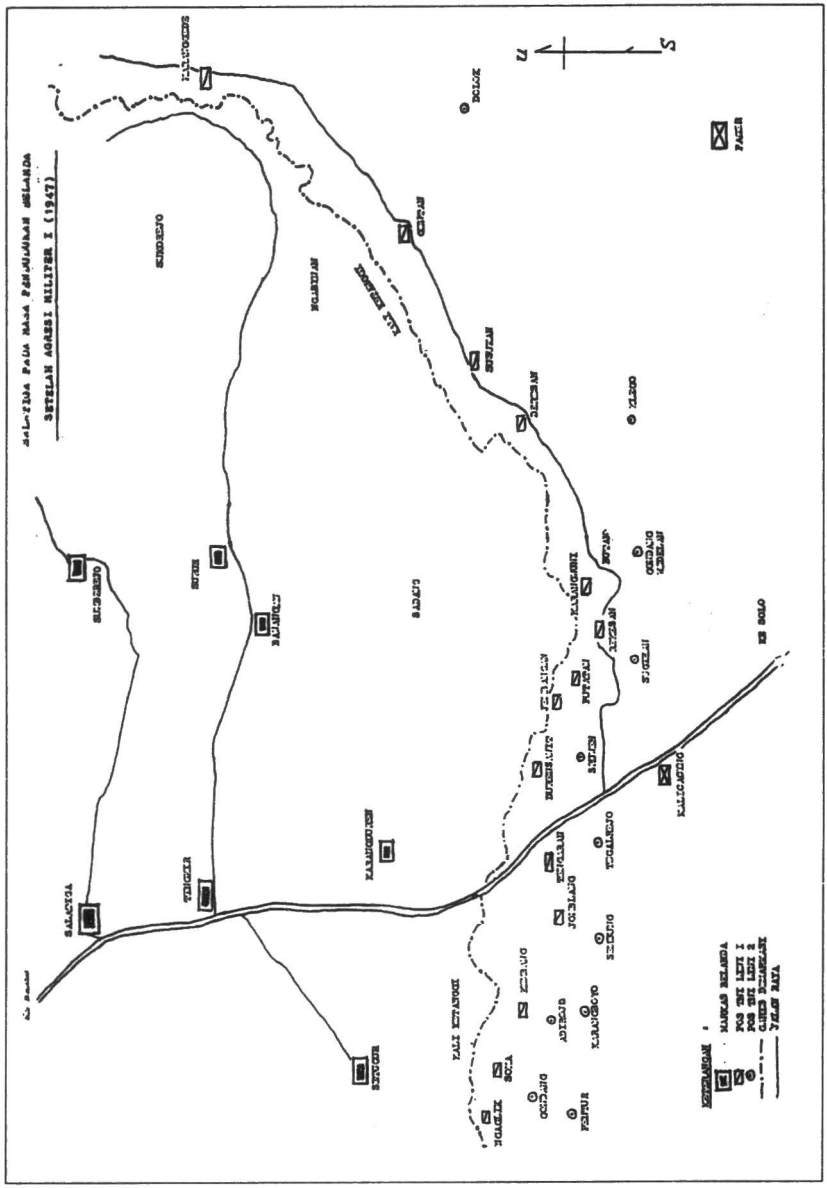
SETELAH AGRESI MILITER I (1947)
U
S
SALATIGA
BOYOLALI
KLATEN
SRAGEN
SOLO
PACITAN
KEBUMEN
KEDUNGJATI
KARANGANOM
KLATEN
SRAGEN
SOLO
PACITAN
KEBUMEN
KEDUNGJATI
KARANGANOM